



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

JALAN LINTAS SUMBAWA, TALABIU, WOHA, BIMA-NTB
LAMAM www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK skipmbima@kkp.go.id

7 Januari 2025

Yth. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16
Di Jakarta

SURAT PENGANTAR
Nomor B.29/SKIPM.BIM/TU.210/I/2025

No.	Jenis Surat yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	LKj Tahun 2024 Stasiun KIPM Bima	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima Tanggal :

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

Kepala Stasiun KIPM Bima,

Josiah Petrus





LAPORAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

Jalan Lintas Sumbawa Talabiu, Woha, Bima, Nusa Tenggara Barat



KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahunan Tahun 2024 Stasiun KIPM Bima merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Bima atas kinerja pencapaian kerjanya pada Tahun Anggaran 2024. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Stasiun KIPM Bima untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pencapaian tingkat kinerja instansi pemerintah menjadi tolok ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh masyarakat/publik. Laporan ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya *good governance* dan *clean government* yang menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi publik dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara.

Laporan Kinerja (LKj) Tahunan Tahun 2024 Stasiun KIPM Bima tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Bima Tahun 2024. Secara umum, pada tahun 2024 seluruh target sasaran strategis dan target kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Semoga penyajian LKj Tahunan Tahun 2024 Stasiun KIPM Bima ini mampu menjadi pijakan dan bahan pertimbangan bagi segenap pegawai Stasiun KIPM Bima untuk dapat mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar kinerja ke depan lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bima, 31 Januari 2025
Kepala Stasiun KIPM Bima,



Jonison Petrus

IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Tahunan Tahun 2024 adalah sebesar 104.52 %.

Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun KIPM Bima. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

Dari hasil evaluasi capaian kinerja, terdapat 14 Indikator Kinerja yang capaiannya telah memenuhi target, yang telah ditetapkan.

Uraian dan sasaran capaian dari 14 (Empat belas) Indikator tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	%
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	70	120
		2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	100	120
		3 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	80	114,29
		4 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	99	100	101,01
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	83,10	118,71
3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	6 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Kemanan Hasil Perikanan Bima (Indeks)	3,36	3,80	113,10

7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Bima (indeks)	86	87,83	102,13
8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	82	81,30	99,15
9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	100	100	100
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80	100	120
11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	93,76	97,29	103,76
12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	71	87,50	120
13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80	84,34	120
14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80	97,50	120

Keterangan : Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

Semua indikator kinerja telah tercapai target, untuk itu dalam pelaksanaan tugas fungsi dan tanggungjawab selanjutnya akan dilakukan upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi serta mengkomunikasikan program sesuai rencana yang ditetapkan.

Selain itu juga dengan melaksanakan manajemen resiko, terutama untuk program kerja bersifat prioritas, sehingga resiko yang akan dihadapi dapat diproyeksi, dimitigasi, sehingga kesempatan pencapaian tujuan dan target kinerja menjadi lebih besar.

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024

Realisasi anggaran belanja Stasiun KIPM Bima Tahunan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.776.054.962,00,- atau 98,73% dari Pagu DIPA sebesar Rp2.811.876.000,00,-. Persentase realisasi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp5.287.721.325,00,- atau 99,36% dari Pagu DIPA sebesar Rp5.321.951.000,00,-. Dari segi persentase dan realisasi anggaran Tahun 2024 lebih rendah dari Tahun 2023. Dikarenakan adanya pengalihan anggaran yang sebagian besar diserahkan kepada Badan Karantina Indonesia

sebesar Rp2.130.942.000,00,-. Dari Pagu DIPA Awal Rp5.129.522.000,00,- dan juga dikarenakan pengalihan anggaran sebesar Rp294.704.000.00,- oleh BPPMHKP ke UPT lain semula Pagu DIPA sebesar Rp2.998.580.000,00,- menjadi Rp2.811.876.000,00,-.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	11
2.1 CAPAIAN KINERJA	6
2.2 ANALISIS DAN EVALUASI	8
BAB III PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun 2024	5
Tabel 2.1 Capaian Kinerja SKIPM Bima Tahun 2024.....	7
Tabel 2.2.1 Target dan Realisasi IKS 1 Tahun 2024.....	9
Tabel 2.2.2 Target dan Realisasi IKS 2 Tahun 2024.....	10
Tabel 2.2.3 Target dan Realisasi IKS 3 Tahun 2024.....	11
Tabel 2.2.4 Target dan Realisasi IKS 4 Tahun 2024.....	13
Tabel 2.2.5 Target dan Realisasi IKS 02.1 Tahun 2024.....	14
Tabel 2.2.6 Target dan Realisasi IKS 03.1 Tahun 2024.....	16
Tabel 2.2.7 Target dan Realisasi IKS 03.2 Tahun 2024.....	18
Tabel 2.2.8 Target dan Realisasi IKS 03.3 Tahun 2024.....	19
Tabel 2.2.9 Target dan Realisasi IKS 03.4 Tahun 2024.....	20
Tabel 2.2.10 Target dan Realisasi IKS 03.5 Tahun 2024.....	21
Tabel 2.2.11 Target dan Realisasi IKS 03.6 Tahun 2024.....	23
Tabel 2.2.12 Target dan Realisasi IKS 03.7 Tahun 2024.....	24
Tabel 2.2.13 Target dan Realisasi IKS 03.8 Tahun 2024.....	25
Tabel 2.2.14 Target dan Realisasi IKS 03.9 Tahun 2024.....	25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Bima Tahun 2024	3
Gambar 1.2. Peta Strategis Stasiun KIPM Bima Tahun 2024	4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu, Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil hayati ikan yang akan di Konsumsi manusia atau masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Bima dituntut untuk melaksanakan secara *prudent, transparan, akuntabel, efektif* dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Bima dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi Stasiun KIPM Bima. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Bima. Selain memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi.

1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Visi

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.

Misi

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKIPM Bima mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM Bima menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c) Pelaksanaan administrasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bima;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Bima, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Stasiun KIPM Bima saat ini berjumlah 14 orang pegawai, dengan komposisi pegawai 6 orang di kantor Stasiun KIPM Bima dan 1 orang di Wilayah Kerja Labuanbajo, yang dibantu oleh 7 tenaga kontrak. Distribusi pegawai tidak seimbang namun tetap harus membentuk *workforce* yang efektif dan efisien.



Gambar 1.1

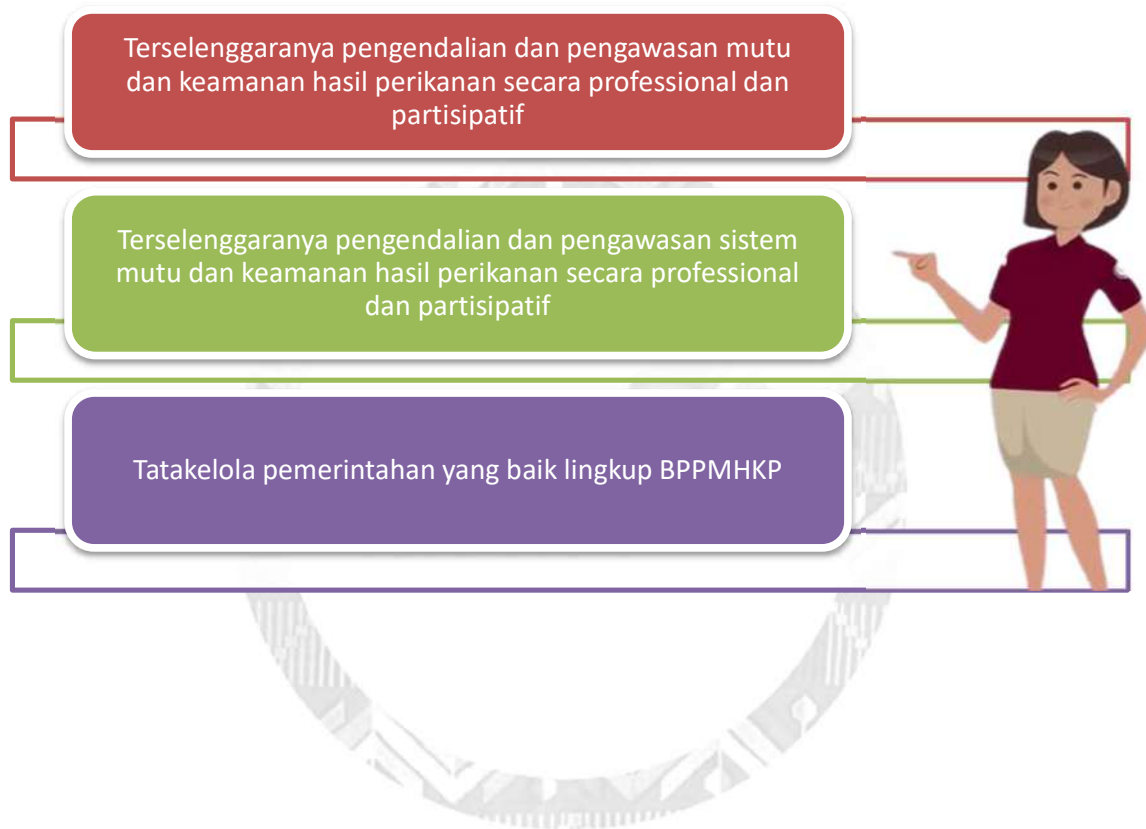
Struktur Organisasi Stasiun KIPM Bima (SOTK sementara)

1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Stasiun KIPM Bima dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Bima tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.2
Peta Strategis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima Tahun 2024



Tabel. 1.1
Penetapan Kinerja
Stasiun KIPM Bima Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	99
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70
3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bima	3,36
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	86
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	82
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	71
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	93,76
		11	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	80
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	80

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Capaian Kinerja

Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggungjawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Akuntabilitas kinerja organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bima merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Bima. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup organisasi, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Nilai Capaian kinerja Stasiun KIPM Bima Tahunan Tahun 2024 melebihi 100 yaitu Istimewa, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU dan IKM sebesar 117,67 %. Capaian Kinerja IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Capaian Kinerja IKU Stasiun KIPM Bima Tahunan Tahun 2024 ini capaiannya sudah tercapai maksimal. Namun masih adanya beberapa indikator kinerja yang pengukuran pencapaiannya belum dilakukan kegiatan. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang sangat baik pada masing-masing sasaran strategis.



**Capaian Kinerja Stasiun KIPM Bima pada Tahun 2024
seperti pada gambar
Tabel 2.1**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN TAHUNAN
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	100
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	80
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	99	100
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	83,10
3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bima	3,36	3,80
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	86	87,83
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	82	81,30
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	71	87,50
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	93,76	97,29
		11	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	100	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	80	100
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	80	84,34
			Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	80	97,50

2.2 Analisis dan Evaluasi

Sebagai analisis dan evaluasi untuk Capaian kinerja pada Stasiun KIPM Bima meliputi 3 Sasaran Strategi.

Sasaran Strategis 01. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.

IKS.1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak

pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Stasiun KIPM Bima saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Pada tahun 2024 Stasiun KIPM Bima hanya melakukan sertifikasi terhadap 2 jenis sertifikasi yaitu :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB);
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.

Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.

Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E}{xn} \times 100 \%$$

%X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Jumlah Unit menerapkan CPIB

C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPIB

Kapal xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

$$\frac{A+B+F}{xn} \times 100\% = \frac{1+1+13}{12} \times 100\% = 125 \%$$

Output dari kegiatan ini terdiri dari :

- 8 Sertifikat CPIB dengan masa berlaku 2 tahun. Sebanyak 11 sertifikat telah terbit pada bulan Desember 2024, sedangkan sebanyak 2 sertifikat;

Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada akhir tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp0,00,- yang digunakan untuk :

1. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Rp0,00,-
2. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) Rp0,00,-

Realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp0,00,- atau 00,00 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	Rp0,00,-	Rp0,00,-	Rp0,00,-
2	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)	Rp0,00,-	Rp0,00,-	Rp0,00,-
JUMLAH		Rp0,00,-	Rp0,00,-	Rp0,00,-

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi SKP TW I sebanyak 6 orang yang terdiri dari 2 Inspektur Mutu, 1 Asisten Inspektur Mutu, 1 Analis Mutu dan 2 PJLP dari Stasiun KIPM Bima.

Pada tahun 2024, kegiatan CPIB belum dilakukan kegiatan untuk mencapai target jumlah sertifikat yang dicapai. Berikut indikatornya :

Tabel 2.2.1
Target dan Realisasi IKS.1 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahunan		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	70	70	120

IKS.2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Pada Stasiun KIPM Bima terdapat Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen terdiri dari :

1. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.

Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) untuk produk perikanan adalah suatu sistem jaminan keamanan pangan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi dan distribusi produk perikanan.

Tujuan HACCP adalah untuk memastikan keamanan pangan produk perikanan dengan mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi dan distribusi.

2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan ikan (UPI) yang dimaksud antara lain :

1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;

2. Unit penanganan rumput laut kering;
3. Gudang beku;
4. Gudang dingin;
5. Gudang kering, dan/atau
6. Miniplant

Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik (Online Single Submission)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Sertifikat Pengolahan Ikan (SPI) atau Sertifikat keterampilan di bidang Keamanan Pangan yang setara penanggungjawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil);
 2. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019);
 3. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.
- Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

Xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\% = \%X = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

- Output dari kegiatan ini terdiri dari :
 - a. 1 Surat Keterangan Hasil Surveilen PT. Berkas Nisa Sura Bima

Untuk kegiatan Pasca Panen pada tahun 2024 sudah dilakukan kegiatan, sehingga target pencapaiannya sudah terlaksana. Berikut indikator pencapaiannya.

Tabel 2.2.2
Target dan Realisasi IKS.2 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahunan		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	70	100	120

IKS.3 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Stasiun KIPM Bima secara berkesinambungan melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah Republik Indonesia, khususnya pada jalur distribusi hasil perikanan yang keluar dan masuk melalui wilayah kerja. Pengawasan dilakukan mulai dari proses pemeriksaan dokumen, pengujian laboratorium, hingga inspeksi langsung terhadap sarana dan prasarana penanganan ikan.

Berdasarkan capaian kinerja, persentase pengawasan mutu hasil perikanan menunjukkan tren yang positif, sejalan dengan meningkatnya kesadaran pelaku usaha perikanan dalam memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Setiap produk perikanan yang diawasi dipastikan memenuhi ketentuan CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik), HACCP, serta standar mutu ekspor dan domestik. Capaian persentase pengawasan mutu hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima tidak hanya menggambarkan keberhasilan dalam menjaga mutu produk perikanan, tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen dalam negeri maupun

negara mitra dagang. Dengan pengawasan yang optimal, diharapkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional semakin meningkat, serta hasil perikanan yang diproduksi tetap terjaga kualitas, higienitas, dan keamanan pangannya.

Pada ahun 2024, persentase capaian pengawasan mutu hasil perikanan yang dilaksanakan UPT Stasiun KIPM Bima mencapai **100%** dari target yang telah ditetapkan. Angka ini terdiri atas:

- **100% pengawasan produk perikanan ekspor**, meliputi pemeriksaan dokumen sertifikasi mutu, dan pengujian parameter keamanan pangan.
- **100% pengawasan produk perikanan domestik**, yang difokuskan pada distribusi antar daerah serta pengendalian mutu hasil perikanan yang beredar di pasar lokal.
- **100% pengawasan sarana dan prasarana**, seperti unit pengolahan ikan, kapal penangkap, hingga tempat pendaratan ikan, untuk memastikan penerapan standar **CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik)** dan sistem jaminan mutu lainnya.

Pencapaian tersebut menunjukkan tren positif, sejalan dengan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, hasil pengawasan juga berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan konsumen internasional terhadap mutu produk perikanan Indonesia, khususnya yang berasal dari wilayah kerja Stasiun KIPM Bima.

Dengan capaian persentase tersebut, UPT Stasiun KIPM Bima tidak hanya menjaga kualitas hasil perikanan tetapi juga mendukung keberlanjutan perdagangan internasional serta ketahanan pangan nasional. Ke depan, kegiatan pengawasan mutu akan terus ditingkatkan, baik dari sisi jumlah pengawasan, kualitas layanan, maupun sinergi dengan pemangku kepentingan, sehingga mutu dan keamanan hasil perikanan tetap terjamin sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk kegiatan Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Bima pada tahun 2024 Tahunan sudah dilakukan kegiatan, sehingga target pencapaiannya sudah terlaksana. Berikut indikator pencapaiannya

Tabel 2.2.3
Target dan Realisasi IKS.3 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahunan		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	99	100	101,01

IKS.4 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor

Pada Tahunan tahun 2024, produk perikanan Indonesia telah diterima di 1 negara dari total 3 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Capaian ini menunjukkan bahwa sektor perikanan Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Target indikator kinerja utama (IKU) tahun 2024 memang ditetapkan pada angka 1 negara, yang berarti hingga pertengahan tahun, target tersebut sudah berhasil tercapai. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu 2 negara pada tahun 2024, terjadi penurunan jumlah negara tujuan ekspor. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan regulasi impor di beberapa negara, persaingan global yang semakin ketat, atau tantangan dalam pemenuhan standar mutu di beberapa pasar tertentu.

Tabel 1. Tabel Jumlah Sertifikat Ekspor ke Negara Tujuan

No	Bulan	Jumlah Sertifikat Diterbitkan
1	Januari 2024	38 Sertifikat
2	Februari 2024	28 Sertifikat
3	Maret 2024	19 Sertifikat
4	April 2024	9 Sertifikat
5	Mei 2024	15 Sertifikat
6	Juni 2024	35 Sertifikat
7	Juli 2024	16 Sertifikat
8	Agustus 2024	25 Sertifikat
9	September 2024	66 Sertifikat
10	Oktober 2024	17 Sertifikat
11	November 2024	4 Sertifikat
12	Desember 2024	4 Sertifikat
Total		276 Sertifikat

*Data hingga 31 Desember 2024

Pada periode Januari hingga Desember 2024, jumlah Sertifikat Ekspor ke Negara Tujuan yang diterbitkan oleh Stasiun KIPM Bima menunjukkan tren peningkatan signifikan dibanding periode yang sama tahun 2023.

Tercatat sebanyak 276 sertifikat ekspor telah diterbitkan pada tahun 2024, meningkat sekitar 70% dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Peta ekspor menunjukkan bahwa produk perikanan Indonesia tersebar ke berbagai wilayah utama dunia, termasuk Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada), Eropa (seperti Inggris, Belanda, Belgia, Jerman, Prancis, Spanyol, dan Italia), Asia (China, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura), Timur Tengah (Arab Saudi), serta Oseania (Australia). Hal ini mengindikasikan bahwa produk perikanan Indonesia telah berhasil masuk ke berbagai pasar strategis dunia, terutama di negara-negara dengan permintaan tinggi terhadap produk perikanan. Untuk menjaga dan meningkatkan keberterimaan produk perikanan di pasar global, diperlukan strategi yang lebih agresif dalam mempertahankan serta memperluas pangsa pasar, terutama di negara-negara yang mengalami penurunan impor dari Indonesia. Selain itu, peningkatan kualitas, pemenuhan standar keamanan pangan internasional, serta diversifikasi produk ekspor perlu terus dilakukan agar dapat kembali mencapai atau bahkan melampaui capaian ekspor pada tahun sebelumnya.

Untuk kegiatan Ekspor ke negara tujuan pada tahun 2024 Tahunan sudah dilakukan kegiatan, sehingga target pencapaiannya sudah terlaksana. Berikut indikator pencapaiannya.

Tabel 2.2.4
Target dan Realisasi IKS.4 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahunan		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	70	100	120

Sasaran Strategis 02. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

IKS.02.2 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi adalah salah satu indikator kinerja penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan prosedur operasional terhadap standar mutu yang diakui secara nasional dan internasional. Di lingkungan Stasiun KIPM Bima, pengelolaan laboratorium pengujian berpedoman pada **SNI ISO/IEC 17025:2017**, sedangkan pengelolaan lembaga inspeksi mengacu pada **SNI ISO/IEC 17020:2012**.

Indikator ini menjadi tolok ukur kualitas layanan pengujian dan inspeksi yang diberikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha perikanan, instansi pemerintah, dan negara tujuan ekspor. Pemenuhan standar ini tidak hanya menjamin keakuratan hasil uji dan inspeksi, tetapi juga menjadi jaminan kredibilitas bagi sertifikat dan dokumen resmi yang diterbitkan di Stasiun KIPM Bima.

a. Ruang Lingkup dan Peran Strategis

Laboratorium pengujian di Stasiun KIPM Bima memiliki peran penting dalam menguji berbagai parameter mutu dan keamanan pangan hasil perikanan, meliputi:

- Uji Organoleptik (penilaian mutu visual, bau, tekstur, dan rasa).
- Uji Mikrobiologi (bakteri patogen dan mikroorganisme pembusuk).
- Uji Kimia (logam berat, residu bahan kimia berbahaya, dan cemaran lain).
- Uji Fisik (kadar air, pH, dan parameter pendukung lainnya).

Sementara itu, lembaga inspeksi memastikan kesesuaian proses penanganan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk perikanan dengan standar mutu dan keamanan pangan. Proses ini meliputi verifikasi lapangan, audit fasilitas, dan pemeriksaan dokumen pendukung.

b. Langkah Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Untuk mencapai nilai pemenuhan yang tinggi, UPT Stasiun KIPM Bima melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain:

1. **Kalibrasi dan Perawatan Rutin Peralatan Uji** untuk menjamin ketepatan pengukuran.
2. **Pelaksanaan Uji Profisiensi (*Proficiency Testing*)** secara berkala untuk memastikan konsistensi hasil antar laboratorium.
3. **Pengembangan Kompetensi Personel** melalui pelatihan teknis, sertifikasi, dan workshop nasional maupun internasional.
4. **Audit Internal Dan Eksternal** yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau lembaga terkait.
5. **Pengendalian Dokumen Mutu** untuk menjaga keterlacakan (*traceability*) data hasil uji dan inspeksi.
6. **Peningkatan Teknologi Laboratorium** dengan peralatan modern yang sesuai kebutuhan pengujian mutakhir.

c. Capaian dan Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian tiga tahun terakhir, nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu di Stasiun KIPM Bima berada pada kategori **Sangat Baik**, dengan capaian konsisten di atas 95%. Hal ini menunjukkan bahwa laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi mampu mempertahankan kinerja sesuai standar akreditasi, bahkan ketika terjadi penyesuaian regulasi internasional.

Pada tahun 2023, nilai pemenuhan sedikit terpengaruh oleh adanya revisi persyaratan dokumentasi dari lembaga akreditasi yang memerlukan pembaruan format laporan dan rekaman mutu. Namun, dengan langkah cepat dalam melakukan penyesuaian prosedur dan peningkatan pelatihan teknis, nilai kinerja kembali meningkat pada tahun 2024 dan berhasil mencapai salah satu skor tertinggi selama periode pengukuran.

d. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai pemenuhan ini, Stasiun KIPM Bima menetapkan strategi ke depan, antara lain:

- **Memperluas Ruang Lingkup Akreditasi** laboratorium untuk mencakup lebih banyak parameter pengujian yang dipersyaratkan pasar ekspor.
- **Mengintegrasikan Sistem Pengelolaan Mutu dengan Platform Digital** agar pencatatan, analisis, dan pelaporan hasil uji lebih cepat dan transparan.

- **Memperkuat Kolaborasi** dengan laboratorium acuan dan lembaga inspeksi lain untuk pertukaran pengetahuan dan teknologi.
- **Mengadakan Pelatihan Lanjutan** terkait metode pengujian baru, khususnya untuk mendukung persyaratan keamanan pangan yang terus berkembang di tingkat global.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi di Stasiun KIPM Bima tidak hanya stabil di kategori “Sangat Baik”.

Tabel 2.2.6
Target dan Realisasi IKS.02.2 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahunan		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	70	83,10	118,71

Sasaran Strategis 03. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP

IKS.03.1 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima

Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Stasiun KIPM Bima pada periode Tahunan tahun 2024, diperoleh nilai IKM sebesar 94,97 persen dan kategori mutu A yang berada pada kategori “Sangat Baik”. Penilaian melibatkan 32 responden, yang memberikan apresiasi positif terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Survei ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, meliputi aspek persyaratan layanan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, kompetensi petugas, perilaku petugas, penanganan pengaduan, sarana prasarana, dan kemudahan akses informasi.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai pelayanan Stasiun KIPM Bima telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi, khususnya pada aspek ketepatan waktu layanan, keramahan petugas, serta kejelasan informasi. Namun demikian, terdapat beberapa masukan yang perlu menjadi perhatian, di antaranya peningkatan fasilitas pendukung dan optimalisasi saluran pengaduan masyarakat.

Dengan capaian nilai IKM ini, Stasiun KIPM Bima berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sarana prasarana, serta inovasi layanan berbasis digital, sehingga pelayanan yang diberikan semakin cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

Tabel 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan BPPMHKP

Indikator	Nilai	Kategori
Nilai Mutu Pelayanan	94,97	Sangat Baik
Mutu Pelayanan	A	-
Jumlah Responden	3,80	-
Rata-rata Unsur Pelayanan		
Persyaratan Layanan	3,83	Sangat Baik
Kemudahan Prosedur	3,81	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	3,76	Sangat Baik
Kesesuaian Biaya	3,80	Sangat Baik
Kesesuaian Produk	3,81	Sangat Baik
Kompetensi Petugas	3,76	Sangat Baik
Perilaku Petugas	3,78	Sangat Baik
Layanan Konsultasi	3,81	Sangat Baik
Fasilitas Pelayanan	3,79	Sangat Baik



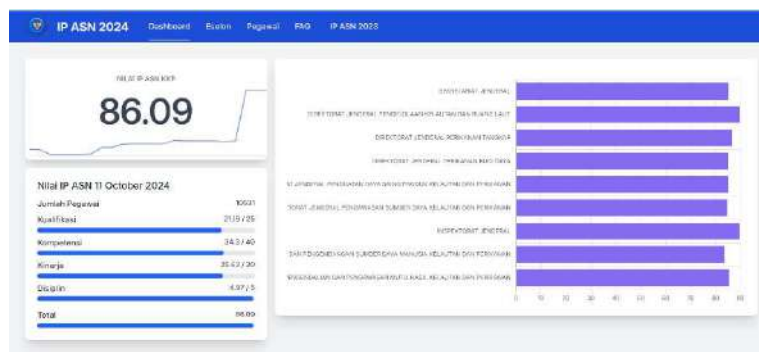
Predikat Sangat Baik untuk hasil survei IKM lingkup Stasiun KIPM BIMA Tahunan Tahun 2024 ini dapat dicapai dikarenakan meningkatnya kepatuhan responden dalam mengisi questioner Survey Kepuasan Masyarakat. Stasiun KIPM Bima tetap konsisten melakukan perubahan dan peningkatan pada setiap unsur pelayanan baik petugas pelayanan, sarana dan prasarana, serta sistem pelayanan yang dikemas melalui salah satu bentuk pelayanan yaitu "Pelayanan SIAP". Seluruh Pegawai lingkup Stasiun KIPM BIMA juga telah berkomitmen untuk melaksanakan "Pelayanan SIAP", sesuai dengan kebijakan, standard dan prosedur-prosedur pelayanan yang telah ditetapkan dengan penandatanganan pakta integritas. Stasiun KIPM BIMA juga telah menerapkan beberapa sistem manajemen yang mengacu kepada standar internasional untuk mendukung peningkatan kinerja layanan dengan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017. Berikut pencapaian indikatornya :

Tabel 2.2.5
Target dan Realisasi IKS.03.1 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahunan		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima	3,36	3,80	113,10

IKS.03.2 Indeks Profesionalitas ASN dilingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).



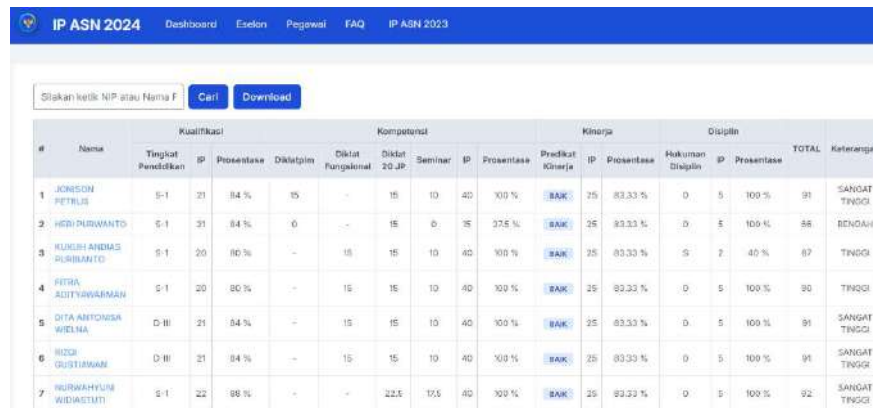
Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut :

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu/D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)

e. Pendidikan dibawah SLTA

3. Kompetensi

- a. Diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir.
- b. Diukur dari Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami baik hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat.



#	Nama	Kualifikasi			Kompetensi					Kinerja		Disiplin		TOTAL	Keterangan			
		Tingkat Pendidikan	IP	Prosentase	Diklatpin	Diklat Fungsional	Diklat 20 JP	Seminar	IP	Prosentase	Predikat Kinerja	IP	Prosentase			Hukuman Disiplin	IP	Prosentase
1	JONSON PETRUS	S-1	31	84 %	15	-	15	10	40	100 %	BAIK	25	83,33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
2	HENDRI PURWANTO	S-1	31	84 %	0	-	15	0	35	37,5 %	BAIK	25	83,33 %	0	5	100 %	86	BENDAH
3	KUNCI ANDAS SUBIANTO	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83,33 %	5	7	40 %	87	TINGGI
4	FIRRA ADITHYANEGARA	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83,33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
5	DITA ANTONISA WILNA	D III	31	84 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83,33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
6	HENDRI GUSTAMAN	D III	31	84 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83,33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
7	HURSAHYUNI WIDIAWATI	S-1	22	98 %	-	-	22,5	10,5	40	100 %	BAIK	25	89,29 %	0	5	100 %	92	SANGAT TINGGI

Dari penghitungan semua komponen tersebut, berikut capaian Tahunan atas indikator IP ASN Stasiun KIPM Bima.

Tabel 2.2.7
Target dan Realisasi IKS.03.2 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahunan		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Indeks Profesionalitas ASN	86	87,83	102,13

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara (IP ASN) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima tahun 2024 telah tercapai dari target sebesar 86 telah tercapai di tahun 2024. Hal ini dapat dilihat pada system informasi kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan secara online.

IKS.03.3 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sector publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Evaluasi dan Penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon IV KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Target indikator nilai AKIP Stasiun KIPM Bima pada tahun 2024 adalah 85 (Kategori A/Memuaskan). Realisasi nilai AKIP dilakukan tahunan sehingga pada tahun 2024 belum tercapai.

Tabel 2.2.8
Target dan Realisasi IKS.03.3 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahunan		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	82	81,30	99,15

Rencana aksi untuk meningkatkan Nilai AKIP pada tahun yang akan datang, yaitu :

1. Melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
2. Meningkatkan peran Stasiun KIPM Bima;

3. Melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak
4. Penyelarasan data dan informasi terkait dengan target atau capaian pada aplikasi kinerjajaku dengan Renstra ataupun Renja sehingga dapat memberikan informasi yang lebih valid
5. Implementasi dari rencana aksi terhadap target-target yang tidak tercapai.

IKS.03.4 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Pada Tahunan tahun 2024, indikator Presentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Bima belum tercapai.

Tabel 2.2.9
Target dan Realisasi IKS.03.4 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahunan		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	100	100	100

IKS.03.5 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima

Indikator ini adalah menghitung persentase dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jendral sebagai APIP sebagai hasil temuan dari

pengawasan/evaluasi, dan menghitung tindak lanjut dari satker dalam menuntaskan temuan/rekomendasi ini.

Pada tahun 2021 Stasiun KIPM Bima telah dievaluasi sebanyak 2 kali oleh Itjen KKP atas pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada tahun 2021. Pekerjaan ini dievaluasi pada bulan September, kemudian dilakukan evaluasi Kembali di bulan Desember. Pekerjaan konstruksi menjadi perhatian karena adanya refofusing anggaran, yang membuat pekerjaan menjadi tidak bisa dibayarkan penuh pada tahun anggaran berjalan, namun dilakukan secara carry over.

Dari dua kali evaluasi oleh Itjen dikeluarkan 2 LHP dengan total terdapat 5 rekomendasi. Dari 5 rekomendasi tersebut, semua telah dilakukan tindak lanjut menjawab rekomendasi yang diberikan. Atas tercapainya 5 tindak lanjut atas rekomendasi ini, maka diperoleh capaian THLP sebesar 100%.

Namun pada tahun 2024, tidak melakukan pekerjaan kontruksi sehingga pada tahun tersebut tim pengawas dan pemeriksa tidak melakukan kunjungan di Stasiun KIPM Bima.

Tabel 2.2.10
Target dan Realisasi IKS.03.5 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahunan		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima	80	100	120

IKS.03.6 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA :

1. Kelancaran Pelaksanaan Anggaran (Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM)
2. Mendukung Manajemen Kas (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D)
3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP) (Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja)

Monitoring dilaksanakan untuk memantau data pelaksanaan anggaran belanja dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta memperbaiki tata kelola anggaran. Hasil monitoring pelaksanaan anggaran belanja dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, salah satunya adalah untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran melalui perbandingan nilai kualitas kinerja antar unit organisasi dengan menggunakan indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^3 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}$$

No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%	No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%	No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Revisi DIPA (10%)	1.	Penyerapan Anggaran (20%)	1.	Capaian Output 25%
2.	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	2.	Data Kontrak (10%)		
		3.	Penyelesaian Tagihan (10%)		
		4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)		
		5.	Dispensasi SPM (5%)		

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan,

efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 20 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.2.11
Target dan Realisasi IKS.03.6 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahunan		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima	93,76	97,29	103,76

IKS.03.7 Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima

Nilai kinerja anggaran UPT Stasiun KIPM Bima adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup SKIPM Bima didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

Kesalahan SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier dan ditolak oleh KPPN. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu. Untuk

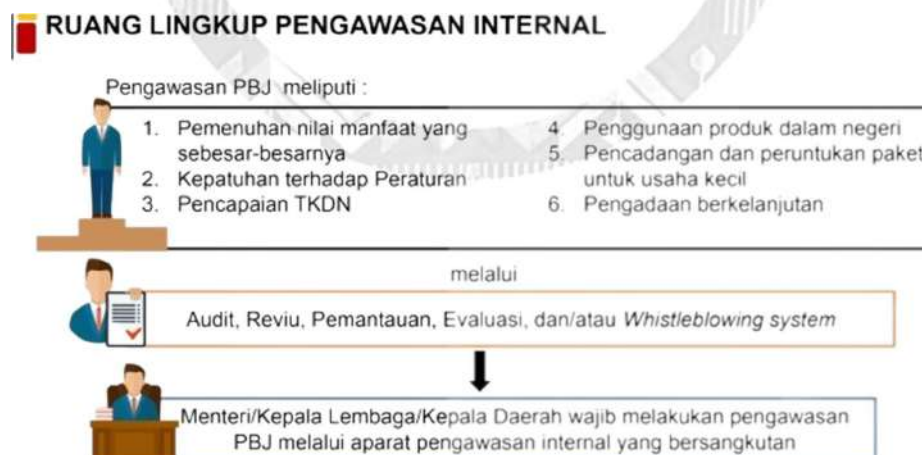
meningkatkan nilai capaian indikator ini di triwulan berikutnya, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OM SPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan agar tidak tertolak oleh KPPN.

Tabel 2.2.12
Target dan Realisasi IKS.03.7 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahunan		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima	71	87,50	120

IKS.03.8 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset.



Dalam meningkatkan kepatuhan pengadaan barang dan/atau jasa pada lingkup Stasiun KIPM belum untuk tahun 2024 belum terealisasi sesuai target perencanaan, yaitu 80%. Realisasi terkendala dengan masih diblokirnya Backdrop

ruang pelayanan serta Pengadaan tower dan tendon air. Berikut ulasan indikator pencapaian target realisasinya :

Tabel 2.2.13
Target dan Realisasi IKS.03.8 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahunan		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima	80	84,34	120

IKS.03.9 Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima

Realisasi tingkat kepatuhan tim pengelola BMN dapat dihitung setiap setahun sekali diakhir tahun 2024, pencapaiannya bisa sampai dengan 100%. Pada tahun 2024 pencapaian yang di targetkan adalah sekitar 80%. Kegiatan ini dapat dipengaruhi oleh peran aktif operator BMN dalam hal pelaporan asset yang dimiliki, serta pemanfaatannya untuk kegiatan Stasiun KIPM Bima. Apabila Operator BMN dan ASN lainnya turut serta aktif dalam melaporkan pemanfaatan asset BMN maka pemanfaatan asset BMN dapat lebih optimal dan tingkat kepatuhan dapat tercapai maksimal.

Namun di tahun 2024 tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkup Stasiun KIPM Bima belum dilakukan kegiatannya. Berikut indikator pencapaiannya :

Tabel 2.2.14
Target dan Realisasi IKS.03.9 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahunan		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima	80	97,50	120

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Bima tahun 2024 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Bima pada tahun anggaran 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target Tahunan dan target Renstra tahun 2022-2025 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Secara umum, capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun KIPM Bima yang diperjanjikan pada tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan adanya konsistensi kinerja, komitmen yang kuat, serta kerja sama yang baik dari seluruh jajaran pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini juga menjadi wujud nyata dari upaya Stasiun KIPM Bima dalam melaksanakan mandat untuk menjaga mutu, keamanan hasil perikanan, serta kelancaran arus lalu lintas komoditas perikanan di wilayah kerja.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2024, masih ditemui sejumlah kendala dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Kendala tersebut, meskipun tidak menghambat pencapaian target secara keseluruhan, tetap memberikan pengaruh terhadap efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan program. Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai yang tersedia masih terbatas bila dibandingkan dengan beban kerja dan cakupan wilayah pengawasan. Selain itu, kompetensi pegawai pada bidang tertentu masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas agar lebih optimal dalam menghadapi tuntutan kerja yang semakin kompleks.

2. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana

Dukungan anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan operasional, terutama untuk kegiatan yang membutuhkan biaya besar seperti mobilisasi lapangan, pengawasan lintas wilayah, maupun pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang. Keterbatasan fasilitas kerja, baik dari sisi teknologi maupun infrastruktur, juga menjadi tantangan tersendiri dalam menunjang efektivitas program.

3. Kondisi Geografis dan Aksesibilitas Wilayah

Sebagian besar lokasi kegiatan pengawasan, inspeksi, maupun pelayanan berada di daerah terpencil dengan akses transportasi yang sulit. Kondisi geografis ini menyebabkan kebutuhan waktu dan biaya yang lebih besar untuk menjangkau lokasi, serta berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Faktor Eksternal

Perubahan kebijakan, dinamika pasar global, serta faktor cuaca ekstrem memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan program. Misalnya, terganggunya jadwal ekspor akibat kondisi cuaca maupun adanya penyesuaian regulasi dari negara mitra dagang, yang berdampak pada pelayanan ekspor dan pengawasan mutu hasil perikanan.

5. Koordinasi dan Kolaborasi Antar Pihak

Meskipun koordinasi dengan instansi terkait, pelaku usaha, serta masyarakat telah berjalan cukup baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan sinergi. Beberapa kegiatan strategis memerlukan dukungan lintas sektor, sehingga koordinasi yang lebih intensif dan kolaborasi yang lebih solid masih menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat efektivitas program di lapangan.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut serta meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya, Stasiun KIPM Bima merumuskan beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas SDM

- Mengusulkan penambahan formasi pegawai sesuai kebutuhan teknis dan administratif.

- Melaksanakan program peningkatan kompetensi melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi teknis.
- Mendorong peningkatan keterampilan pegawai dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efektivitas kerja.

2. **Optimalisasi Anggaran dan Sarana Prasarana**

- Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran melalui perencanaan yang lebih tepat sasaran.
- Mengusulkan penambahan dukungan anggaran untuk program prioritas, khususnya pengawasan dan pelayanan ekspor.
- Melakukan perawatan rutin serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung berbasis teknologi.

3. **Peningkatan Aksesibilitas dan Efisiensi Mobilisasi**

- Menyusun strategi penjadwalan kegiatan lapangan yang lebih terintegrasi untuk mengurangi biaya mobilisasi.
- Memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta terkait dukungan transportasi ke wilayah terpencil.

4. **Antisipasi Faktor Eksternal**

- Meningkatkan sistem pemantauan dan mitigasi risiko terhadap cuaca ekstrem dan dinamika pasar global.
- Menjalin komunikasi lebih intensif dengan mitra dagang internasional guna meminimalisir dampak perubahan regulasi.

5. **Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi**

- Memperkuat sinergi dengan instansi terkait, asosiasi pelaku usaha, dan masyarakat melalui forum komunikasi rutin.
- Mengembangkan program kolaboratif yang berbasis pada kebutuhan bersama, khususnya dalam pengawasan mutu hasil perikanan dan dukungan ekspor.

Dengan adanya rekomendasi dan langkah tindak lanjut tersebut, diharapkan Stasiun KIPM Bima dapat semakin meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat peran strategis dalam menjaga mutu hasil perikanan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja pada tahun-tahun mendatang.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Bima pada tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja;
2. Meningkatkan pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pemenuhan sarana dan prasarana serta SDM yang kompeten secara bertahap





LAMPIRAN

BPP
MHKP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM

Nomor: 3/BPPMHKP.2/RC.610/I/2025

Yth : Kepala Pusat Manajemen Mutu
Dari : Ketua Tim Kerja Sistem Manajemen Mutu
Hal : Penyampaian Capaian IKU
Lampiran : satu berkas
Tanggal : 3 Januari 2025

Sehubungan telah selesainya kegiatan Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan capaian indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab Tim Kerja Sistem Manajemen Mutu, sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar **81,35** didapatkan dari 13 laboratorium (daftar seperti pada Lampiran 1). Berdasarkan perbandingan nilai realisasi dengan nilai target yaitu 70, maka nilai realisasi sebesar 116,21%;
2. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sebesar **84,85** didapatkan dari 14 lembaga inspeksi (daftar seperti pada Lampiran 2). Berdasarkan perbandingan nilai realisasi dengan nilai target yaitu 70, maka nilai realisasi sebesar 121,21%;
3. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 1.004.560.985 dari Rp. 1.008.153.000 atau 99,64%.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Siti Nurul Fahmi

Lampiran 1. Nilai Kualitas Penerapan SMM Laboratorium

No	Unit Kerja	Nilai
1	SKIPM Batam	76,12
2	SKIPM Gorontalo	78,00
3	SKIPM Ternate	93,03
4	SKIPM Palangkaraya	74,48
5	SKIPM Bengkulu	78,13
6	SKIPM Jambi	85,07
7	SKIPM Palembang	91,04
8	BKIPM Jayapura	78,11
9	BKIPM Manado	76,66
10	BKIPM Semarang	84,72
11	BKIPM Banjarmasin	83,08
12	SKIPM Palu	84,57
13	SKIPM Kendari	74,60
	Rata-rata	81,35

Lampiran 2. Nilai Kualitas Penerapan SMM Lembaga Inspeksi

No.	Unit Kerja	Nilai
1	Stasiun KIPM Batam	79,88
2	Stasiun KIPM Gorontalo	80,06
3	Stasiun KIPM Ternate	90,80
4	Stasiun KIPM Palangkaraya	82,18
5	Stasiun KIPM Bengkulu	76,92
6	Stasiun KIPM Jambi	85,06
7	Stasiun KIPM Palembang	82,39
8	Stasiun KIPM Bandung	74,70
9	Balai KIPM Jayapura	89,88
10	Balai KIPM Manado	93,68
11	Balai KIPM Semarang	88,09
12	Stasiun KIPM Palu	85,12
13	Balai KIPM Banjarmasin	89,88
14	Stasiun KIPM Kendari	89,29
Nilai Rata-Rata		84,85

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS

NOMOR : 132/BPPMHKP.1/KI.120/I/2025

Yth. : Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP
Dari : Sekretaris Badan PPMHKP
Sifat : Biasa
Hal : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan IV UPT BPPMHKP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 13 Januari 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat pengguna jasa layanan lingkup UPT BPPMHKP untuk Triwulan IV Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan terdapat satu UPT yaitu BPPMHKP Gorontalo yang melakukan SKM secara manual dengan menyebarkan kuesioner secara luring kepada pengguna jasa dikarenakan terdapat kendala teknis yang tidak dapat dihindari pada tenggat waktu pelaksanaan SKM. Sehingga terdapat perbedaan nilai SKM antara aplikasi susan <https://ptsp.kkp.go.id/> dan hasil perhitungan yang melibatkan seluruh UPT BPPMHKP dengan rincian sebagai berikut:

No	Nilai SKM	Keterangan
1	94,87	Perhitungan 46 UPT melalui aplikasi Susan dan 1 UPT (BKIPM Gorontalo) menggunakan metode luring secara
2	94,89	Nilai BPPMHKP pada https://ptsp.kkp.go.id/

Sehingga untuk nilai SKM yang menjadi capaian BPPMHKP pada TW IV tahun 2024 adalah 94,87 dengan rata-rata per unsur 3.79 (Rekapitulasi terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM

NOMOR : 95/BPPMHKP.1/KI.120/I/2025

Yth. : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Dari : Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Sifat : Biasa
Hal : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan IV UPT BPPMHKP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 9 Januari 2024

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat pengguna jasa layanan. Tim Kerja Pelayanan Publik, Sekretariat BPPMHKP sebagai penanggung jawab pelayanan publik lingkup BPPMHKP, telah melaksanakan SKM lingkup UPT BPPMHKP untuk Triwulan IV Tahun 2024 yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPPP). Berkenaan dengan pelaksanaan survei tersebut, bersama ini kami laporkan hal hal sebagai berikut :

1. Kegiatan ini dilaksanakan pada periode Oktober s.d Desember 2024 dengan ketentuan:
 - a. SKM dilakukan secara online melalui alamat website <http://ptsp.kkp.go.id/skm/login> yang dapat diakses langsung oleh pengguna jasa layanan;
 - b. SKM dilakukan terhadap setiap layanan yang diberikan oleh UPT BPPMHKP selaku unit penyelenggara pelayanan (UPP) secara *real time*;
 - c. Unsur yang dilakukan survei antara lain:
 - 1). Persyaratan,

- 2). Sistem, mekanisme, prosedur,
 - 3). Waktu penyelesaian,
 - 4). Biaya/tarif,
 - 5). Produk layanan,
 - 6). Perilaku pelaksana,
 - 7). Kompetensi pelaksana,
 - 8). Penanganan pengaduan, dan
 - 9). Sarana prasarana;
- d. Hasil pelaksanaan SKM dipublikasikan kepada publik melalui berbagai media yang dimiliki, seperti: sosial media, (Instagram, Facebook dan Twitter), website, leaflet, brosur, banner, dll.
2. Hasil pelaksanaan SKM periode Triwulan IV tahun 2024, sebagai berikut :
- a. Jumlah UPT BPPMHKP yang melaksanakan SKM periode Triwulan IV sebanyak **47 UPT (seluruh UPT)**;
 - b. Nilai rata-rata SKM dari seluruh UPT BPPMHKP periode Triwulan IV tahun 2024 adalah **94,87** dengan mutu pelayanan kategori mutu **“Sangat Baik”**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata SKM Triwulan IV Tahun 2024 sudah di atas target IKU yaitu nilai rata-rata SKM di 47 Satker/UPT BPPMHKP adalah $\geq 88,30$;
 - c. Jumlah UPT BPPMHKP yang mendapat nilai SKM dengan kategori sangat baik adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit kerja atau seluruh UPT BPPMHKP. Matriks hasil survei selengkapnya sebagaimana terlampir;
 - d. Nilai SKM 3 (tiga) UPT tertinggi:
 - i. Balai KIPM Balikpapan: 100,00
 - ii. Balai KIPM Ambon : 100,00
 - iii. Stasiun KIPM Padang : 100,00
 - e. Nilai SKM 3 (tiga) UPT terendah:
 - i. Balai Uji Standar KIPM : 88,82
 - ii. Stasiun KIPM Sorong : 89,07
 - iii. Stasiun KIPM Palu : 89,35

- f. Nilai rata-rata tiap unsur pelayanan untuk seluruh UPT BPPMHKP antara lain:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	Persyaratan	3,83
2	Sistem, Mekanisme & Prosedur	3,81
3	Waktu penyelesaian	3,76
4	Biaya/Tarif	3,80
5	Produk Spesifikasi jenis layanan	3,81
6	Kompetensi pelaksana	3,76
7	Perilaku Pelaksana	3,78
8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,81
9	Sarana dan Prasarana	3,79
Rata-Rata		3,79

3. Analisis hasil survei dan rencana tindak lanjut :

- a. Pada survei kepuasan masyarakat lingkup UPT BPPMHKP Triwulan IV tahun 2024 terdapat 2.457 responden jumlahnya menurun apabila dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2024 yaitu sebanyak 2.980. Nilai SKM pada Triwulan IV tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,34 dibandingkan nilai SKM pada Triwulan III tahun 2024 yaitu 93,53 naik menjadi 94,87;
- b. Selama Triwulan IV terdapat 2 (dua) UPT yang memiliki jumlah responden paling sedikit sebanyak 4 (empat) responden yaitu Balai KIPM Jayapura dan Stasiun KIPM Tahuna;
- c. Nilai unsur terendah yaitu waktu penyelesaian dan kompetensi pelaksana dengan nilai 3,76. Meskipun kompetensi petugas masih dalam kategori sangat baik namun pengguna jasa berharap petugas pelayanan selalu sigap dan responsif dalam melakukan pelayanan, serta mampu menyelesaikan pelayanan tepat waktu;
- d. Terdapat satu UPP yaitu SKIPM Gorontalo yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara manual dengan menyebarkan kuesioner secara luring kepada

- pengguna jasa dikarenakan terdapat kendala teknis yang tidak dapat dihindari pada tenggat waktu pelaksanaan SKM;
- e. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan nilai SKM antara lain:
- i. Melakukan pembinaan kepada UPT BPPMHKP yang:
 - a) Nilai SKM dibawah target > 88,30; dan
 - b) Jumlah respondennya belum memadai.
 - ii. Melakukan perbaikan dan peningkatan pada unsur terendah yaitu kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana;
 - iii. Memastikan secara berkala bahwa setiap UPP melakukan SKM dan melaporkan hasilnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
 - iv. Melakukan internalisasi budaya pelayanan prima kepada seluruh petugas pelayanan BPPMHKP;
 - v. Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait penggunaan tools SUSAN KKP dalam melakukan survei kepuasan masyarakat;
 - vi. Melakukan penyegaran atau bimtek tentang peraturan perundang undangan yang terkait pelayanan pelayanan publik serta prinsip prinsip pelayanan prima.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan Ibu lebih lanjut.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Hari Maryadi

Lampiran
 Nomor : 95/BPPMHKP.1/KI.120/I/2025
 Tanggal : 6 Januari 2025

Tabel Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 Unit Pelayanan BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2024

No.	UPT	Jumlah Responden	Nilai IKM (Rata-rata/ unsur)	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja UPP
1	Balai KIPM Balikpapan	35	4.00	100	A	Sangat Baik
2	Balai KIPM Ambon	8	4.00	100	A	Sangat Baik
3	Stasiun KIPM Padang	6	4.00	100	A	Sangat Baik
s4	Balai KIPM Jayapura	4	4.00	100	A	Sangat Baik
5	Stasiun KIPM Tahuna	4	4.00	100	A	Sangat Baik
6	Stasiun KIPM Ternate	86	3.99	99.74	A	Sangat Baik
7	Stasiun KIPM Pekanbaru	72	3.93	98.34	A	Sangat Baik
8	Stasiun KIPM Mamuju	7	3.92	98.02	A	Sangat Baik
9	Balai KIPM Banjarmasin	32	3.92	98	A	Sangat Baik
10	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	36	3.92	97.99	A	Sangat Baik
11	Balai KIPM Mataram	23	3.91	97.71	A	Sangat Baik
12	Stasiun KIPM Pontianak	60	3.91	97.69	A	Sangat Baik
13	Stasiun KIPM Yogyakarta	13	3.90	97.44	A	Sangat Baik
14	Stasiun KIPM Batam	19	3.89	97.37	A	Sangat Baik
15	Balai KIPM Tanjung Pinang	123	3.85	96.14	A	Sangat Baik
16	Stasiun KIPM Merauke	17	3.84	96.08	A	Sangat Baik
17	Balai KIPM Semarang	73	3.83	95.74	A	Sangat Baik
18	Balai KIPM Surabaya II	102	3.82	95.59	A	Sangat Baik
19	Stasiun KIPM Jambi	22	3.82	95.58	A	Sangat Baik
20	Stasiun KIPM Bandung	25	3.82	95.44	A	Sangat Baik

No.	UPT	Jumlah Responden	Nilai IKM (Rata-rata/ unsur)	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja UPP
21	Stasiun KIPM Cirebon	54	3.81	95.32	A	Sangat Baik
22	Stasiun KIPM Kendari	35	3.81	95.24	A	Sangat Baik
23	Stasiun KIPM Bengkulu	15	3.80	95	A	Sangat Baik
24	Stasiun KIPM Bima	32	3.80	94.97	A	Sangat Baik
25	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	64	3.78	94.62	A	Sangat Baik
26	Balai Besar KIPM Makassar	404	3.77	94.2	A	Sangat Baik
27	Balai KIPM Entikong	32	3.76	94.1	A	Sangat Baik
28	Balai KIPM Tarakan	6	3.76	93.98	A	Sangat Baik
29	Stasiun KIPM Palangkaraya	35	3.76	93.97	A	Sangat Baik
30	Balai KIPM Manado	45	3.74	93.46	A	Sangat Baik
31	Stasiun KIPM Palembang	67	3.73	93.33	A	Sangat Baik
32	Stasiun KIPM Bau-Bau	22	3.73	93.18	A	Sangat Baik
33	Balai KIPM Jakarta II	50	3.71	92.72	A	Sangat Baik
34	Balai KIPM Denpasar	264	3.70	92.5	A	Sangat Baik
35	Balai KIPM Surabaya I	90	3.69	92.16	A	Sangat Baik
36	Stasiun KIPM Aceh	12	3.66	91.44	A	Sangat Baik
37	Balai KIPM Lampung	29	3.65	91.28	A	Sangat Baik
38	Stasiun KIPM Medan II	100	3.63	90.83	A	Sangat Baik
39	Balai Besar KIPM Jakarta I	74	3.63	90.65	A	Sangat Baik
40	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	10	3.61	90.28	A	Sangat Baik
41	Balai KIPM Medan I	36	3.60	90.05	A	Sangat Baik
42	Stasiun KIPM Gorontalo	15	3.59	89.83	A	Sangat Baik
43	Stasiun KIPM Kupang	63	3.59	89.68	A	Sangat Baik
44	Stasiun KIPM Merak	11	3.58	89.39	A	Sangat Baik

No.	UPT	Jumlah Responden	Nilai IKM (Rata-rata/ unsur)	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja UPP
45	Stasiun KIPM Palu	6	3.57	89.35	A	Sangat Baik
46	Stasiun KIPM Sorong	76	3.56	89.07	A	Sangat Baik
47	Balai Uji Standar KIPM	43	3.55	88.82	A	Sangat Baik



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025
BERKUALITAS

panganbiru

08
POVERTY
GROWTH

EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA MAJU

LAPORAN

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan IV Oktober – Desember 2024

BPPMHKP BIMA



KATA PENGANTAR

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima berkomitmen secara terus menerus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebelum menentukan Langkah yang diambil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu diketahui terlebih dahulu urutan berdasarkan urgensi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki untuk menjadi lebih baik. Data Survei Kepuasan Masyarakat yang berasal dari pengguna jasa sebagai responden dapat menjadi penentu arah pelaksanaan peningkatan pelayanan publik Stasiun KIPM Bima.

Stasiun KIPM Bima selaku penyelenggara pelayanan publik perlu melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa unsur pelayanan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kualitas pelayanan yang diterima. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap kinerja aparatur negara dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

Kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan pengukuran kepuasan masyarakat ini, kami sampaikan terima kasih. Kami juga mengharapkan bahwa hasil pengukuran kepuasan masyarakat ini dapat dijadikan sebagai penilaian terhadap kinerja unit pelayanan Stasiun KIPM Bima, serta penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu untuk ditingkatkan dan unsur pelayanan yang perlu dipertahankan. Stasiun KIPM Bima berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan ”**SIAP**” (*Senyum, Ikhlas, Aman, Profesional*) untuk menuju pelayanan prima.

Bima, 02 Januari 2025

Ms.ala,

Jonison Petrus

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Pengertian Umum	2
1.4. Maksud dan Tujuan.....	3
1.5. Manfaat	3
1.6. Hasil yang Diharapkan.....	3

BAB II. METODOLOGI PENGUKURAN

2.1. Ruang Lingkup.....	4
2.2. Tahapan Kegiatan Survey	4
2.2.1. Persiapan	4
2.2.2. Pengumpulan Data.....	5
2.2.3. Pengolahan dan Analisa Data	6
2.2.4. Penyusunan Laporan	7

BAB III. HASIL SURVEI

3.1. Hasil Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan.....	8
3.2. Reviu Hasil Survei dengan Hasil Pada Periode Sebelumnya.....	10
3.3. Unsur-unsur yang Perlu Dilakukan Tindakan Perbaikan.....	11

BAB IV. TINDAKAN PERBAIKAN

4.1. Uraian Tindakan Perbaikan yang Perlu Dilakukan	12
4.2. Jadwal Waktu Tindakan Perbaikan.....	12

BAB V. KESIMPULAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stasiun KIPM Bima sebagai salah satu instansi pemerintah di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang memiliki beberapa tugas pokok yang salah satunya adalah melaksanakan pelayanan publik berkaitan dengan jasa pelayanan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan seluruh instansi pemerintah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Stasiun KIPM Bima selaku penyedia layanan publik bertanggung jawab dan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta berkewajiban melakukan penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagai salah satu tolak ukur kualitas pelayanan. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan elemen penting dalam evaluasi kinerja unit pelayanan terhadap pelaksanaan program inovasi pelayanan publik Stasiun KIPM Bima, sebagai alat kendali untuk mengetahui aspirasi yang berkembang di masyarakat, demi memenuhi harapan pengguna jasa lingkup Stasiun KIPM Bima.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/63/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

1.3. Pengertian Umum

Sesuai Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat beberapa pengertian yang perlu dijelaskan yaitu :

- a. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
- b. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
- c. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- e. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survei terhadap kinerja Unit Pelayanan Publik Stasiun KIPM Bima dimaksudkan untuk mengetahui gambaran / pendapat masyarakat (pengguna jasa) tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh Unit Pelayanan Publik Stasiun KIPM Bima.

Adapun tujuan dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengetahui tingkat kinerja dan mutu unit pelayanan Stasiun KIPM Bima, serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat / pengguna jasa terhadap kinerja unit pelayanan Stasiun KIPM Bima.

1.5. Manfaat

Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting karena hasilnya dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Mendapatkan data tentang kelemahan dan kekuatan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Mengetahui tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
3. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan melalui pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan kebijakan yang akan diambil untuk melakukan perbaikan.
4. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Unit Pelayanan Teknis Stasiun KIPM Bima.
5. Mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada Unit Pelayanan Teknis Stasiun KIPM Bima.

1.6. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang ingin dicapai pada Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah tersedianya data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis Stasiun KIPM Bima melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta saran-saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat ke depannya.

II. METODOLOGI PENGUKURAN

2.1. Ruang Lingkup

Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Bima terkait dengan unsur-unsur kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan di Kantor Stasiun KIPM Bima. Survei Kepuasan Masyarakat ini melibatkan pengguna jasa layanan pada Stasiun KIPM Bima selama Triwulan IV (bulan Oktober s.d. Desember 2024) sebagai responden.

2.2. Tahapan Kegiatan Survei

Metode pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Publik Stasiun KIPM Bima adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Survei

2.2.1. Persiapan

a) Penyiapan Bahan

1. Kuisisioner

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan kuisisioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan.

2. Bagian dari Kuisisioner

Kuisisioner dibagai atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

Bagian I : Identitas responden berisi data responden dan tanggal pelaksanaan survei

Bagian II : Penilaian penerima pelayanan yang memuat pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

Bagian III : Mutu pelayanan publik yang memuat saran perbaikan dari responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah.

3. Bentuk Jawaban

Jawaban yang diberikan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan berupa nilai dari masing-masing unsur yang terdapat pada kuisioner.

Adapun penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan sebagai berikut:

1. Nilai 1, apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, tahapan untuk memperoleh layanan terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.
2. Nilai 2, apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih kurang mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Nilai 3, apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Nilai 4, apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

b) Kriteria Responden

Kriteria untuk responden Indeks Kepuasan Masyarakat adalah para pengguna layanan yang telah menerima pelayanan dari Stasiun KIPM Bima.

c) Metode Survei

Metode survei kepuasan masyarakat dilakukan secara online dengan alamat website <http://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/38> dengan tampilan berupa kuisioner yang pilihan nilai kesesuaiannya dapat diisi secara langsung oleh pengguna jasa. Pengisian dapat melalui handphone maupun PC / laptop.

2.2.2. Pengumpulan Data

Responden dipersilahkan mengisi kuisioner pada link yang diberikan oleh petugas pelayanan setelah pengguna layanan selesai menerima layanan. Pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat periode triwulan IV dilaksanakan pada bulan Oktober s.d. Desember 2024. Hasil data yang telah diinput oleh pengguna jasa diunduh melalui website <https://ptsp.kkp.go.id/skm> untuk diolah setelah periode berakhir.

2.2.3. Pengolahan dan Analisa Data

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan:

- ✓ Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket / tahapan layanan terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.
- ✓ Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- ✓ Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- ✓ Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Data mentah yang sudah terkumpul selama survei diperiksa lebih lanjut untuk memastikan data lengkap sehingga proses analisa data dapat dilakukan. Data dianalisa secara deskriptif analitik. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus berikut :

Bobot Nilai Rata-Rata = Total Perolehan Nilai : Total Unsur Penilaian

Untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM = (Total Nilai per Unsur : Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang

Analisa data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi dan analisa yang diperoleh di lapangan dengan tujuan agar

data yang disajikan mempunyai makna atau arti sehingga dapat mengetahui hasil penelitian yang dilakukan. Dalam kegiatan survei ini, untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survei Kepuasan Masyarakat yaitu antara

25 – 100, maka hasil penilaian yang tersebut dalam pengolahan data dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

2.2.4. Penyusunan Laporan

Nilai survei yang tertera pada website SKM merupakan hasil penilaian pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan Stasiun KIPM Bima. Hasil tersebut disusun dalam bentuk laporan sebagai dokumen penting yang menyajikan informasi tentang perkembangan Unit Pelayanan Teknis Stasiun KIPM Bima. Pengolahan dan analisa data akan menjadi bahan dasar pengusulan peningkatan atau keperluan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

III. HASIL SURVEI

Hasil rekapitulasi kuisisioner yang telah diisi oleh responden pada periode triwulan IV tahun 2024 didapatkan sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) responden. Jumlah responden berdasarkan beberapa kategori disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Responden Berdasarkan Usia, Pendidikan dan Jenis Kelamin

Responden		Jumlah
Berdasarkan Usia	25 – 45 tahun	15
	46 – 60 tahun	17
	>60 tahun	0
Berdasarkan Pendidikan	SD	0
	SMP	0
	SMA	11
	D3	1
	S1	18
	S2	1
Berdasarkan Jenis kelamin	Laki-laki	13
	Perempuan	19

3.1. Hasil Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan

Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pengguna layanan sebagai responden melalui sarana elektronik dengan pertanyaan yang meliputi 9 unsur, yaitu :

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Fasilitas pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan (sertifikat)
6. Biaya/Tarif
7. Kompetensi pelaksana.
8. Perilaku pelaksana
9. Penanganan Pengaduan dan tindak lanjut pengaduan

Tabel 2 Nilai Rata-rata (NRR) Triwulan IV Tahun 2024 Stasiun KIPM Bima

No. Unsur	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Apakah anda/badan hukum/organisasi dapat memahami persyaratan pelayanan yang tersedia diunit kerja kami	3,81
U2	Apakah sistem, mekanisme, prosedur pelayanan yang tersedia mudah dipahami	3,81
U3	Apakah waktu pelayanan sesuai dengan janji Layanan	3,72
U4	Bagaimana kejelasan informasi tentang biaya/tarif jasa layanan	3,72
U5	Apakah produk pelayanan yang diberikan dan diterima telah sesuai dengan ketentuan	3,87
U6	Bagaimana kompetensi personil dalam memberikan pelayanan	3,78
U7	Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan	3,81
U8	Apakah penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan atau keluhan pelanggan telah dilaksanakan dengan baik	3,84
U9	Bagaimana fasilitas pelayanan yang tersedia	3,81
IKM Unit Pelayanan		94,97

Berdasarkan data hasil pengukuran di atas, dapat diketahui bahwa nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima adalah **94,97**. Sesuai dengan kategorisasi mutu pelayanan di lingkup Stasiun KIPM Bima Periode Triwulan IV Tahun 2024 masuk dalam kategori interval 88,31 – 100,00 dapat dikatakan mutu pelayanan di lingkup Stasiun KIPM Bima masuk dalam kategori **“Sangat Baik”**.

Proses menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, maka seluruh unsur pelayanan di atas harus tetap dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan kembali khususnya unsur-unsur yang memiliki nilai rendah. Hasil Survei Periode Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Secara umum kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima termasuk kategori **Sangat Baik** dengan perolehan nilai sebesar **94,97**.
- b. Unsur pelayanan dengan nilai rata-rata tertinggi adalah kepuasan masyarakat terhadap Unsur : Apakah produk pelayanan yang diberikan dan diterima telah sesuai dengan ketentuan yakni 3,87.

- c. Unsur pelayanan yang memiliki nilai paling rendah dari keseluruhan unsur layanan yang ditetapkan adalah unsur yang menanyakan “Apakah waktu pelayanan sesuai dengan janji Layanan”, dan selanjutnya unsur yang menanyakan “Bagaimana kejelasan informasi tentang biaya/tarif jasa layanan” kedua unsur tersebut memiliki nilai yang sama yakni sebesar 3,72.
- d. Semua unsur pada Triwulan IV mengalami kenaikan dari periode sebelumnya (Triwulan III tahun 2024). SKIPM Bima berupaya meningkatkan pelayanan publik sehingga pada Triwulan berikutnya diharapkan tidak terjadi penurunan serta adanya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Keseluruhan unsur layanan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**, namun tetap membutuhkan perhatian untuk terus ditingkatkan mengikuti kemajuan zaman, dengan menetapkan unsur yang memiliki nilai terendah sebagai prioritas utama.

3.2. Review Hasil Survei dengan Hasil pada Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil Survei, Nilai Rata-rata pada periode Triwulan III tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. Nilai Rata-rata (NRR) Triwulan I Tahun 2024 Stasiun KIPM Bima

No. Unsur	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Apakah anda/badan hukum/organisasi dapat memahami persyaratan pelayanan yang tersedia diunit kerja kami	3,66
U2	Apakah sistem, mekanisme, prosedur pelayanan yang tersedia mudah dipahami	3,55
U3	Apakah waktu pelayanan sesuai dengan janji Layanan	3,65
U4	Bagaimana kejelasan informasi tentang biaya/tarif jasa layanan	3,57
U5	Apakah produk pelayanan yang diberikan dan diterima telah sesuai dengan ketentuan	3,72
U6	Bagaimana kompetensi personil dalam memberikan pelayanan	3,50
U7	Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan	3,39
U8	Apakah penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan atau keluhan pelanggan telah dilaksanakan dengan baik	3,55
U9	Bagaimana fasilitas pelayanan yang tersedia	3,72
IKM Unit Pelayanan		94,93

Hasil Survei periode sebelumnya (Periode triwulan III Tahun 2024) adalah :

Secara umum kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima termasuk kategori **Sangat Baik** sebesar 93,94.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Bima periode Triwulan III tahun 2024 sebesar 93,94 dengan kriteria **Sangat Baik**, kemudian pada Periode Triwulan IV tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 0,04 dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 94,97 dengan kriteria **Sangat Baik**.

3.3. Unsur-unsur yang Perlu Dilakukan Tindakan Perbaikan

1. Pada Unsur “Apakah waktu pelayanan sesuai dengan janji Layanan”, yakni sebesar 3,72 Walaupun mengalami kenaikan dari TW. III, tetapi unsur tersebut adalah nilai yang paling rendah sehingga perlu dilakukan perbaikan.
2. Selanjutnya Unsur “Bagaimana kejelasan informasi tentang biaya/tarif jasa layanan”, yakni sebesar 3,72. Walaupun mengalami kenaikan dari TW. III, tetapi unsur tersebut adalah nilai yang paling rendah sehingga perlu dilakukan perbaikan.

IV. TINDAKAN PERBAIKAN

4.1. Uraian Tindakan Perbaikan yang perlu dilakukan

1. Pada Unsur “Apakah waktu pelayanan sesuai dengan janji Layanan”, yakni sebesar 3,72 Walaupun mengalami kenaikan dari TW. III, tetapi unsur tersebut adalah nilai yang paling rendah sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Tindakan perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

Melakukan Inhouse training terhadap petugas pelayanan bagaimana cara memberikan pelayanan PRIMA kepada pengguna jasa.

2. Selanjutnya Unsur “Bagaimana kejelasan informasi tentang biaya/tarif jasa layanan”, yakni sebesar 3,72. Walaupun mengalami kenaikan dari TW. III, tetapi unsur tersebut adalah nilai yang paling rendah sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Tindakan perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

Menjelaskan pemberlakuan tarif kepada petugas pelayanan tentang pelayanan yang terdapat pada SKIPM Bima

4.2. Jadwal Waktu Tindakan Perbaikan

Rencana tindak lanjut perbaikan SKM adalah sebagai berikut :

No	Unsur Perbaikan	Tindak Lanjut Perbaikan	Waktu	Penanggung jawab
1	unsur “Apakah waktu pelayanan sesuai dengan janji Layanan”	Melakukan Inhouse training terhadap petugas pelayanan bagaimana cara memberikan pelayanan PRIMA kepada pengguna jasa	1 hari	Penanggung Jawab SKM dan Pelayanan Publik
2	Unsur “Bagaimana kejelasan informasi tentang biaya/tarif jasa layanan”	Menjelaskan pemberlakuan tarif kepada petugas pelayanan tentang pelayanan yang terdapat pada SKIPM Bima	1 hari	Penanggung Jawab SKM dan Pelayanan Publik

V. KESIMPULAN

1. Secara umum pelayanan publik pada Periode Triwulan IV tahun 2024 di Stasiun KIPM Bima berdasarkan nilai dari 9 unsur pelayanan memperoleh nilai sebesar **94,97** termasuk dalam kategori dengan kinerja unit pelayanan “**Sangat Baik**”.
2. Untuk meningkatkan pelayanan di lingkup Stasiun KIPM Bima maka perlu dilakukan kajian lanjutan dan tindakan perbaikan secara terus menerus terutama terkait dengan peningkatan kompetensi, konsistensi dan komitmen pegawai/petugas pelayanan terhadap penyelenggaraan Pelayanan “**SIAP**” untuk meningkatkan mutu layanan publik Stasiun KIPM Bima demi tercapainya kepuasan pelanggan.

**REALISASI CAPAIAN IKK NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT BERBASIS ELEKTRONIK TERHADAP LAYANAN BKIPM
UPT KIPM : STASIUN KIPM BIMA
TAHUN 2024**

Bulan : Oktober s.d Desember 2024 (Periode 4)

No	UPT	Tahun	Periode	Jumlah Responden	Jumlah Responden yang Mengisi	Nilai	Indeks	Kinerja
1	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima	2024	4	32	32	94,97	4.75	Sangat Baik (A)

Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Bima



Jonison Petrus

Bima, 1 Januari 2025
Penanggung Jawab IKK,



Dita Antonisa Wielna

**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) PKP2I SKIPM BIMA
TRIWULAN 3 TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara Profesional dan Partisipatif

Nama IKU : IKS.02.4 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) di UPT Stasiun KIPM Bima

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2024	Target Th.2025
	TW1	TW2	SM.1	TW3	TW4	SM.2	Tahunan		
Target	-	-	-	1	-	-	-		
Realisasi	-	-	-	1	-	-	-		
%Capaian	-	-	-	100%	-	-	-		

Catatan Pengukuran di ukur dengan menghitung jumlah unit upi hasil Surveilans penerapan HACCP:

TW1,2,3,4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian TW1 + Capaian TW2

Sm2 = Capaian TW3 + Capaian TW4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Untuk pencapaian UPI/UPRL yang konsisten menerapkan SJMKHP dengan menghitung UPI yang telah di Surveilans, pada TW 3 ada 13 UPI/UPRL yang di surveilans, pada TW 3 capaian 100%.
- Pada Tahun 2024 ada 3 UPI/UPRL yang harus dilakukan Surveilans, Satu UPRL belum ada proses produksi sehingga belum bisa dilakukan surveilans.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Dua UPI/UPRL yang dilakukan surveilans sesuai dengan ruang lingkupnya.
- Satu UPI belum melakukan proses produksi dikarenakan ketersediaan bahan baku dan kondisi perusahaan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Sosialisasi dan pendampingan kepada setiap UPI/UPRL terkait Program Surveilans dan pemeliharaan sistem Tahunan

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
K3 terkait pelaksanaan program Surveilans HACCP tahun 2024, pembentukan noreg Inspektur Mutu baru dalam Rangka Penguatan SDM	1. PKP2I	1. TW 3 th 2024

Bima, 14 Oktober 2024

Kepala



Jonison Petrus, S.St.Pi

**IKS. UPI YANG KONSISTEN MENERAPKAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
LINGKUP STASIUN KIPM BIMA TW 3 TAHUN 2024**

Bulan : Juli – September 2024 (Triwulan 3)

NO	Bulan	Nama UPI/UPRL	Ruang Lingkup	Tanggal Surveilans	Realisasi TW 1 (%)
1	Juli	-	-	-	-
2	Agustus	PT. Berkah Nisa Sura	Dried Seaweed	27 Agustus	100 %
3	September	-	-	-	-

Mengetahui :

Kepala Stasiun KIPM Bima



Bima, 14 Oktober 2024

Ketua Tim Kerja Pengendalian


Fitra Adityawarman, S.St.Pi

IKS. PERSENTASE HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PRIMER
YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP UPT SKIPM BIMA
TW IV TAHUN 2024

NO	BULAN	NAMA UPI	RUANG LINGKUP	TANGGAL INSPEKSI/SURVEILAN	REALISASI TW IV (%)
1	Oktober	-	-	-	
2	November	-	-	-	
3	Desember	-	-	-	

Mengetahui
Kepala SKIPM Bima



Jonison Petrus

Bima, 13 Januari 2024
Penanggungjawab

Dita Antonisa Wielna

**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) PKP2I SKIPM BIMA
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nama IKU : IKK.01 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2024	Target Th.2024
	TW1	TW2	SM.1	TW3	TW4	SM.2	Tahunan		
Target	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisasi	0	0	0	0	0	0	0		
%Capaian	0%	0	0	0	0	0	0		

Catatan Pengukuran di ukur dengan menghitung jumlah unit upi hasil Surveilans penerapan HACCP:

TW1,2,3,4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian TW1 + Capaian TW2

Sm2 = Capaian TW3 + Capaian TW4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
	1. PKP2I	1. Triwulan 4 tahun 2024

Bima, 13 Januari 2025

Kepala Stasiun KIPM Bima



Jonison Petrus, S.St.Pi

**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) PKP2I SKIPM BIMA
TRIWULAN III TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara Profesional dan Partisipatif

Nama IKU : IKS.02.2 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Stasiun KIPM Bima (Produk)

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2024	Target Th.2025
	TW1	TW2	SM.1	TW3	TW4	SM.2	Tahunan		
Target	0	-	-	1	-	-	-	-	
Realisasi	0	-	-	1	-	-	-	-	
%Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	

Catatan Pengukuran di ukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup hasil inpeksi, monev dan pemeliharaan sistem yang diterbitkan:

- TW1,2,3,4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
- Sm 1 = Capaian TW1 + Capaian TW2
- Sm2 = Capaian TW3 + Capaian TW4
- Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- a. Untuk pencapaian Sertifikasi ruang lingkup HACCP Hasil Perikanan TW 3, target 1 UPRL / realisasi 1 UPRL
- b. Pada tahun 2024 TW 3 sudah dilakukan Inspeksi perpajakan UPRL (PT. Berkat Nisa Sura Bima) di Bulan Juli 2024,
- c. Pada tahun 2024 TW 3 belum dilakukan Monev HACCP CV. Labuan Bajo Fishery

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Monev HACCP UPRL baru akan dilakukan pada bulan Oktober Tahun 2024 (TW 4)

Tindakan yang telah dilaksanakan

Sosialisasi dan pendampingan kepada setiap UPI terkait Program Inspeksi dan pemeliharaan sistem Tahunan (Monev)

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
K3 terkait pelaksanaan program Sertifikasi HACCP tahun 2024, Pembentukan noreg Inspektur Mutu baru dalam rangka penguatan SDM	1. Ketua Tim Pengendalian Kesehatan Ikan	1. TW 3 tahun 2024

Bima, 14 Oktober 2024

Kepala



Jonison Petrus, S.St.Pi

**IKS.02.2 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Stasiun KIPM
Bima (Produk) TW 3 Tahun 2024**

Bulan : Juli – September 2024 (Triwulan 3)

NO	Ruang Lingkup	Nama UPI/UPRL	Target Ruang Lingkup	Realisasi Ruang Lingkup	Realisasi TW 3 (%)
1	Rumput Laut Kering	PT. Berkat Nisa Sura Bima	1	1	100 %

Mengetahui :

Kepala Stasiun KIPM Bima



Jonison Petrus, S.St.Pi

Bima, 14 Oktober 2024

Ketua Tim Kerja Pengendalian

Fitra Adityawarman, S.St.Pi

IKS. RASIO EKSPOR IKAN DAN HASIL PERIKANAN YANG DITERIMA OLEH NEGARA TUJUAN EKSPOR LINGKUP UPT SKIPM BIMA
TW IV TAHUN 2024

NO	BULAN	NAMA UPI	RUANG LINGKUP	JUMLAH HC TERBIT (EKSPOR)	REALISASI TW IV (%)
1	Oktober	PT. Berkat Nisa Sura Bima	Dried Seaweed	5 eksemplar	100 %
2	November	PT. Berkat Nisa Sura Bima	Dried Seaweed	4 eksemplar	100 %
3	Desember	PT. Berkat Nisa Sura Bima	Dried Seaweed	4 eksemplar	100 %



Bima, 13 Januari 2024
Penanggungjawab



Fitra Adityawarman

**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) PKP2I SKIPM BIMA
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nama IKU : IKK.04 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2024	Target Th.2024
	TW1	TW2	SM.1	TW3	TW4	SM.2	Tahunan		
Target	0	0	0	0	13	13	13	13	0
Realisasi	0	0	0	0	13	13	13	13	
%Capaian	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	

Catatan Pengukuran di ukur dengan menghitung jumlah unit upi hasil Surveilans penerapan HACCP:

TW1,2,3,4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian TW1 + Capaian TW2

Sm2 = Capaian TW3 + Capaian TW4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- a. Untuk pencapaian Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup SKIPM Bima, terdapat 13 Health Certificate (HC) yang sudah diterbitkan pada TW 4 dengan capaian 100%.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
K3 terkait pencapaian rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup SKIPM Bima,	1. PKP2I	1. Triwulan 4 tahun 2024

Bima, 13 Januari 2025

Kepala Stasiun KIPM Bima



Jonison Petrus, S.St.Pi

**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) PELAKSANAAN KOORDINASI P2I
SKIPM BIMA
TRIWULAN II TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara Profesional dan Partisipatif									
Nama IKU : IKS.1 Jumlah sertifikat CPIB Suplier yang diterbitkan (sertifikat)									
T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2024	Target Th.2024
	TW1	TW2	SM.I	TW3	TW4	SM.2	Tahunan		
Target	5	0	5	0	0	5	5	5	5
Realisasi	6	2	8	0	0	8	8	8	5
%Capaian	100%	20%	120%	-	-	-	-	120%	
Catatan Pengukuran di ukur dengan menghitung jumlah unit Suplier hasil inpeksi : TW 1,2,3,4 = Capaian selama TrW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4 SM I = Capaian TW 1 + Capaian TW 2 SM 2 = Capaian TW 3 + Capaian TW4 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024									

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)		
a. Untuk pencapaian Sertifikasi CPIB Hasil Perikanan sudah sesuai target triwulan akan tetapi pelaksanaan sering terkendala kendala, kurangnya pemahaman penyusunan panduan CPIB b. Sampai dengan akhir TW II tahun 2024 Realisasi 120 %		
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)		
Realisasi mencapai 120% karena Suplier belum memahami Cara Menyusun panduan CPIB sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan sertifikasi CPIB, secara administrasi belum memenuhi persyaratan.		
Tindakan yang telah dilaksanakan		
Sosialisasi kepada setiap kepada Suplier tentang pentingnya CPIB		
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Sosialisasi CPIB serta penyusunan panduan CPIB pada suplier	1. PKP2I/ Inspektur Mutu	1. Triwulan II Tahun 2024

Bima, 8 Juli 2024
Kepala


Jonison Petrus, S.St.Pi

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Bima

Nama Unit Kerja : Stasiun KIPM Bima
Periode Laporan : Triwulan IV
Tahun : 2024

Uraian IK/IKU	TARGET 2024			REALISASI		
	Tahunan	Semester I	Triwulan III	Semester I	Triwulan III	Tahunan
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Bima	86	81	86	89	86.86	87.83

Uraian Capaian Indikator : Realisasi telah mencapai Target pada Triwulan IV

Mengetahui.
Kepala Stasiun KIPM Bima

Jonison Petrus

Bima, 1 Januari 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja,
Kepala Urusan Umum

Heri Purwanto

SS IP ASN

IP ASN 2024 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023

STASIUN KIPM BIMA

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STASIUN KIPM BIMA	6	20.83	83.32 %	37.5	93.75 %	25	83.33 %	4.5	90 %	87.83	TINGGI

◀ ▶

IP ASN 2024 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023

Silakan ketik NIP atau Nama Pega

#	Nama	Kualifikasi				Kompetensi				Kinerja			Disiplin			TOTAL	Keterangan	
		Tingkat Pendidikan	IP	Prosentase	Diklatplm	Dibot Fungsional	Diklat 20 JP	Seminar	IP	Prosentase	Predikat Kinerja	IP	Prosentase	Hukuman Disiplin	IP			Prosentase
1	JONSON PETRUS	S-1	21	84 %	15	-	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
2	KUKUH ANDIAS PURBIANTO	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	5	2	40 %	87	TINGGI
3	FITRA ADITYAWAHRMAN	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
4	DITA ANTONISA WELNA	D-III	21	84 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
5	HURWAHYURE WIDIASTUTI	S-1	22	88 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	92	SANGAT TINGGI
6	HERI PURWANTO	S-1	21	84 %	0	-	15	10	25	62.5 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	76	SEDANG

◀ ▶



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

2 Januari 2025

Nomor : B.12/BPPMHKP.1/RC.610/I/2025
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2024 UPT Lingkup BPPMHKP

Yth.

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP;
2. Plt Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer, BPPMHKP;
3. Plt. Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen, BPPMHKP;
4. Kepala UPT lingkup BPPMHKP.

di
tempat

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta memperhatikan Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN RB Nomor B/65/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Poin 10 yang menyebutkan untuk mendorong peningkatan evaluasi AKIP internal unit organisasi Level II serta Surat Sekretaris BPPMHKP B.3977/BPPMHKP.1/RC.610/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP TA 2024 UPT Lingkup BPPMHKP, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP (yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/PedomanEvaluasiAKIP2024>) di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.
2. Target kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Tahun 2024 sebesar **Nilai 82, Sebanyak 40 UPT (80,40%) telah memenuhi target kinerja dan sisanya 10 UPT (19,60%) belum memenuhi target kinerja karena rendahnya capaian pada komponen Pelaporan Kinerja dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP per Satker (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP adalah sebagai berikut :

No.	Unit kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	Predikat
1	Sekretariat BPPMHKP	24.00	24.00	13.80	22.50	84.30	A
2	Pusat Manajemen Mutu	24.90	24.90	13.50	20.00	83.30	A
3	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	27.30	24.00	11.25	20.50	83.05	A
4	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen	27.30	24.00	11.25	20.50	83.05	A
5	BBKIPM Jakarta I	22.80	24.00	13.50	22.50	82.80	A
6	BBKIPM Makassar	25.50	25.50	12.30	20.50	83.80	A
7	BKIPM Denpasar	24.00	23.10	13.50	22.50	83.10	A
8	BKIPM Surabaya I	24.00	22.20	13.50	22.50	82.20	A
9	BKIPM Medan I	22.20	24.00	13.50	22.50	82.20	A
10	BKIPM Balikpapan	24.00	24.00	12.75	21.25	82.00	A
11	BKIPM Jayapura	22.50	23.70	12.00	16.00	74.20	BB
12	BKIPM Jakarta II	23.70	23.70	13.50	21.25	82.15	A
13	BKIPM Surabaya II	24.00	25.50	11.10	22.50	83.10	A
14	BKIPM Mataram	24.00	27.00	12.60	20.00	83.60	A
15	BKIPM Manado	24.90	24.00	12.00	22.50	83.40	A
16	BKIPM Semarang	27.00	24.00	12.00	21.25	84.25	A
17	BKIPM Banjarmasin	23.10	24.30	13.50	22.50	83.40	A
18	BKIPM Lampung	22.20	27.00	13.50	20.00	82.70	A
19	BKIPM Ambon	27.00	24.00	12.75	20.00	83.75	A
20	BKIPM Entikong	22.20	24.60	13.50	22.50	82.80	A
21	BKIPM Tanjung Pinang	22.20	24.00	10.35	21.00	77.55	BB
22	BKIPM Tarakan	24.00	24.00	12.00	22.50	82.50	A
23	BUSKI PM	24.00	27.00	13.50	20.00	84.50	A
24	SKIPM Palembang	24.00	25.20	11.10	22.50	82.80	A
25	SKIPM Bandung	26.10	25.20	12.60	19.75	83.65	A
26	SKIPM Merauke	23.70	23.70	11.10	18.75	77.25	BB
27	SKIPM Pontianak	22.20	25.50	13.50	22.50	83.70	A
28	SKIPM Kendari	24.00	23.70	13.05	20.25	81.00	A
29	SKIPM Batam	25.50	25.50	10.35	21.00	82.35	A
30	SKIPM Padang	19.80	27.00	13.50	22.50	82.80	A
31	SKIPM Jambi	24.00	25.50	12.60	21.25	83.35	A
32	SKIPM Palu	24.00	24.00	12.60	22.50	83.10	A
33	SKIPM Palangkaraya	24.00	24.00	12.30	22.50	82.80	A
34	SKIPM Kupang	24.00	25.50	11.40	22.50	83.40	A
35	SKIPM Pangkal Pinang	24.00	25.50	11.40	21.25	82.15	A
36	SKIPM Ternate	22.20	27.00	12.60	22.50	84.30	A
37	SKIPM Yogyakarta	26.10	24.60	11.85	20.50	83.05	A
38	SKIPM Aceh	24.00	27.00	12.00	22.50	85.50	A
39	SKIPM Gorontalo	24.60	24.00	12.75	21.25	82.60	A
40	SKIPM Pekanbaru	22.80	27.00	12.60	22.50	84.90	A
41	SKIPM Medan II	25.20	24.00	12.60	22.50	84.30	A

No.	Unit kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	Predikat
42	SKIPM Sorong	24.00	24.00	12.90	22.50	83.40	A
43	SKIPM Bengkulu	24.00	27.00	12.00	22.50	85.50	A
44	SKIPM Cirebon	24.00	27.00	12.00	22.50	85.50	A
45	SKIPM Luwuk Banggai	24.00	25.20	11.10	22.50	82.80	A
46	SKIPM Tanjung Balai Asahan	20.70	19.80	9.75	12.50	62.75	B
47	SKIPM Bima	22.20	24.00	12.60	22.50	81.30	A
48	SKIPM Tahuna	16.50	22.20	12.00	18.75	69.45	B
49	SKIPM Bau-Bau	24.00	24.30	12.15	21.00	81.45	A
50	SKIPM Merak	24.00	24.00	11.10	22.50	81.60	A
51	SKIPM Mamuju	27.00	24.00	11.10	18.50	80.60	A

- Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP untuk Satker lingkup yang telah mencapai target (**≥82 Nilai**) yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
- Selanjutnya setiap satuan kerja (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP, khususnya untuk 10 Satker dengan dibawah target (**≤82 Nilai**) diminta untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dan saran pada Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP dalam hal pengelolaan dan pelaporan kinerja agar dapat mencapai target indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP periode Tahun 2025;
- Rincian detail Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP UPT lingkup BPPMKHP Tahun 2024 dapat dilihat pada aplikasi Kinerja masing-masing satker.

Demikian disampaikan. atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

Tembusan :

- Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 182/SJ.2/TU.210/I/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
7. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Hal : Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA. 2024

Tanggal : 15 Januari 2025

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menyusuli Nota Dinas kami Nomor 4603/SJ.2/TU.210/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Perpanjangan Waktu Pengisian Manual dan Realisasi Indikator Kinerja Perencanaan Program dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2024 bahwa Pengisian manual IKSS dan IKP tersebut dilakukan melalui Aplikasi SAKTI modul penganggaran yang sebelumnya dilakukan sampai dengan 20 Desember 2024 menjadi 15 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA 2024 sebagai berikut:

1. Capaian nilai Indikator Kinerja NKPA KKP (level 0) Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan Aplikasi Monev Kemenkeu tanggal 15 Januari 2025 sebesar **87,18** dari target 82,00, untuk capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Unit Eselon I (level I) sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,00, sedangkan untuk capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Satuan Kerja (level II) sebagian besar Satker telah mencapai target, tetapi terdapat beberapa Satker yang belum mencapai target sebesar 71,00.

2. Capaian nilai Indikator Kinerja NKPA per level tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai Indikator Kinerja NKPA pada Triwulan IV tahun 2024 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Setyawati

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal

Partisipasi Eselon I

Monitoring / Partisipasi Eselon I

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No.	Kode Eselon I	Nama Eselon I	Jumlah Satker	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	01	Sekretariat Jenderal	37	3	3	3	37	37	37	37	37	37	37	37	37
2	02	Inspektorat Jenderal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	03	Dirjen Perikanan Tangkap	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	55
4	04	Dirjen Perikanan Budidaya	50	16	16	16	16	49	49	49	50	50	50	50	49
5	05	Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	64	30	30	30	30	64	64	64	64	64	64	64	64
6	06	Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	40	2	2	2	2	40	40	40	40	40	40	40	40
7	07	Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	43	9	9	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
8	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40
9	13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

NK Perencanaan KL

Monitoring / NK Perencanaan KL

[Download Excel](#)Tampilkan entriCari:

No. ↑↓	Kode K/L ↑↓	K/L ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas			Efisiensi	
				IKSS ↑↓	IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	87.18	88.86	94.99	97.04	90.17	52.25

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [Selanjutnya](#)

[Download Excel](#)

Tampilkan entri

Cari:

No. ↑	Kode UEI ↔	UEI ↔	NK Perencanaan Anggaran ↔	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↔	CRO ↔	Penggunaan SBK ↔	Efisiensi SBK ↔
1	01	Sekretariat Jenderal	88.72	100.00	99.50	60.00	52.95
2	02	Inspektorat Jenderal	90.61	100.00	100.00	100.00	37.40
3	03	Ditjen Perikanan Tangkap	84.12	99.33	91.51	88.40	28.65
4	04	Ditjen Perikanan Budidaya	86.99	88.26	98.73	95.24	43.70
5	05	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	94.01	100.00	98.31	96.00	67.80
6	06	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	82.38	98.05	99.17	33.33	33.35
7	07	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	97.90	100.00	98.22	98.31	92.45
8	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	95.28	100.00	94.51	92.65	89.90
9	13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	82.83	73.08	99.47	81.08	53.55

NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

[Download Excel](#)

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑	Kode UEI ↔	UEI ↔	NK Perencanaan Anggaran ↔	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↔	CRO ↔	Penggunaan SBK ↔	Efisiensi SBK ↔
1	01	Sekretariat Jenderal	88.72	100.00	99.50	60.00	52.95

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya



No. ↕	Kode Satuan Kerja ↕	Satuan Kerja ↕	NK Perencanaan Anggaran ↕	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO ↕	Penggunaan SBK ↕	Efisiensi SBK ↕	
37	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	97,29	96,39	100,00	100,00	
35	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	86,18	100,00	50,00	41,20	
36	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	75,00	100,00	0,00	0,00	
38	690925	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	75,00	100,00	0,00	0,00	
39	690926	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
40	690927	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00	
41	690928	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	75,00	100,00	0,00	0,00	
42	690929	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	75,00	100,00	0,00	0,00	
43	690930	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	75,00	100,00	0,00	0,00	
44	690931	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00	
45	690932	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
46	690933	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	75,00	100,00	0,00	0,00	
47	690934	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	75,00	100,00	0,00	0,00	
48	690935	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00	
49	690936	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	75,00	100,00	0,00	0,00	
50	690937	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
51	690938	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00	
52	690939	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00	

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
60	000947	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
61	000948	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	75,00	100,00	0,00	0,00	
62	000949	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	75,00	100,00	0,00	0,00	
63	000950	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKALU	75,00	100,00	0,00	0,00	
64	000951	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00	
65	000952	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	75,00	100,00	0,00	0,00	
66	000953	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG	75,00	100,00	0,00	0,00	
67	000954	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	75,00	100,00	0,00	0,00	
68	000955	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	75,00	100,00	0,00	0,00	
69	000956	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
70	000957	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
71	000958	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00	
1	010076	DINAS KETANAHAN, PASIRAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	030221	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	030313	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	040003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	050064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	060322	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	070044	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	080001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	090009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	100004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	110008	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	120009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	130005	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	

NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

[Download Excel](#)

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑	Kode UEI ↔	UEI ↔	NK Perencanaan Anggaran ↔	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↔	CRO ↔	Penggunaan SBK ↔	Efisiensi SBK ↔
1	02	Inspektorat Jenderal	90.61	100.00	100.00	100.00	37.40

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [Selanjutnya](#)

NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

[Download Excel](#)

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑	Kode UEI ↔	UEI ↔	NK Perencanaan Anggaran ↔	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↔	CRO ↔	Penggunaan SBK ↔	Efisiensi SBK ↔
1	03	Ditjen Perikanan Tangkap	84.12	99.33	91.51	88.40	28.65

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [Selanjutnya](#)

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
49	037613	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	93,46	100,00	100,00	56,40	
1	019003	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	90,00	100,00	100,00	33,35	
2	029373	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	90,00	100,00	100,00	33,35	
3	039103	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	90,00	100,00	100,00	33,35	
4	049097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	90,00	100,00	100,00	33,35	
5	000143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	90,00	100,00	100,00	33,35	
7	079130	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	90,00	100,00	100,00	33,35	
9	099323	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAU	90,00	100,00	100,00	33,35	
10	109131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	90,00	100,00	100,00	33,35	
11	119114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	90,00	100,00	100,00	33,35	
12	129123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	90,00	100,00	100,00	33,35	
13	139130	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	90,00	100,00	100,00	33,35	
15	159110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	90,00	100,00	100,00	33,35	
16	169134	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	90,00	100,00	100,00	33,35	
17	179113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	90,00	100,00	100,00	33,35	
21	219000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	90,00	100,00	100,00	33,35	
22	229110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	90,00	100,00	100,00	33,35	
24	249130	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. MUSA TENGGARA BARAT	90,00	100,00	100,00	33,35	
27	279173	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA PEKALONGAN	90,00	100,00	100,00	33,35	
28	289114	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA SUNGAI UT	90,00	100,00	100,00	33,35	
30	309133	PELABUHAN PERIKANAN PRNTAI TELUK BATANG	90,00	100,00	100,00	33,35	
31	319903	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA PEMANGKAT	90,00	100,00	100,00	33,35	
32	349100	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. MUSA TENGGARA TIMUR	90,00	100,00	100,00	33,35	
33	339107	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	90,00	100,00	100,00	33,35	
34	369130	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	90,00	100,00	100,00	33,35	

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
36	799381	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	90,00	100,00	100,00	33,35	
38	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWADANG	90,00	100,00	100,00	33,35	
39	319088	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	90,00	100,00	100,00	33,35	
41	339096	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	90,00	100,00	100,00	33,35	
42	340130	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	90,00	100,00	100,00	33,35	
43	437005	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA SELAMAN	90,00	100,00	100,00	33,35	
44	427681	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	90,00	100,00	100,00	33,35	
45	437670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	90,00	100,00	100,00	33,35	
46	427682	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BONDONG	90,00	100,00	100,00	33,35	
47	518127	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	90,00	100,00	100,00	33,35	
48	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	90,00	100,00	100,00	33,35	
50	537009	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	90,00	100,00	100,00	33,35	
51	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RAYU	90,00	100,00	100,00	33,35	
52	560402	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	90,00	100,00	100,00	33,35	
55	623482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAMARAN	90,00	100,00	100,00	33,35	
56	633330	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	90,00	100,00	100,00	33,35	
57	633493	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	90,00	100,00	100,00	33,35	
26	736159	SALAI BESAR PEMANGKAPAN IKAN	89,28	100,00	100,00	28,55	
53	623481	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	86,58	95,44	100,00	33,35	
25	330146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGBANTU	84,05	92,06	100,00	33,35	
23	330726	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	83,77	100,00	75,00	6,45	
37	399170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	82,50	90,00	100,00	33,35	
29	330321	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAR	81,98	93,75	66,67	33,35	
19	199137	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	81,76	89,01	100,00	33,35	
5	030190	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	75,00	100,00	0,00	0,00	

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
20	300117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	66,90	73,64	66,67	33,35	
18	180143	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	61,49	70,87	33,33	33,35	
54	032479	PELABUHAN PERIKANAN SUSANTARA TUL	51,34	59,56	66,67	0,00	
40	030007	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA	36,66	44,44	33,33	0,00	
58	031707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	27,02	31,58	33,33	0,00	
8	000143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	140234	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIHANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	300133	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	

Menampilkan 51 sampai 58 dari 58 entri

Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya

NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode UEI ↑↓	UEI ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	04	Ditjen Perikanan Budidaya	86.99	88.26	98.73	95.24	43.70

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
51	019063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DKI JAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00	
52	029173	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	
53	029184	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00	
54	040284	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00	
55	050181	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00	
56	060144	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM	100,00	100,00	100,00	100,00	
57	079137	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	100,00	100,00	100,00	100,00	
58	080144	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	
59	090120	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	100,00	100,00	100,00	100,00	
60	100133	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAHRE	100,00	100,00	100,00	100,00	
61	110143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
62	120134	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	100,00	100,00	100,00	100,00	
63	130139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	
64	140123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00	
65	150138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
66	160123	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00	
67	170114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	100,00	100,00	100,00	100,00	
68	180144	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00	
69	190138	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
70	200118	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	100,00	100,00	100,00	100,00	
71	210200	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	100,00	100,00	100,00	100,00	
72	220111	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	100,00	100,00	100,00	100,00	
73	230139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	
74	240179	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00	
75	250100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	100,00	100,00	100,00	100,00	

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan 58K	Efisiensi 58K	
76	306131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	100,00	100,00	100,00	100,00	
78	299396	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BARTEN	100,00	100,00	100,00	100,00	
79	306171	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00	
81	339068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	100,00	100,00	100,00	100,00	
82	339097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	
83	340151	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	
85	081347	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	100,00	100,00	100,00	100,00	
39	443383	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPE) KARAWANG	92,42	100,00	100,00	49,45	
50	632482	SETDIJEN PERIKANAN BUDIDAYA	92,31	100,00	93,33	53,20	
44	367474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	92,02	100,00	100,00	46,80	
38	427786	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	90,52	100,00	100,00	36,80	
26	398192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JENJANA	90,13	100,00	100,00	34,20	
24	338734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKARUNI	90,08	100,00	100,00	33,85	
45	367384	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDANJUR	89,98	100,00	100,00	33,20	
40	443384	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG URUGUL DAN KERABANGAN KARANGADEM	89,74	100,00	100,00	31,60	
43	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATSU	89,68	100,00	100,00	31,20	
49	307900	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	88,98	100,00	100,00	26,55	
23	337037	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI SELAM	88,86	100,00	100,00	25,75	
46	367680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TRAKALAR	86,86	100,00	90,91	18,45	
43	367385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SUNGAI BATEE	86,25	100,00	90,00	15,00	
48	367762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	86,24	100,00	85,71	17,80	
47	367720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	85,93	100,00	85,71	15,75	
42	367350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDQ	85,72	100,00	85,71	14,30	
80	319099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	42,94	57,25	0,00	0,00	
1	813022	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	



NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

[Download Excel](#)

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑	Kode UEI ↔	UEI ↔	NK Perencanaan Anggaran ↔	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↔	CRO ↔	Penggunaan SBK ↔	Efisiensi SBK ↔
1	05	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	94.01	100.00	98.31	96.00	67.80

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya **1** Selanjutnya

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
47	440807	STASIUN PENGAWASAN SDKP PORTIARAK	98,89	98,81	100,00	98,55	
3	031603	STASIUN PSDKP CILACAP	98,08	100,00	100,00	87,20	
44	440812	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JABAR	97,53	100,00	100,00	83,55	
7	003133	PANGKALAN PSDKP LAMPUNG	96,49	100,00	100,00	76,60	
31	350203	STASIUN PSDKP BAK	96,18	100,00	100,00	74,50	
46	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	95,66	100,00	100,00	71,05	
43	350103	STASIUN PSDKP TABAKAN	95,34	100,00	100,00	68,90	
38	323156	PANGKALAN PSDKP BAHAM	95,00	100,00	100,00	66,65	
48	440813	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	94,86	99,81	100,00	66,65	
24	313141	STASIUN PSDKP ANSON	93,99	98,65	100,00	66,65	
29	340100	STASIUN PSDKP KUPANG	93,83	96,43	100,00	76,70	
45	440823	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP SETUNG	93,67	98,23	100,00	66,65	
49	440820	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	89,57	96,57	100,00	47,60	
26	320133	PANGKALAN PSDKP BENDU	88,79	96,30	66,67	66,00	
19	170443	STASIUN PSDKP TAMBORA	84,95	97,71	66,67	33,35	
2	020000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
4	020017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00	
5	040023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	75,00	100,00	0,00	0,00	
10	080004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
13	110032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00	
14	120004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	75,00	100,00	0,00	0,00	
16	140020	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00	
18	160004	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	75,00	100,00	0,00	0,00	
21	180036	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00	
22	180023	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00	

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RD	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
69	030003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	75,00	100,00	0,00	0,00	
70	030003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALIKU	75,00	100,00	0,00	0,00	
71	030001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	75,00	100,00	0,00	0,00	
72	030001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MUSA TENGGARA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
74	030004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	75,00	100,00	0,00	0,00	
75	030005	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	75,00	100,00	0,00	0,00	
76	030006	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00	
77	030007	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BARTEN	75,00	100,00	0,00	0,00	
78	030008	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75,00	100,00	0,00	0,00	
79	030009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	75,00	100,00	0,00	0,00	
80	031009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	75,00	100,00	0,00	0,00	
81	031001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
83	031003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00	
65	030005	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	57,59	76,79	0,00	0,00	
73	030003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MUSA TENGGARA TIMUR	49,88	66,50	0,00	0,00	
02	031002	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	37,50	50,00	0,00	0,00	
1	013023	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	039002	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JABA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	069022	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	079003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	099009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	109003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JABRI	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	139026	DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	139017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	179005	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	

NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

[Download Excel](#)

Tampilkan entri

Cari:

No. ↑↓	Kode UEI ↑↓	UEI ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	06	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	82.38	98.05	99.17	33.33	33.35

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya **1** Selanjutnya

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
35	427888	BALAI BESAR PENGULAN PEMERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPP3KP)	100,00	100,00	100,00	100,00	
36	822131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUKUTAN DAYA SANGI PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	80,00	100,00	20,00	20,00	
37	891008	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	75,00	100,00	0,00	0,00	
38	891009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
39	891010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00	
40	891011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	75,00	100,00	0,00	0,00	
41	891012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	75,00	100,00	0,00	0,00	
42	891013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	75,00	100,00	0,00	0,00	
43	891014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00	
44	891015	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
45	891016	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	75,00	100,00	0,00	0,00	
46	891017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	75,00	100,00	0,00	0,00	
47	891018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00	
48	891019	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	75,00	100,00	0,00	0,00	
49	891020	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
50	891021	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00	
51	891022	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00	
52	891023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	75,00	100,00	0,00	0,00	
53	891024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00	
54	891025	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00	
55	891026	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00	
56	891027	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	75,00	100,00	0,00	0,00	
57	891028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	75,00	100,00	0,00	0,00	
58	891029	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	75,00	100,00	0,00	0,00	
59	891030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI Nusa Tenggara Barat	75,00	100,00	0,00	0,00	

Menampilkan 1 sampai 25 dari 74 entri

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
60	081031	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	75,00	100,00	0,00	0,00	
61	081032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	75,00	100,00	0,00	0,00	
62	081033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	75,00	100,00	0,00	0,00	
63	081034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALIKU UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00	
64	081035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BAKTEN	75,00	100,00	0,00	0,00	
65	081036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75,00	100,00	0,00	0,00	
66	081037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	75,00	100,00	0,00	0,00	
67	081038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	75,00	100,00	0,00	0,00	
68	081039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
69	081040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00	
70	081041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00	
71	081042	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	75,00	100,00	0,00	0,00	
73	081044	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00	
74	081045	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00	
72	081043	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PAPUA PESUUNINGAN	41,25	55,00	0,00	0,00	
17	179056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPNSI SULAWESI UTARA	0,75	1,00	0,00	0,00	
1	019074	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	029091	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	029018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	049034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	059033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	069013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	079034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	089005	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	099040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00	

Menampilkan 26 sampai 50 dari 74 entri

NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

[Download Excel](#)

Tampilkan 10 entri

Cari:

No.	Kode UEI	UEI	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	07	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	97.90	100.00	98.22	98.31	92.45

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [Selanjutnya](#)

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
27	290145	LOKA PEMBELAJAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
37	477431	BALAI PEMBELAJAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	100,00	100,00	100,00	100,00	
44	091048	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00	
45	091047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	
46	091046	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00	
47	091049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00	
49	091051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	100,00	100,00	100,00	100,00	
50	091052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTAMA	100,00	100,00	100,00	100,00	
51	091053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	
52	091054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BIAU	100,00	100,00	100,00	100,00	
53	091055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMB	100,00	100,00	100,00	100,00	
54	091056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
55	091057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	100,00	100,00	100,00	100,00	
56	091058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	
57	091059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00	
58	091060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
60	091062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	100,00	100,00	100,00	100,00	
61	091063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00	
62	091064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
63	091065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	100,00	100,00	100,00	100,00	
64	091066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALINDI	100,00	100,00	100,00	100,00	
67	091069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00	
68	091070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	100,00	100,00	100,00	100,00	
69	091071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	100,00	100,00	100,00	100,00	
70	091072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALINDI UTARA	100,00	100,00	100,00	100,00	

Menampilkan 1 sampai 25 dari 77 entri

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
71	081073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	100,00	100,00	100,00	100,00	
72	081074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00	
73	081075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	100,00	100,00	100,00	100,00	
74	081076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	100,00	100,00	100,00	100,00	
75	081077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPIK BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	
76	081078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	
66	081068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	99,81	99,75	100,00	100,00	
38	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	98,70	100,00	100,00	91,35	
40	489546	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	98,32	100,00	100,00	88,80	
36	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	98,11	100,00	100,00	87,40	
39	477456	LOKA KAMRAN KONSEPASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	97,16	100,00	100,00	81,05	
43	022545	SEKRETARIAT DINJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	96,84	98,41	100,00	86,90	
35	477410	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	96,42	100,00	100,00	76,10	
65	081067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	95,83	94,44	100,00	100,00	
41	489552	BALAI KAWASAN KONSEPASI PERAIRAN NASIONAL (BKKN) KUPANG	94,42	100,00	100,00	62,80	
59	081061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	89,43	85,90	100,00	100,00	
48	081058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	65,63	87,50	0,00	0,00	
77	081079	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	46,43	28,57	100,00	100,00	
23	249088	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	12,45	16,60	0,00	0,00	
1	020002	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	030613	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	040035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	050034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	060034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	070035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	

Menampilkan 26 sampai 50 dari 77 entri

NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

[Download Excel](#)Tampilkan entriCari:

No. ↑↓	Kode UEI ↑↓	UEI ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	95.28	100.00	94.51	92.65	89.90

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [Selanjutnya](#)

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	238763	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN SAMUDERA	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	238768	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMBUNG DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	403824	BALAI RISET PENYULUHAN SUMBER DAYA IKAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	403833	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
22	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
23	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL, EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
25	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
26	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
27	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BIREU	100,00	100,00	100,00	100,00	
29	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	100,00	100,00	100,00	100,00	
30	417511	POLITEKNIK USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	417531	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	417573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
34	417618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAGHERU	100,00	100,00	100,00	100,00	
36	440613	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	100,00	100,00	100,00	100,00	

Menampilkan 1 sampai 25 dari 41 entri

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
40	632069	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	100,00	100,00	100,00	100,00	
41	633216	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APAMATUR SUKAMANDI	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	99,88	99,84	100,00	100,00	
10	463620	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	99,60	100,00	100,00	97,30	
28	463875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	99,56	99,41	100,00	100,00	
38	624492	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	99,43	100,00	100,00	96,20	
21	463833	LOKA RISET BUDIDAYA BUMPUT LAUT	96,66	100,00	100,00	77,70	
11	463833	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	95,22	100,00	100,00	68,10	
37	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDARJO	92,35	89,80	100,00	100,00	
15	463616	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	91,66	100,00	66,67	66,65	
16	463627	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	91,66	100,00	66,67	66,65	
17	463628	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAWAI DAN PENYULUHAN PERIKANAN	91,66	100,00	66,67	66,65	
33	421983	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	75,00	100,00	0,00	0,00	
35	421930	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	75,00	100,00	0,00	0,00	
39	634346	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	6,82	9,09	0,00	0,00	
8	332585	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBİ (AK KP WAKATOBİ)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Menampilkan 26 sampai 41 dari 41 entri

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya



NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

[Download Excel](#)Tampilkan 10 entriCari:

No. ↑↓	Kode UEI ↑↓	UEI ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	82.83	73.08	99.47	81.08	53.55

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya **1** Selanjutnya

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
9	567433	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	648051	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	648068	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTRIKONG	100,00	100,00	100,00	100,00	
29	648037	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	648618	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	100,00	100,00	100,00	100,00	
43	649771	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI	100,00	100,00	100,00	100,00	
48	662897	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	427396	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	99,57	100,00	100,00	97,15	
15	567736	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	96,06	100,00	100,00	73,70	
3	427587	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN 1	95,00	100,00	100,00	66,65	
23	648093	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN	95,00	100,00	100,00	66,65	
39	649733	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	95,00	100,00	100,00	66,65	
14	567094	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	94,84	100,00	100,00	65,60	
12	567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKAPAMU	94,56	97,75	100,00	75,00	
2	427343	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA 1	92,50	100,00	100,00	50,00	
22	648089	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	92,50	100,00	100,00	50,00	
32	648082	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	92,50	100,00	100,00	50,00	
33	648084	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN II	92,50	100,00	100,00	50,00	
38	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	92,50	100,00	100,00	50,00	
44	649788	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA II	92,50	100,00	100,00	50,00	
36	649704	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	91,66	100,00	66,67	66,65	
34	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	91,43	95,24	100,00	66,65	
11	587516	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	91,39	100,00	100,00	42,60	
35	648099	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	90,70	100,00	75,00	54,65	
13	567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	90,00	100,00	75,00	50,00	

Menampilkan 1 sampai 25 dari 48 entri

Sebelumnya **1** 2 Selanjutnya

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
5	417624	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	89,37	95,83	100,00	50,00	
40	649746	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAJUKUNG BALU ASAHAN	89,34	95,79	100,00	50,00	
24	649601	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALLU	87,50	100,00	50,00	50,00	
26	649623	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	87,50	100,00	50,00	50,00	
42	649767	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE	87,50	100,00	50,00	50,00	
45	649792	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAI-BAU	87,50	100,00	50,00	50,00	
46	649800	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARIUNA	87,50	100,00	50,00	50,00	
47	649814	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA	87,50	100,00	50,00	50,00	
28	649640	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TALJUNG PIMANG	87,49	94,44	66,67	66,65	
18	649693	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG	86,67	100,00	66,67	33,35	
21	649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TIRUAKAN	86,67	100,00	66,67	33,35	
25	649615	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	86,67	100,00	66,67	33,35	
30	649661	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	86,67	100,00	66,67	33,35	
37	649711	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SOBONG	86,67	100,00	66,67	33,35	
10	667481	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	85,00	100,00	100,00	0,00	
41	649758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	85,00	100,00	100,00	0,00	
1	427520	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA1	83,78	96,15	66,67	33,35	
7	440607	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELUYAN DAN PERIKANAN	83,38	100,00	57,14	17,75	
6	427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	80,00	100,00	50,00	0,00	
8	567432	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	75,00	100,00	0,00	0,00	
16	567813	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	75,00	100,00	0,00	0,00	
17	649691	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	75,00	100,00	0,00	0,00	
27	649638	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	75,00	100,00	0,00	0,00	

Menampilkan 26 sampai 48 dari 48 entri

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 196/SJ.2/RC.610/I/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
6. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024

Tanggal : 15 Januari 2025

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 40/SJ.1/RC.610/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester II tahun 2024 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 20.20 (sesuai Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor S-738/PB.2/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Ketentuan Pelaporan Data Capaian Output dan Penilaian IKPA Belanja K/L Tahun 2024).
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester II tahun 2024 sebesar 93,84 dari target nilai 93,76.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester II tahun 2024 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup Unit Kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart**, **Akuntabel**, **Integritas**, **Loyalitas**, dan **Sinergi** (SAILS).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Setyawati

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Inspektur Lingkup Inspektorat Jenderal
4. Ketua Tim Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan dan BMN



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	99.60	82.45	91.68	96.67	99.18	96.79	97.66	94.34	100%	0.50	93.84
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.96	12.37	18.34	9.67	9.92	9.68	24.41				
			Nilai Aspek	91.03		96.08				97.66				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	94.29	97.90	97.33	100.00	98.80	100.00	98.34	100%	0.00	98.34
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	14.14	19.58	9.73	10.00	9.88	25.00				
			Nilai Aspek	97.15		98.51				100.00				
2	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	89.43	96.29	95.27	99.82	97.08	96.76	96.08	100%	0.00	96.08
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.41	19.26	9.53	9.98	9.71	24.19				
			Nilai Aspek	94.72		97.11				96.76				
3	03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	87.07	95.14	93.97	99.38	94.48	95.51	94.75	100%	0.50	94.25
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.06	19.03	9.40	9.94	9.45	23.88				
			Nilai Aspek	93.54		95.74				95.51				
4	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	99.66	88.22	89.38	97.30	97.40	96.28	92.39	93.27	100%	0.50	92.77
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.97	13.23	17.88	9.73	9.74	9.63	23.10				
			Nilai Aspek	93.94		95.09				92.39				
5	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	99.60	66.38	95.50	96.36	99.73	99.07	97.87	93.00	100%	0.50	92.50
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.96	9.96	19.10	9.64	9.97	9.91	24.47				
			Nilai Aspek	82.99		97.67				97.87				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6	03207	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	98.84	86.18	85.26	97.83	99.59	95.85	96.24	93.25	100%	0.75	92.50
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.88	12.93	17.05	9.78	9.96	9.59	24.06				
			Nilai Aspek	92.51		94.63				96.24				
7	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	99.38	75.30	90.15	96.49	99.18	95.78	97.87	92.88	100%	0.75	92.13
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.94	11.30	18.03	9.65	9.92	9.58	24.47				
			Nilai Aspek	87.34		95.40				97.87				
8	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	99.44	70.48	88.42	99.58	99.56	95.55	97.74	92.10	100%	0.00	92.10
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.94	10.57	17.68	9.96	9.96	9.55	24.43				
			Nilai Aspek	84.96		95.78				97.74				
9	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	78.69	83.06	92.33	100.00	97.13	100.00	92.36	100%	0.50	91.86
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	11.80	16.61	9.23	10.00	9.71	25.00				
			Nilai Aspek	89.35		93.13				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
2	179	032	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00	
					Bobot	10	15	20	10	10	10					25
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00					25.00
					Nilai Aspek	100.00		100.00								100.00
3	024	032	649732	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.87	100.00	99.99	100%	0.00	99.99
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.97				100.00				
4	021	032	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.82	100.00	99.98	100%	0.00	99.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.96				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

5	136	032	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	Nilai	100.00	100.00	99.85	98.67	100.00	99.52	100.00	99.79	100%	0.00	99.79
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.97	9.87	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.51				100.00				
6	073	032	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	Nilai	100.00	100.00	98.15	100.00	100.00	99.89	100.00	99.62	100%	0.00	99.62
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.63	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.51				100.00				
7	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Nilai	100.00	100.00	99.42	100.00	100.00	97.29	100.00	99.61	100%	0.00	99.61
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.88	10.00	10.00	9.73	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.18				100.00				
8	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.65	100.00	99.56	100%	0.00	99.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.56	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.91				100.00				
9	123	032	649684	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN II	Nilai	100.00	100.00	98.77	100.00	100.00	97.80	100.00	99.53	100%	0.00	99.53
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.75	10.00	10.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.14				100.00				
10	132	032	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	97.83	100.00	100.00	99.36	100.00	99.50	100%	0.00	99.50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.57	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.30				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

11	055	032	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	Nilai	100.00	100.00	99.43	96.00	100.00	100.00	100.00	99.49	100%	0.00	99.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.89	9.60	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.86				100.00				
12	037	032	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	Nilai	100.00	100.00	98.38	100.00	100.00	97.90	100.00	99.47	100%	0.00	99.47
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.68	10.00	10.00	9.79	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.07				100.00				
13	086	032	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	Nilai	100.00	100.00	98.78	100.00	100.00	97.08	100.00	99.46	100%	0.00	99.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.76	10.00	10.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.96				100.00				
14	030	032	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	97.37	0.00	0.00	99.79	100.00	79.45	80%	0.00	99.32
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.47	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.58				100.00				
15	175	032	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	97.68	100.00	100.00	97.52	100.00	99.29	100%	0.00	99.29
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.54	10.00	10.00	9.75	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.80				100.00				
16	123	032	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	Nilai	100.00	100.00	99.18	100.00	100.00	93.13	100.00	99.15	100%	0.00	99.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.84	10.00	10.00	9.31	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.08				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

17	039	032	245160	STASIUN PSDKP KUPANG	Nilai	100.00	100.00	98.32	100.00	100.00	100.00	97.50	99.04	100%	0.00	99.04
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.66	10.00	10.00	10.00	24.38				
					Nilai Aspek	100.00		99.58				97.50				
18	025	032	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	Nilai	100.00	100.00	96.96	96.00	99.08	100.00	100.00	98.90	100%	0.00	98.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.39	9.60	9.91	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.01				100.00				
19	180	032	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	Nilai	100.00	100.00	95.44	100.00	100.00	97.27	100.00	98.82	100%	0.00	98.82
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.09	10.00	10.00	9.73	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.18				100.00				
20	094	032	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	Nilai	100.00	92.76	99.31	100.00	100.00	100.00	100.00	98.78	100%	0.00	98.78
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.91	19.86	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.38		99.83				100.00				
21	008	032	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	Nilai	100.00	93.25	98.48	100.00	100.00	99.97	100.00	98.68	100%	0.00	98.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.99	19.70	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.63		99.61				100.00				
22	034	032	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	Nilai	100.00	93.16	98.36	100.00	100.00	100.00	100.00	98.65	100%	0.00	98.65
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.97	19.67	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.58		99.59				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

23	035	032	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	Nilai	100.00	100.00	93.99	97.72	100.00	99.92	100.00	98.56	100%	0.00	98.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.80	9.77	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.91				100.00				
24	175	032	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	Nilai	100.00	93.01	97.86	100.00	100.00	99.71	100.00	98.49	100%	0.00	98.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.95	19.57	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	96.51		99.39				100.00				
25	053	032	649771	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI	Nilai	100.00	91.31	99.04	100.00	100.00	99.02	100.00	98.41	100%	0.00	98.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.70	19.81	10.00	10.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	95.66		99.51				100.00				
26	001	032	649589	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	Nilai	100.00	94.21	98.25	0.00	0.00	99.44	100.00	78.73	80%	0.00	98.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	19.65	0.00	0.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	97.11		98.85				100.00				
27	023	032	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	Nilai	100.00	89.76	100.00	100.00	100.00	98.85	100.00	98.35	100%	0.00	98.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.46	20.00	10.00	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	94.88		99.71				100.00				
28	175	032	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	94.29	97.91	97.33	100.00	98.80	100.00	98.34	100%	0.00	98.34
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.14	19.58	9.73	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	97.15		98.51				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

29	043	032	649657	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	Nilai	100.00	94.05	99.58	0.00	0.00	96.28	100.00	78.65	80%	0.00	98.31
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.11	19.92	0.00	0.00	9.63	25.00				
					Nilai Aspek	97.03		97.93				100.00				
30	020	032	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	Nilai	100.00	88.05	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.21	100%	0.00	98.21
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.21	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.03		100.00				100.00				
31	023	032	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	90.90	97.65	100.00	100.00	100.00	100.00	98.17	100%	0.00	98.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	19.53	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.45		99.41				100.00				
32	132	032	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	Nilai	100.00	92.59	96.14	100.00	100.00	99.61	100.00	98.08	100%	0.00	98.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.89	19.23	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	96.30		98.94				100.00				
33	128	032	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	Nilai	100.00	91.88	96.60	99.43	100.00	100.00	100.00	98.05	100%	0.00	98.05
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.78	19.32	9.94	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.94		99.01				100.00				
34	134	032	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	Nilai	100.00	92.35	97.45	100.00	100.00	96.82	100.00	98.02	100%	0.00	98.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.85	19.49	10.00	10.00	9.68	25.00				
					Nilai Aspek	96.18		98.57				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

35	050	032	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	Nilai	100.00	89.31	98.92	100.00	100.00	97.68	100.00	97.95	100%	0.00	97.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.40	19.78	10.00	10.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	94.66		99.15				100.00				
36	012	032	649636	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	Nilai	100.00	91.33	96.55	100.00	100.00	99.40	100.00	97.95	100%	0.00	97.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.70	19.31	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	95.67		98.99				100.00				
37	038	032	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	Nilai	100.00	89.92	97.57	100.00	100.00	99.12	100.00	97.91	100%	0.00	97.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.49	19.51	10.00	10.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	94.96		99.17				100.00				
38	062	032	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	Nilai	100.00	92.08	95.54	100.00	99.61	100.00	100.00	97.88	100%	0.00	97.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.81	19.11	10.00	9.96	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.04		98.79				100.00				
39	130	032	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Nilai	100.00	89.81	96.86	100.00	100.00	99.78	100.00	97.82	100%	0.00	97.82
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.47	19.37	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	94.91		99.16				100.00				
40	049	032	567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	Nilai	100.00	91.81	96.50	100.00	100.00	96.83	100.00	97.75	100%	0.00	97.75
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.77	19.30	10.00	10.00	9.68	25.00				
					Nilai Aspek	95.91		98.33				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

41	045	032	649593	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN	Nilai	100.00	88.20	97.25	100.00	100.00	100.00	100.00	97.68	100%	0.00	97.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.23	19.45	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.10		99.31				100.00				
42	051	032	649601	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	Nilai	100.00	89.32	96.68	100.00	100.00	99.50	100.00	97.68	100%	0.00	97.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.40	19.34	10.00	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	94.66		99.04				100.00				
43	015	032	649699	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	Nilai	100.00	87.72	97.95	100.00	100.00	99.18	100.00	97.67	100%	0.00	97.67
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.16	19.59	10.00	10.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	93.86		99.28				100.00				
44	045	032	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	Nilai	100.00	93.22	94.14	98.00	100.00	100.00	100.00	97.61	100%	0.00	97.61
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.98	18.83	9.80	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.61		98.04				100.00				
45	086	032	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	Nilai	100.00	83.86	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.58	100%	0.00	97.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.58	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.93		100.00				100.00				
46	130	032	031665	STASIUN PSDKP CILACAP	Nilai	100.00	91.14	95.68	100.00	100.00	97.54	100.00	97.56	100%	0.00	97.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.67	19.14	10.00	10.00	9.75	25.00				
					Nilai Aspek	95.57		98.31				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

47	061	032	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	94.78	98.53	100.00	100.00	85.66	100.00	97.49	100%	0.00	97.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.22	19.71	10.00	10.00	8.57	25.00				
					Nilai Aspek	97.39		96.05				100.00				
48	014	032	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	94.93	97.81	100.00	100.00	86.16	100.00	97.42	100%	0.00	97.42
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.24	19.56	10.00	10.00	8.62	25.00				
					Nilai Aspek	97.47		95.99				100.00				
49	020	032	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	Nilai	100.00	86.50	100.00	100.00	100.00	94.47	100.00	97.42	100%	0.00	97.42
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.98	20.00	10.00	10.00	9.45	25.00				
					Nilai Aspek	93.25		98.62				100.00				
50	167	032	649568	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG	Nilai	100.00	89.84	99.13	0.00	0.00	95.98	100.00	77.90	80%	0.00	97.37
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.48	19.83	0.00	0.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	94.92		97.55				100.00				
51	015	032	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	Nilai	100.00	90.75	95.30	100.00	100.00	96.75	100.00	97.35	100%	0.00	97.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.61	19.06	10.00	10.00	9.68	25.00				
					Nilai Aspek	95.38		98.01				100.00				
52	123	032	427567	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I	Nilai	100.00	86.21	100.00	0.00	0.00	99.20	100.00	77.85	80%	0.00	97.31
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.93	20.00	0.00	0.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	93.11		99.60				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

53	071	032	649814	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA	Nilai	100.00	88.56	99.10	0.00	0.00	97.31	100.00	77.84	80%	0.00	97.29
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.28	19.82	0.00	0.00	9.73	25.00				
					Nilai Aspek	94.28		98.21				100.00				
54	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100.00	84.75	99.37	97.00	100.00	99.25	100.00	97.21	100%	0.00	97.21
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.71	19.87	9.70	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	92.38		98.91				100.00				
55	021	032	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	Nilai	100.00	89.23	94.26	100.00	100.00	99.21	100.00	97.16	100%	0.00	97.16
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.38	18.85	10.00	10.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	94.62		98.37				100.00				
56	136	032	427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100.00	92.15	96.00	92.00	100.00	99.34	100.00	97.16	100%	0.00	97.16
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.82	19.20	9.20	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	96.08		96.84				100.00				
57	106	032	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	Nilai	100.00	84.30	97.09	100.00	100.00	100.00	100.00	97.06	100%	0.00	97.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.65	19.42	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.15		99.27				100.00				
58	136	032	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	88.88	98.55	92.00	100.00	98.18	100.00	97.06	100%	0.00	97.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.33	19.71	9.20	10.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	94.44		97.18				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

59	072	032	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	Nilai	100.00	84.81	98.69	100.00	100.00	95.84	100.00	97.04	100%	0.00	97.04
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.72	19.74	10.00	10.00	9.58	25.00				
					Nilai Aspek	92.41		98.63				100.00				
60	107	032	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	Nilai	100.00	90.44	95.67	96.00	97.92	99.41	100.00	97.03	100%	0.00	97.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.57	19.13	9.60	9.79	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	95.22		97.25				100.00				
61	047	032	567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Nilai	100.00	88.38	95.86	100.00	100.00	95.40	100.00	96.97	100%	0.00	96.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.26	19.17	10.00	10.00	9.54	25.00				
					Nilai Aspek	94.19		97.82				100.00				
62	120	032	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	Nilai	100.00	90.87	95.40	92.00	100.00	99.18	100.00	96.83	100%	0.00	96.83
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.63	19.08	9.20	10.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	95.44		96.65				100.00				
63	100	032	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	Nilai	100.00	79.08	99.48	100.00	100.00	100.00	100.00	96.76	100%	0.00	96.76
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.86	19.90	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	89.54		99.87				100.00				
64	134	032	649661	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	91.88	94.53	100.00	100.00	90.56	100.00	96.74	100%	0.00	96.74
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.78	18.91	10.00	10.00	9.06	25.00				
					Nilai Aspek	95.94		96.27				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

65	001	032	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	Nilai	100.00	90.79	99.42	100.00	100.00	81.72	100.00	96.67	100%	0.00	96.67
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.62	19.88	10.00	10.00	8.17	25.00				
					Nilai Aspek	95.40		95.29				100.00				
66	132	032	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	Nilai	100.00	88.86	96.17	94.00	100.00	96.96	100.00	96.66	100%	0.00	96.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.33	19.23	9.40	10.00	9.70	25.00				
					Nilai Aspek	94.43		96.78				100.00				
67	050	032	649678	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	Nilai	100.00	83.45	97.50	100.00	100.00	95.83	100.00	96.60	100%	0.00	96.60
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.52	19.50	10.00	10.00	9.58	25.00				
					Nilai Aspek	91.73		98.33				100.00				
68	061	032	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	82.50	98.40	100.00	100.00	94.75	100.00	96.53	100%	0.00	96.53
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.38	19.68	10.00	10.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	91.25		98.29				100.00				
69	010	032	567432	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	Nilai	100.00	86.59	93.72	100.00	100.00	97.98	100.00	96.53	100%	0.00	96.53
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.99	18.74	10.00	10.00	9.80	25.00				
					Nilai Aspek	93.30		97.92				100.00				
70	039	032	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	90.57	92.69	100.00	100.00	93.37	100.00	96.46	100%	0.00	96.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.59	18.54	10.00	10.00	9.34	25.00				
					Nilai Aspek	95.29		96.51				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

71	123	032	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	Nilai	100.00	81.27	98.58	100.00	100.00	95.57	100.00	96.46	100%	0.00	96.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.19	19.72	10.00	10.00	9.56	25.00				
					Nilai Aspek	90.64		98.54				100.00				
72	017	032	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	Nilai	100.00	80.52	99.59	94.67	100.00	99.78	100.00	96.44	100%	0.00	96.44
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.08	19.92	9.47	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	90.26		98.51				100.00				
73	175	032	662897	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	88.62	96.26	100.00	100.00	98.69	100.00	97.41	100%	1.00	96.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.29	19.25	10.00	10.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	94.31		98.74				100.00				
74	137	032	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	Nilai	100.00	92.93	89.77	98.67	100.00	95.96	100.00	96.36	100%	0.00	96.36
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.94	17.95	9.87	10.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	96.47		96.10				100.00				
75	020	032	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	Nilai	100.00	85.91	98.39	100.00	100.00	94.63	96.67	96.19	100%	0.00	96.19
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.89	19.68	10.00	10.00	9.46	24.17				
					Nilai Aspek	92.96		98.25				96.67				
76	060	032	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	Nilai	100.00	81.29	97.33	99.00	100.00	96.33	100.00	96.19	100%	0.00	96.19
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.19	19.47	9.90	10.00	9.63	25.00				
					Nilai Aspek	90.65		98.16				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

77	024	032	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	Nilai	100.00	78.59	100.00	96.88	100.00	96.98	100.00	96.17	100%	0.00	96.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.79	20.00	9.69	10.00	9.70	25.00				
					Nilai Aspek	89.30		98.46				100.00				
78	009	032	649640	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNG PINANG	Nilai	100.00	90.89	95.45	0.00	0.00	91.76	100.00	76.90	80%	0.00	96.12
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.63	19.09	0.00	0.00	9.18	25.00				
					Nilai Aspek	95.45		93.61				100.00				
79	175	032	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	Nilai	100.00	86.62	96.65	92.00	100.00	95.79	100.00	96.10	100%	0.00	96.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.99	19.33	9.20	10.00	9.58	25.00				
					Nilai Aspek	93.31		96.11				100.00				
80	048	032	355105	STASIUN PSDKP TARAKAN	Nilai	100.00	79.79	97.06	99.00	100.00	98.19	100.00	96.10	100%	0.00	96.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.97	19.41	9.90	10.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	89.90		98.56				100.00				
81	001	032	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	Nilai	100.00	77.23	99.54	100.00	100.00	95.26	100.00	96.02	100%	0.00	96.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.58	19.91	10.00	10.00	9.53	25.00				
					Nilai Aspek	88.62		98.70				100.00				
82	021	032	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	Nilai	100.00	74.48	100.00	100.00	100.00	98.34	100.00	96.01	100%	0.00	96.01
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.17	20.00	10.00	10.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	87.24		99.58				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

83	037	032	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA	Nilai	100.00	87.67	92.20	100.00	100.00	100.00	97.41	95.94	100%	0.00	95.94
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.15	18.44	10.00	10.00	10.00	24.35				
					Nilai Aspek	93.84			98.05			97.41				
84	165	032	427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Nilai	100.00	91.34	92.91	92.00	100.00	94.30	100.00	95.91	100%	0.00	95.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.70	18.58	9.20	10.00	9.43	25.00				
					Nilai Aspek	95.67			94.80			100.00				
85	129	032	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	Nilai	100.00	75.82	98.16	99.00	100.00	100.00	100.00	95.91	100%	0.00	95.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.37	19.63	9.90	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.91			99.29			100.00				
86	039	032	649551	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	85.66	96.27	0.00	0.00	96.17	100.00	76.72	80%	0.00	95.90
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.85	19.25	0.00	0.00	9.62	25.00				
					Nilai Aspek	92.83			96.22			100.00				
87	010	032	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	Nilai	100.00	89.81	95.80	100.00	100.00	82.06	100.00	95.84	100%	0.00	95.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.47	19.16	10.00	10.00	8.21	25.00				
					Nilai Aspek	94.91			94.46			100.00				
88	095	032	029172	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	86.92	93.34	0.00	0.00	99.59	100.00	76.67	80%	0.00	95.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.04	18.67	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	93.46			96.47			100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

89	137	032	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	Nilai	100.00	87.46	92.12	95.43	98.90	98.47	100.00	95.82	100%	0.00	95.82
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.12	18.42	9.54	9.89	9.85	25.00				
					Nilai Aspek	93.73		96.23				100.00				
90	066	032	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	Nilai	100.00	90.72	99.58	84.45	100.00	88.52	100.00	95.82	100%	0.00	95.82
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.61	19.92	8.45	10.00	8.85	25.00				
					Nilai Aspek	95.36		93.14				100.00				
91	062	032	649767	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE	Nilai	100.00	84.42	95.02	0.00	0.00	99.82	100.00	76.65	80%	0.00	95.81
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.66	19.00	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	92.21		97.42				100.00				
92	009	032	329087	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	82.02	96.66	0.00	0.00	99.66	100.00	76.60	80%	0.00	95.75
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.30	19.33	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	91.01		98.16				100.00				
93	175	032	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	Nilai	100.00	86.94	92.34	92.63	100.00	99.31	100.00	95.70	100%	0.00	95.70
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.04	18.47	9.26	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	93.47		96.07				100.00				
94	179	032	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	85.21	89.04	100.00	100.00	100.00	99.89	95.56	100%	0.00	95.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.78	17.81	10.00	10.00	10.00	24.97				
					Nilai Aspek	92.61		97.26				99.89				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

95	063	032	567812	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	Nilai	100.00	84.78	94.30	100.00	100.00	89.83	100.00	95.56	100%	0.00	95.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.72	18.86	10.00	10.00	8.98	25.00				
					Nilai Aspek	92.39		96.03				100.00				
96	064	032	250263	STASIUN PSDKP BIAK	Nilai	100.00	87.60	90.07	94.00	100.00	99.35	100.00	95.49	100%	0.00	95.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.14	18.01	9.40	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	93.80		95.86				100.00				
97	118	032	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	Nilai	100.00	82.43	93.42	98.00	100.00	0.00	100.00	85.85	90%	0.00	95.39
					Bobot	10	15	20	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.36	18.68	9.80	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.22		97.14				100.00				
98	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100.00	86.89	92.67	98.67	100.00	89.49	100.00	95.38	100%	0.00	95.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.03	18.53	9.87	10.00	8.95	25.00				
					Nilai Aspek	93.45		95.21				100.00				
99	136	032	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	Nilai	100.00	86.60	90.56	98.00	100.00	94.02	100.00	95.30	100%	0.00	95.30
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.99	18.11	9.80	10.00	9.40	25.00				
					Nilai Aspek	93.30		95.64				100.00				
100	008	032	567453	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	Nilai	100.00	75.79	97.98	100.00	100.00	92.84	100.00	95.25	100%	0.00	95.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.37	19.60	10.00	10.00	9.28	25.00				
					Nilai Aspek	87.90		97.71				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

101	017	032	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	Nilai	80.00	84.67	97.75	100.00	100.00	100.00	100.00	95.25	100%	0.00	95.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	12.70	19.55	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	82.34		99.44				100.00				
102	179	032	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	Nilai	100.00	82.91	98.35	99.00	100.00	91.51	96.32	95.24	100%	0.00	95.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.44	19.67	9.90	10.00	9.15	24.08				
					Nilai Aspek	91.46		97.22				96.32				
103	083	032	170445	STASIUN PSDKP TAHUNA	Nilai	100.00	85.68	94.66	94.00	100.00	100.00	100.00	96.18	100%	1.00	95.18
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.85	18.93	9.40	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.84		97.17				100.00				
104	178	032	340150	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	86.41	91.05	0.00	0.00	98.98	100.00	76.07	80%	0.00	95.09
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.96	18.21	0.00	0.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	93.21		95.02				100.00				
105	037	032	427624	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	Nilai	100.00	88.61	96.11	100.00	81.82	93.30	100.00	95.03	100%	0.00	95.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.29	19.22	10.00	8.18	9.33	25.00				
					Nilai Aspek	94.31		92.81				100.00				
106	001	032	065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	Nilai	100.00	80.11	93.04	100.00	100.00	93.61	100.00	94.99	100%	0.00	94.99
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.02	18.61	10.00	10.00	9.36	25.00				
					Nilai Aspek	90.06		96.66				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

107	042	032	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	Nilai	100.00	84.65	96.23	96.00	96.67	87.67	100.00	94.98	100%	0.00	94.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.70	19.25	9.60	9.67	8.77	25.00				
					Nilai Aspek	92.33		94.14				100.00				
108	010	032	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	Nilai	100.00	85.07	94.18	95.00	100.00	88.43	100.00	94.94	100%	0.00	94.94
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.76	18.84	9.50	10.00	8.84	25.00				
					Nilai Aspek	92.54		94.40				100.00				
109	038	032	567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	Nilai	100.00	81.35	93.65	0.00	0.00	100.00	100.00	75.93	80%	0.00	94.92
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.20	18.73	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.68		96.83				100.00				
110	178	032	645691	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	Nilai	100.00	79.43	94.91	0.00	0.00	99.68	100.00	75.86	80%	0.00	94.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.91	18.98	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	89.72		97.29				100.00				
111	066	032	649711	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	74.67	96.30	100.00	100.00	93.40	100.00	94.80	100%	0.00	94.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.20	19.26	10.00	10.00	9.34	25.00				
					Nilai Aspek	87.34		97.42				100.00				
112	132	032	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	92.32	82.65	100.00	100.00	93.88	100.00	94.77	100%	0.00	94.77
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.85	16.53	10.00	10.00	9.39	25.00				
					Nilai Aspek	96.16		94.13				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

113	061	032	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	Nilai	100.00	86.86	96.20	100.00	100.00	82.96	96.81	94.77	100%	0.00	94.77
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.03	19.24	10.00	10.00	8.30	24.20				
					Nilai Aspek	93.43		94.79				96.81				
114	103	032	649792	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAU-BAU	Nilai	100.00	78.65	94.21	100.00	100.00	90.84	100.00	94.72	100%	0.00	94.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.80	18.84	10.00	10.00	9.08	25.00				
					Nilai Aspek	89.33		96.26				100.00				
115	061	032	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	Nilai	100.00	73.16	98.83	92.00	100.00	97.56	100.00	94.70	100%	0.00	94.70
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.97	19.77	9.20	10.00	9.76	25.00				
					Nilai Aspek	86.58		97.10				100.00				
116	127	032	427520	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	Nilai	100.00	81.84	97.78	92.00	100.00	84.07	100.00	94.44	100%	0.00	94.44
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.28	19.56	9.20	10.00	8.41	25.00				
					Nilai Aspek	90.92		93.46				100.00				
117	038	032	239138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	78.88	93.46	0.00	0.00	100.00	100.00	75.52	80%	0.00	94.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.83	18.69	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	89.44		96.73				100.00				
118	103	032	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	Nilai	100.00	87.57	90.57	100.00	100.00	99.98	92.41	94.35	100%	0.00	94.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.14	18.11	10.00	10.00	10.00	23.10				
					Nilai Aspek	93.79		97.64				92.41				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

119	179	032	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	Nilai	100.00	89.71	86.81	94.00	100.00	94.19	98.76	94.33	100%	0.00	94.33
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.46	17.36	9.40	10.00	9.42	24.69				
					Nilai Aspek	94.86		93.75				98.76				
120	020	032	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	Nilai	100.00	79.10	96.26	98.13	100.00	94.03	95.88	94.30	100%	0.00	94.30
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.87	19.25	9.81	10.00	9.40	23.97				
					Nilai Aspek	89.55		97.11				95.88				
121	179	032	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Nilai	100.00	80.77	88.29	94.80	100.00	98.78	100.00	94.13	100%	0.00	94.13
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.12	17.66	9.48	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	90.39		95.47				100.00				
122	103	032	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	Nilai	100.00	75.24	91.47	100.00	100.00	95.53	100.00	94.13	100%	0.00	94.13
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.29	18.29	10.00	10.00	9.55	25.00				
					Nilai Aspek	87.62		96.75				100.00				
123	175	032	403821	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	80.96	89.99	100.00	100.00	89.58	100.00	94.10	100%	0.00	94.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.14	18.00	10.00	10.00	8.96	25.00				
					Nilai Aspek	90.48		94.89				100.00				
124	014	032	567481	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	Nilai	100.00	76.74	95.30	0.00	0.00	96.72	100.00	75.24	80%	0.00	94.05
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.51	19.06	0.00	0.00	9.67	25.00				
					Nilai Aspek	88.37		96.01				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

125	030	032	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Nilai	100.00	75.62	94.38	100.00	100.00	87.20	100.00	93.94	100%	0.00	93.94
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.34	18.88	10.00	10.00	8.72	25.00				
					Nilai Aspek	87.81		95.40				100.00				
126	010	032	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	Nilai	100.00	74.71	96.77	97.00	100.00	86.53	100.00	93.91	100%	0.00	93.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.21	19.35	9.70	10.00	8.65	25.00				
					Nilai Aspek	87.36		95.07				100.00				
127	017	032	649615	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	Nilai	100.00	61.72	98.11	100.00	100.00	100.00	100.00	93.88	100%	0.00	93.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.26	19.62	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	80.86		99.53				100.00				
128	083	032	649800	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUNA	Nilai	100.00	76.78	98.86	0.00	100.00	81.66	100.00	84.45	90%	0.00	93.84
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.52	19.77	0.00	10.00	8.17	25.00				
					Nilai Aspek	88.39		93.51				100.00				
129	076	032	649746	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNG BALAI ASAHAN	Nilai	100.00	77.39	92.27	0.00	0.00	100.00	100.00	75.06	80%	0.00	93.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.61	18.45	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.70		96.14				100.00				
130	118	032	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	Nilai	100.00	85.75	84.12	96.00	100.00	94.31	100.00	93.72	100%	0.00	93.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.86	16.82	9.60	10.00	9.43	25.00				
					Nilai Aspek	92.88		93.61				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

131	084	032	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	Nilai	100.00	73.20	99.54	96.57	100.00	81.62	100.00	93.71	100%	0.00	93.71
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.98	19.91	9.66	10.00	8.16	25.00				
					Nilai Aspek	86.60		94.43				100.00				
132	060	032	567694	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	Nilai	100.00	68.34	91.94	100.00	100.00	100.00	100.00	93.64	100%	0.00	93.64
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.25	18.39	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	84.17		97.99				100.00				
133	012	032	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	Nilai	100.00	72.60	98.12	94.40	99.15	97.63	100.00	94.63	100%	1.00	93.63
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.89	19.62	9.44	9.92	9.76	25.00				
					Nilai Aspek	86.30		97.32				100.00				
134	175	032	626402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	68.36	95.08	95.10	100.00	98.39	100.00	93.62	100%	0.00	93.62
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.25	19.02	9.51	10.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	84.18		97.14				100.00				
135	135	032	649788	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA II	Nilai	100.00	71.60	89.38	100.00	100.00	99.64	100.00	93.58	100%	0.00	93.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.74	17.88	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	85.80		97.26				100.00				
136	068	032	649704	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	Nilai	100.00	72.27	95.78	0.00	0.00	98.14	100.00	74.81	80%	0.00	93.51
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.84	19.16	0.00	0.00	9.81	25.00				
					Nilai Aspek	86.14		96.96				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

137	037	032	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	Nilai	100.00	74.89	86.00	100.00	100.00	99.86	100.00	93.42	100%	0.00	93.42
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.23	17.20	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	87.45		96.46				100.00				
138	016	032	649622	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	Nilai	100.00	71.99	95.31	100.00	100.00	84.76	100.00	93.34	100%	0.00	93.34
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.80	19.06	10.00	10.00	8.48	25.00				
					Nilai Aspek	86.00		95.02				100.00				
139	093	032	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	Nilai	100.00	71.85	93.79	97.33	100.00	100.00	100.00	94.27	100%	1.00	93.27
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.78	18.76	9.73	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	85.93		97.78				100.00				
140	128	032	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	Nilai	100.00	68.10	94.65	92.67	100.00	97.87	100.00	93.20	100%	0.00	93.20
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.22	18.93	9.27	10.00	9.79	25.00				
					Nilai Aspek	84.05		96.30				100.00				
141	008	032	099325	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	72.14	93.35	0.00	0.00	99.60	100.00	74.45	80%	0.00	93.06
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.82	18.67	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	86.07		96.48				100.00				
142	175	032	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	Nilai	100.00	85.20	92.35	94.00	100.00	70.82	100.00	92.73	100%	0.00	92.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.78	18.47	9.40	10.00	7.08	25.00				
					Nilai Aspek	92.60		89.29				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

143	042	032	567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	Nilai	100.00	75.12	90.34	0.00	0.00	96.66	100.00	74.00	80%	0.00	92.50
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.27	18.07	0.00	0.00	9.67	25.00				
					Nilai Aspek	87.56		93.50				100.00				
144	175	032	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	Nilai	80.00	84.22	93.37	96.00	96.92	95.83	100.00	93.18	100%	0.75	92.43
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	12.63	18.67	9.60	9.69	9.58	25.00				
					Nilai Aspek	82.11		95.53				100.00				
145	175	032	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	66.87	95.80	100.00	100.00	81.96	100.00	92.39	100%	0.00	92.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.03	19.16	10.00	10.00	8.20	25.00				
					Nilai Aspek	83.44		94.44				100.00				
146	048	032	649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	Nilai	100.00	64.99	96.60	100.00	100.00	82.14	100.00	92.28	100%	0.00	92.28
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.75	19.32	10.00	10.00	8.21	25.00				
					Nilai Aspek	82.50		94.68				100.00				
147	012	032	691017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	68.37	0.00	0.00	100.00	100.00	73.67	80%	0.00	92.09
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	13.67	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		84.19				100.00				
148	008	032	690933	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	88.07	77.12	0.00	0.00	99.59	100.00	73.59	80%	0.00	91.99
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.21	15.42	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	94.04		88.36				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

149	175	032	622131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	78.76	83.00	92.44	100.00	98.91	100.00	92.55	100%	0.75	91.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.81	16.60	9.24	10.00	9.89	25.00				
					Nilai Aspek	89.38		93.59				100.00				
150	016	032	269120	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	69.22	89.34	0.00	0.00	99.58	100.00	73.21	80%	0.00	91.51
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.38	17.87	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	84.61		94.46				100.00				
151	175	032	649682	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	Nilai	100.00	74.42	89.00	92.33	100.00	82.97	100.00	91.49	100%	0.00	91.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.16	17.80	9.23	10.00	8.30	25.00				
					Nilai Aspek	87.21		91.08				100.00				
152	030	032	049097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	88.08	75.00	0.00	0.00	99.68	100.00	73.18	80%	0.00	91.48
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.21	15.00	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	94.04		87.34				100.00				
153	009	032	690955	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	90.46	72.62	0.00	0.00	99.90	100.00	73.08	80%	0.00	91.35
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.57	14.52	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	95.23		86.26				100.00				
154	039	032	249169	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	74.43	84.09	100.00	100.00	99.21	93.64	91.31	100%	0.00	91.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.16	16.82	10.00	10.00	9.92	23.41				
					Nilai Aspek	87.22		95.83				93.64				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

155	175	032	440807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	76.46	83.86	96.00	100.00	84.23	100.00	91.26	100%	0.00	91.26
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.47	16.77	9.60	10.00	8.42	25.00				
					Nilai Aspek	88.23		91.02				100.00				
156	165	032	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	Nilai	100.00	76.19	92.78	92.00	100.00	0.00	92.86	63.84	70%	0.00	91.21
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.43	0.00	9.20	10.00	0.00	23.22				
					Nilai Aspek	88.10		100.00				92.86				
157	175	032	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	Nilai	80.00	70.16	89.53	99.30	99.55	96.75	100.00	90.99	100%	0.00	90.99
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	10.52	17.91	9.93	9.96	9.68	25.00				
					Nilai Aspek	75.08		96.28				100.00				
158	175	032	449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	67.79	92.35	92.34	99.38	94.68	97.60	91.68	100%	0.75	90.93
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.17	18.47	9.23	9.94	9.47	24.40				
					Nilai Aspek	83.90		94.69				97.60				
159	050	032	319098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	69.78	90.81	0.00	0.00	0.00	100.00	63.63	70%	0.00	90.90
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.47	18.16	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	84.89		90.81				100.00				
160	012	032	690934	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	86.56	73.40	0.00	0.00	100.00	100.00	72.66	80%	0.00	90.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.98	14.68	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.28		86.70				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

161	042	032	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	Nilai	80.00	87.15	88.25	95.33	94.64	90.58	99.17	91.57	100%	1.00	90.57
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	13.07	17.65	9.53	9.46	9.06	24.79				
					Nilai Aspek	83.58		92.20				99.17				
162	030	032	690928	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	83.95	71.69	0.00	0.00	99.52	100.00	71.88	80%	0.00	89.85
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.59	14.34	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	91.98		85.61				100.00				
163	066	032	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	75.04	87.75	94.00	90.00	90.75	93.64	89.69	100%	0.00	89.69
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.26	17.55	9.40	9.00	9.07	23.41				
					Nilai Aspek	87.52		90.62				93.64				
164	049	032	179113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	55.91	91.01	0.00	0.00	99.86	100.00	71.57	80%	0.00	89.47
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.39	18.20	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	77.96		95.44				100.00				
165	030	032	049033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	73.84	80.51	0.00	0.00	93.67	100.00	71.55	80%	0.00	89.43
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.08	16.10	0.00	0.00	9.37	25.00				
					Nilai Aspek	86.92		87.09				100.00				
166	175	032	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	Nilai	80.00	83.50	83.03	92.35	92.42	93.20	100.00	89.93	100%	0.75	89.18
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	12.53	16.61	9.24	9.24	9.32	25.00				
					Nilai Aspek	81.75		90.25				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

167	061	032	690990	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	64.31	89.08	0.00	0.00	88.51	100.00	71.31	80%	0.00	89.14
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.65	17.82	0.00	0.00	8.85	25.00				
					Nilai Aspek	82.16		88.80				100.00				
168	015	032	309039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	64.14	88.83	0.00	0.00	0.00	100.00	62.39	70%	0.00	89.12
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.62	17.77	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	82.07		88.83				100.00				
169	017	032	129123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	60.54	74.70	100.00	100.00	100.00	100.00	89.02	100%	0.00	89.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.08	14.94	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	80.27		93.68				100.00				
170	175	032	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	37.31	97.60	96.62	99.64	92.31	100.00	88.97	100%	0.00	88.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.60	19.52	9.66	9.96	9.23	25.00				
					Nilai Aspek	68.66		96.54				100.00				
171	038	032	239067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	71.69	77.00	0.00	0.00	97.68	100.00	70.92	80%	0.00	88.65
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.75	15.40	0.00	0.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	85.85		87.34				100.00				
172	020	032	690952	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	75.79	71.97	0.00	0.00	100.00	100.00	70.76	80%	0.00	88.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.37	14.39	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.90		85.99				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

173	012	032	109131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	77.48	70.50	0.00	0.00	100.00	100.00	70.72	80%	0.00	88.40
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.62	14.10	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.74		85.25				100.00				
174	061	032	215141	STASIUN PSDKP AMBON	Nilai	100.00	59.50	75.30	98.67	100.00	97.85	99.06	88.40	100%	0.00	88.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.93	15.06	9.87	10.00	9.79	24.76				
					Nilai Aspek	79.75		92.96				99.06				
175	051	032	690987	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	79.91	74.00	0.00	0.00	0.00	100.00	61.79	70%	0.00	88.27
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.99	14.80	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	89.96		74.00				100.00				
176	134	032	691010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	83.49	65.96	0.00	0.00	97.82	100.00	70.50	80%	0.00	88.12
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.52	13.19	0.00	0.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	91.75		81.89				100.00				
177	009	032	329088	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	73.56	70.67	0.00	0.00	100.00	100.00	70.17	80%	0.00	87.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.03	14.13	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	86.78		85.34				100.00				
178	084	032	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	Nilai	100.00	60.55	73.58	95.20	100.00	93.12	99.87	87.60	100%	0.00	87.60
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.08	14.72	9.52	10.00	9.31	24.97				
					Nilai Aspek	80.28		90.47				99.87				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

179	020	032	691073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	74.72	68.77	0.00	0.00	100.00	100.00	69.96	80%	0.00	87.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.21	13.75	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.36		84.39				100.00				
180	185	032	690958	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	60.00	86.06	0.00	0.00	0.00	100.00	61.21	70%	0.00	87.45
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.00	17.21	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	80.00		86.06				100.00				
181	066	032	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	Nilai	100.00	90.91	50.00	100.00	100.00	0.00	100.00	78.64	90%	0.00	87.37
					Bobot	10	15	20	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.46		83.33				100.00				
182	178	032	691078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	66.29	62.43	100.00	100.00	97.97	100.00	87.23	100%	0.00	87.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.94	12.49	10.00	10.00	9.80	25.00				
					Nilai Aspek	83.15		90.10				100.00				
183	042	032	691020	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	71.24	69.17	0.00	0.00	100.00	100.00	69.52	80%	0.00	86.90
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.69	13.83	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	85.62		84.59				100.00				
184	009	032	691038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	66.43	72.69	0.00	0.00	99.78	100.00	69.48	80%	0.00	86.85
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.96	14.54	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	83.22		86.24				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

185	017	032	129124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	62.35	60.55	100.00	100.00	100.00	100.00	86.46	100%	0.00	86.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.35	12.11	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.18		90.14				100.00				
186	185	032	691079	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	69.38	78.39	0.00	0.00	0.00	97.50	60.46	70%	0.00	86.37
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.41	15.68	0.00	0.00	0.00	24.38				
					Nilai Aspek	84.69		78.39				97.50				
187	185	032	691247	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	94.11	50.00	0.00	0.00	99.56	100.00	69.07	80%	0.00	86.34
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.12	10.00	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	97.06		74.78				100.00				
188	134	032	039163	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	50.64	81.82	100.00	100.00	73.45	100.00	86.31	100%	0.00	86.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.60	16.36	10.00	10.00	7.35	25.00				
					Nilai Aspek	75.32		88.82				100.00				
189	038	032	691068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	71.43	76.48	0.00	0.00	99.61	92.22	69.03	80%	0.00	86.28
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.71	15.30	0.00	0.00	9.96	23.06				
					Nilai Aspek	85.72		88.05				92.22				
190	008	032	691054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	72.89	69.19	0.00	0.00	91.39	100.00	68.91	80%	0.00	86.14
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.93	13.84	0.00	0.00	9.14	25.00				
					Nilai Aspek	86.45		80.29				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

191	030	032	049098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	66.70	68.90	0.00	0.00	100.00	100.00	68.79	80%	0.00	85.98
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.01	13.78	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.35		84.45				100.00				
192	012	032	690979	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	70.83	65.79	0.00	0.00	99.56	100.00	68.74	80%	0.00	85.92
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.62	13.16	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	85.42		82.68				100.00				
193	042	032	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	Nilai	100.00	90.91	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	68.64	80%	0.00	85.80
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	10.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.46		75.00				100.00				
194	020	032	299391	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	62.60	71.22	0.00	0.00	100.00	100.00	68.63	80%	0.00	85.79
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.39	14.24	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.30		85.61				100.00				
195	134	032	039017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	77.45	65.74	0.00	0.00	88.52	100.00	68.62	80%	0.00	85.77
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.62	13.15	0.00	0.00	8.85	25.00				
					Nilai Aspek	88.73		77.13				100.00				
196	015	032	309170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	64.61	69.81	0.00	0.00	99.51	100.00	68.60	80%	0.00	85.76
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.69	13.96	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	82.31		84.66				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

197	012	032	691055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	73.42	65.19	0.00	0.00	95.22	100.00	68.57	80%	0.00	85.72
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.01	13.04	0.00	0.00	9.52	25.00				
					Nilai Aspek	86.71		80.21				100.00				
198	175	032	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	50.00	76.21	80.95	94.00	99.24	100.00	98.89	86.67	100%	1.00	85.67
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	5.00	11.43	16.19	9.40	9.92	10.00	24.72				
					Nilai Aspek	63.11		93.55				98.89				
199	134	032	039164	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	80.28	65.16	0.00	0.00	84.11	100.00	68.49	80%	0.00	85.61
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.04	13.03	0.00	0.00	8.41	25.00				
					Nilai Aspek	90.14		74.64				100.00				
200	061	032	219030	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	45.45	100.00	0.00	0.00	66.28	100.00	68.45	80%	0.00	85.56
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.82	20.00	0.00	0.00	6.63	25.00				
					Nilai Aspek	72.73		83.14				100.00				
201	123	032	079136	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	48.05	81.56	0.00	0.00	99.24	100.00	68.44	80%	0.00	85.55
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.21	16.31	0.00	0.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	74.03		90.40				100.00				
202	017	032	691019	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	61.81	70.43	0.00	0.00	100.00	100.00	68.36	80%	0.00	85.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.27	14.09	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	80.91		85.22				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

203	045	032	159118	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	46.48	67.29	100.00	100.00	100.00	100.00	85.43	100%	0.00	85.43
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.97	13.46	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	73.24		91.82				100.00				
204	063	032	259038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	73.75	69.72	0.00	0.00	83.34	100.00	68.34	80%	0.00	85.43
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.06	13.94	0.00	0.00	8.33	25.00				
					Nilai Aspek	86.88		76.53				100.00				
205	038	032	239139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	42.97	68.99	100.00	100.00	100.00	100.00	85.24	100%	0.00	85.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.45	13.80	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	71.49		92.25				100.00				
206	020	032	690997	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	54.56	75.00	0.00	0.00	99.87	100.00	68.17	80%	0.00	85.21
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.18	15.00	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	77.28		87.44				100.00				
207	020	032	691035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	64.06	67.70	0.00	0.00	100.00	100.00	68.15	80%	0.00	85.19
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.61	13.54	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	82.03		83.85				100.00				
208	037	032	691029	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	62.38	69.35	0.00	0.00	99.17	100.00	68.14	80%	0.00	85.18
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.36	13.87	0.00	0.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	81.19		84.26				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

209	017	032	129034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	52.43	75.00	0.00	0.00	99.49	100.00	67.81	80%	0.00	84.77
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.86	15.00	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	76.22		87.25				100.00				
210	017	032	690981	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	54.01	75.00	0.00	0.00	92.81	100.00	67.38	80%	0.00	84.23
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.10	15.00	0.00	0.00	9.28	25.00				
					Nilai Aspek	77.01		83.91				100.00				
211	037	032	690991	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	65.13	63.01	0.00	0.00	100.00	100.00	67.37	80%	0.00	84.21
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.77	12.60	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	82.57		81.51				100.00				
212	061	032	219098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	55.22	83.34	0.00	0.00	93.26	92.22	67.33	80%	0.00	84.17
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.28	16.67	0.00	0.00	9.33	23.06				
					Nilai Aspek	77.61		88.30				92.22				
213	051	032	189143	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	64.19	71.95	0.00	0.00	0.00	99.49	58.89	70%	0.00	84.13
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.63	14.39	0.00	0.00	0.00	24.87				
					Nilai Aspek	82.10		71.95				99.49				
214	136	032	199138	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	37.49	67.53	100.00	100.00	99.84	100.00	84.11	100%	0.00	84.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.62	13.51	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	68.75		91.84				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

215	009	032	691000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	49.54	73.72	0.00	0.00	100.00	100.00	67.18	80%	0.00	83.97
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.43	14.74	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	74.77		86.86				100.00				
216	185	032	632335	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	52.13	79.37	0.00	0.00	0.00	100.00	58.69	70%	0.00	83.85
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.82	15.87	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	76.07		79.37				100.00				
217	046	032	169124	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	37.06	82.98	0.00	0.00	99.11	100.00	67.07	80%	0.00	83.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.56	16.60	0.00	0.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	68.53		91.05				100.00				
218	037	032	690946	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	52.49	71.13	0.00	0.00	98.73	100.00	66.97	80%	0.00	83.72
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.87	14.23	0.00	0.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	76.25		84.93				100.00				
219	039	032	690993	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	50.04	74.59	0.00	0.00	95.00	100.00	66.92	80%	0.00	83.66
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.51	14.92	0.00	0.00	9.50	25.00				
					Nilai Aspek	75.02		84.80				100.00				
220	123	032	079137	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	65.61	62.00	0.00	0.00	95.83	100.00	66.82	80%	0.00	83.53
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.84	12.40	0.00	0.00	9.58	25.00				
					Nilai Aspek	82.81		78.92				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

221	016	032	690950	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	48.00	73.85	0.00	0.00	98.19	100.00	66.79	80%	0.00	83.49
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.20	14.77	0.00	0.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	74.00		86.02				100.00				
222	062	032	691072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	54.04	68.28	0.00	0.00	100.00	100.00	66.76	80%	0.00	83.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.11	13.66	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.02		84.14				100.00				
223	038	032	691030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.50	70.93	0.00	0.00	100.00	100.00	66.76	80%	0.00	83.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.58	14.19	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.25		85.47				100.00				
224	063	032	691070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	64.36	71.62	0.00	0.00	76.86	100.00	66.66	80%	0.00	83.33
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.65	14.32	0.00	0.00	7.69	25.00				
					Nilai Aspek	82.18		74.24				100.00				
225	060	032	209117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	46.03	80.05	100.00	100.00	99.64	81.55	83.27	100%	0.00	83.27
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.90	16.01	10.00	10.00	9.96	20.39				
					Nilai Aspek	73.02		94.92				81.55				
226	016	032	269121	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.58	69.33	0.00	0.00	99.89	100.00	66.44	80%	0.00	83.05
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.59	13.87	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	75.29		84.61				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

227	039	032	249170	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	60.32	61.96	0.00	0.00	99.53	100.00	66.39	80%	0.00	82.99
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.05	12.39	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	80.16		80.75				100.00				
228	062	032	691034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.12	69.20	0.00	0.00	100.00	100.00	66.36	80%	0.00	82.95
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.52	13.84	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.06		84.60				100.00				
229	123	032	691052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	60.69	64.05	0.00	0.00	93.78	100.00	66.29	80%	0.00	82.86
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.10	12.81	0.00	0.00	9.38	25.00				
					Nilai Aspek	80.35		78.92				100.00				
230	039	032	249086	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	60.02	79.63	0.00	0.00	62.95	100.00	66.22	80%	0.00	82.78
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.00	15.93	0.00	0.00	6.30	25.00				
					Nilai Aspek	80.01		71.29				100.00				
231	051	032	691063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	63.77	66.59	0.00	0.00	0.00	100.00	57.88	70%	0.00	82.69
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.57	13.32	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.89		66.59				100.00				
232	017	032	690936	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	57.74	62.19	0.00	0.00	99.98	100.00	66.10	80%	0.00	82.62
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.66	12.44	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	78.87		81.09				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

233	178	032	691002	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	46.09	70.87	0.00	0.00	100.00	100.00	66.09	80%	0.00	82.61
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.91	14.17	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	73.05		85.44				100.00				
234	063	032	690949	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	37.46	91.96	0.00	0.00	70.10	100.00	66.02	80%	0.00	82.53
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.62	18.39	0.00	0.00	7.01	25.00				
					Nilai Aspek	68.73		81.03				100.00				
235	178	032	690957	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	47.79	69.89	0.00	0.00	97.58	100.00	65.90	80%	0.00	82.38
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.17	13.98	0.00	0.00	9.76	25.00				
					Nilai Aspek	73.90		83.74				100.00				
236	062	032	289028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	44.71	70.93	0.00	0.00	100.00	100.00	65.89	80%	0.00	82.37
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.71	14.19	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	72.36		85.47				100.00				
237	008	032	690978	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	41.57	72.29	0.00	0.00	100.00	100.00	65.69	80%	0.00	82.12
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.24	14.46	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	70.79		86.15				100.00				
238	123	032	690976	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	53.65	63.38	0.00	0.00	99.58	100.00	65.68	80%	0.00	82.10
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.05	12.68	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	76.83		81.48				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

239	038	032	690947	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	37.15	75.83	0.00	0.00	98.90	100.00	65.63	80%	0.00	82.04
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.57	15.17	0.00	0.00	9.89	25.00				
					Nilai Aspek	68.58		87.37				100.00				
240	049	032	690941	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	44.22	70.03	0.00	0.00	99.78	100.00	65.62	80%	0.00	82.02
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.63	14.01	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	72.11		84.91				100.00				
241	001	032	069145	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	35.57	81.48	0.00	0.00	89.65	100.00	65.60	80%	0.00	82.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.34	16.30	0.00	0.00	8.97	25.00				
					Nilai Aspek	67.79		85.57				100.00				
242	134	032	690972	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	69.40	57.95	0.00	0.00	85.51	100.00	65.55	80%	0.00	81.94
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.41	11.59	0.00	0.00	8.55	25.00				
					Nilai Aspek	84.70		71.73				100.00				
243	061	032	219099	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	45.64	77.87	0.00	0.00	80.26	100.00	65.45	80%	0.00	81.81
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.85	15.57	0.00	0.00	8.03	25.00				
					Nilai Aspek	72.82		79.07				100.00				
244	061	032	690945	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	31.96	88.57	0.00	0.00	78.71	100.00	65.38	80%	0.00	81.72
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.79	17.71	0.00	0.00	7.87	25.00				
					Nilai Aspek	65.98		83.64				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

245	030	032	690973	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	39.42	72.10	0.00	0.00	100.00	100.00	65.33	80%	0.00	81.67
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.91	14.42	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	69.71		86.05				100.00				
246	015	032	690998	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	47.30	75.32	0.00	0.00	0.00	100.00	57.16	70%	0.00	81.66
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.10	15.06	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	73.65		75.32				100.00				
247	038	032	690992	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	46.07	67.01	0.00	0.00	100.00	100.00	65.31	80%	0.00	81.64
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.91	13.40	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	73.04		83.51				100.00				
248	045	032	690984	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	43.57	68.93	0.00	0.00	99.36	100.00	65.26	80%	0.00	81.57
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.54	13.79	0.00	0.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	71.79		84.15				100.00				
249	039	032	691069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	60.17	56.26	0.00	0.00	99.45	100.00	65.22	80%	0.00	81.53
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.03	11.25	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	80.09		77.86				100.00				
250	095	032	690971	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	35.95	74.41	0.00	0.00	99.43	100.00	65.22	80%	0.00	81.52
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.39	14.88	0.00	0.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	67.98		86.92				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

251	039	032	691031	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	58.05	61.62	0.00	0.00	91.11	100.00	65.14	80%	0.00	81.43
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.71	12.32	0.00	0.00	9.11	25.00				
					Nilai Aspek	79.03		76.37				100.00				
252	037	032	229110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	52.06	60.92	0.00	0.00	100.00	100.00	64.99	80%	0.00	81.24
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.81	12.18	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	76.03		80.46				100.00				
253	051	032	189036	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	45.62	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	56.84	70%	0.00	81.20
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.84	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	72.81		75.00				100.00				
254	037	032	229111	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	54.78	58.18	0.00	0.00	100.00	100.00	64.85	80%	0.00	81.07
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.22	11.64	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.39		79.09				100.00				
255	015	032	690953	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	43.69	65.48	0.00	0.00	100.00	100.00	64.65	80%	0.00	80.81
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.55	13.10	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	71.85		82.74				100.00				
256	065	032	330094	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	54.55	75.00	0.00	0.00	64.46	100.00	64.63	80%	0.00	80.79
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.18	15.00	0.00	0.00	6.45	25.00				
					Nilai Aspek	77.28		69.73				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

257	001	032	069146	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	36.95	72.99	0.00	0.00	94.66	100.00	64.61	80%	0.00	80.76
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.54	14.60	0.00	0.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	68.48		83.83				100.00				
258	017	032	691057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	36.76	72.90	0.00	0.00	95.00	100.00	64.59	80%	0.00	80.74
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.51	14.58	0.00	0.00	9.50	25.00				
					Nilai Aspek	68.38		83.95				100.00				
259	060	032	690944	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	37.89	71.88	0.00	0.00	94.68	100.00	64.53	80%	0.00	80.66
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.68	14.38	0.00	0.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	68.95		83.28				100.00				
260	175	032	691046	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	42.68	72.22	0.00	0.00	86.69	100.00	64.52	80%	0.00	80.64
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.40	14.44	0.00	0.00	8.67	25.00				
					Nilai Aspek	71.34		79.46				100.00				
261	136	032	691026	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	40.07	70.46	0.00	0.00	93.33	100.00	64.44	80%	0.00	80.54
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.01	14.09	0.00	0.00	9.33	25.00				
					Nilai Aspek	70.04		81.90				100.00				
262	060	032	691065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	38.60	73.67	0.00	0.00	88.93	100.00	64.42	80%	0.00	80.52
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.79	14.73	0.00	0.00	8.89	25.00				
					Nilai Aspek	69.30		81.30				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

263	014	032	119142	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	27.88	56.69	100.00	100.00	100.00	100.00	80.52	100%	0.00	80.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.18	11.34	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.94		89.17				100.00				
264	062	032	289113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	28.40	75.00	0.00	0.00	100.00	100.00	64.26	80%	0.00	80.33
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.26	15.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.20		87.50				100.00				
265	042	032	690937	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	46.46	61.91	0.00	0.00	98.81	100.00	64.23	80%	0.00	80.29
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.97	12.38	0.00	0.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	73.23		80.36				100.00				
266	175	032	019062	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	41.50	69.28	0.00	0.00	91.51	100.00	64.23	80%	0.00	80.29
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.23	13.86	0.00	0.00	9.15	25.00				
					Nilai Aspek	70.75		80.40				100.00				
267	049	032	691062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	32.33	71.79	0.00	0.00	100.00	100.00	64.21	80%	0.00	80.26
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.85	14.36	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	66.17		85.90				100.00				
268	175	032	690970	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	42.23	73.18	0.00	0.00	82.01	100.00	64.17	80%	0.00	80.21
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.33	14.64	0.00	0.00	8.20	25.00				
					Nilai Aspek	71.12		77.60				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

269	136	032	690988	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	35.30	72.25	0.00	0.00	92.63	100.00	64.01	80%	0.00	80.01
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.30	14.45	0.00	0.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	67.65		82.44				100.00				
270	178	032	340151	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	36.77	67.33	0.00	0.00	100.00	100.00	63.98	80%	0.00	79.98
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.52	13.47	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	68.39		83.67				100.00				
271	061	032	691066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	49.94	63.52	0.00	0.00	87.17	100.00	63.91	80%	0.00	79.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.49	12.70	0.00	0.00	8.72	25.00				
					Nilai Aspek	74.97		75.35				100.00				
272	012	032	109132	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	36.89	72.59	0.00	0.00	88.52	100.00	63.90	80%	0.00	79.88
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.53	14.52	0.00	0.00	8.85	25.00				
					Nilai Aspek	68.45		80.56				100.00				
273	062	032	289112	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	30.29	71.81	0.00	0.00	100.00	100.00	63.91	80%	0.00	79.88
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.54	14.36	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.15		85.91				100.00				
274	030	032	691011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	41.96	62.95	0.00	0.00	100.00	100.00	63.88	80%	0.00	79.86
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.29	12.59	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	70.98		81.48				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

275	095	032	029090	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	29.11	75.00	0.00	0.00	94.82	100.00	63.85	80%	0.00	79.81
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.37	15.00	0.00	0.00	9.48	25.00				
					Nilai Aspek	64.56		84.91				100.00				
276	014	032	690935	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	38.39	64.23	0.00	0.00	100.00	100.00	63.60	80%	0.00	79.51
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.76	12.85	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	69.20		82.12				100.00				
277	062	032	690996	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	31.68	69.20	0.00	0.00	100.00	100.00	63.59	80%	0.00	79.49
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.75	13.84	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.84		84.60				100.00				
278	008	032	691016	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	33.86	67.19	0.00	0.00	99.91	100.00	63.51	80%	0.00	79.39
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.08	13.44	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	66.93		83.55				100.00				
279	051	032	189144	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	36.47	67.29	0.00	0.00	95.57	100.00	63.49	80%	0.00	79.36
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.47	13.46	0.00	0.00	9.56	25.00				
					Nilai Aspek	68.24		81.43				100.00				
280	050	032	691037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	48.15	66.42	0.00	0.00	0.00	100.00	55.51	70%	0.00	79.30
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.22	13.28	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	74.08		66.42				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

281	136	032	199137	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	51.22	76.14	100.00	100.00	96.22	66.85	79.25	100%	0.00	79.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.68	15.23	10.00	10.00	9.62	16.71				
					Nilai Aspek	75.61		93.09				66.85				
282	001	032	690930	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	40.93	64.94	0.00	0.00	92.34	100.00	63.36	80%	0.00	79.20
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.14	12.99	0.00	0.00	9.23	25.00				
					Nilai Aspek	70.47		78.64				100.00				
283	014	032	691018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	39.24	62.04	0.00	0.00	100.00	100.00	63.29	80%	0.00	79.12
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.89	12.41	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	69.62		81.02				100.00				
284	014	032	119114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	37.93	65.90	0.00	0.00	93.58	100.00	63.23	80%	0.00	79.03
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.69	13.18	0.00	0.00	9.36	25.00				
					Nilai Aspek	68.97		79.74				100.00				
285	001	032	691013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	36.04	68.35	0.00	0.00	91.22	100.00	63.20	80%	0.00	79.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.41	13.67	0.00	0.00	9.12	25.00				
					Nilai Aspek	68.02		79.79				100.00				
286	042	032	690982	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	71.32	66.87	0.00	0.00	84.86	82.50	63.18	80%	0.00	78.98
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.70	13.37	0.00	0.00	8.49	20.63				
					Nilai Aspek	85.66		75.87				82.50				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

287	042	032	139139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	35.37	64.34	0.00	0.00	100.00	100.00	63.17	80%	0.00	78.97
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.31	12.87	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	67.69		82.17				100.00				
288	010	032	690977	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	34.22	64.84	0.00	0.00	100.00	100.00	63.10	80%	0.00	78.88
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.13	12.97	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	67.11		82.42				100.00				
289	008	032	099326	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	35.17	64.28	0.00	0.00	99.72	100.00	63.10	80%	0.00	78.88
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.28	12.86	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	67.59		82.00				100.00				
290	050	032	690954	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	48.34	64.57	0.00	0.00	0.00	100.00	55.17	70%	0.00	78.81
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.25	12.91	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	74.17		64.57				100.00				
291	014	032	119038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	35.19	74.16	0.00	0.00	0.00	100.00	55.11	70%	0.00	78.73
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.28	14.83	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	67.60		74.16				100.00				
292	060	032	690989	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	27.59	69.98	0.00	0.00	98.40	100.00	62.97	80%	0.00	78.72
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.14	14.00	0.00	0.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	63.80		84.19				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

293	123	032	691014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	46.17	55.22	0.00	0.00	99.96	100.00	62.97	80%	0.00	78.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.93	11.04	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	73.09		77.59				100.00				
294	095	032	690926	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	36.75	65.39	0.00	0.00	93.54	100.00	62.94	80%	0.00	78.68
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.51	13.08	0.00	0.00	9.35	25.00				
					Nilai Aspek	68.38		79.47				100.00				
295	020	032	299396	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	25.99	69.82	0.00	0.00	100.00	100.00	62.86	80%	0.00	78.58
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.90	13.96	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.00		84.91				100.00				
296	134	032	690927	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	56.86	57.27	0.00	0.00	0.00	100.00	54.98	70%	0.00	78.55
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.53	11.45	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	78.43		57.27				100.00				
297	062	032	690951	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	18.93	75.00	0.00	0.00	100.00	100.00	62.84	80%	0.00	78.55
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.84	15.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	59.47		87.50				100.00				
298	063	032	690994	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	19.83	74.02	0.00	0.00	100.00	100.00	62.78	80%	0.00	78.47
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.97	14.80	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	59.92		87.01				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

299	049	032	691024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	25.03	69.86	0.00	0.00	99.98	100.00	62.72	80%	0.00	78.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.75	13.97	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	62.52		84.92				100.00				
300	050	032	690999	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	32.26	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.84	70%	0.00	78.34
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.84	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	66.13		75.00				100.00				
301	015	032	691036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	30.73	65.22	0.00	0.00	100.00	100.00	62.65	80%	0.00	78.32
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.61	13.04	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.37		82.61				100.00				
302	001	032	690975	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	32.33	63.90	0.00	0.00	99.85	100.00	62.61	80%	0.00	78.27
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.85	12.78	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	66.17		81.87				100.00				
303	063	032	691032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	29.39	65.78	0.00	0.00	100.00	100.00	62.56	80%	0.00	78.21
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.41	13.16	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.70		82.89				100.00				
304	175	032	691008	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	45.77	55.39	0.00	0.00	95.99	100.00	62.54	80%	0.00	78.18
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.87	11.08	0.00	0.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	72.89		75.69				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

305	185	032	691041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	48.83	61.91	0.00	0.00	0.00	100.00	54.71	70%	0.00	78.15
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.32	12.38	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	74.42		61.91				100.00				
306	065	032	691001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	24.98	75.00	0.00	0.00	87.43	100.00	62.49	80%	0.00	78.11
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.75	15.00	0.00	0.00	8.74	25.00				
					Nilai Aspek	62.49		81.22				100.00				
307	030	032	691049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	33.59	62.61	0.00	0.00	98.96	100.00	62.46	80%	0.00	78.07
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.04	12.52	0.00	0.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	66.80		80.79				100.00				
308	010	032	690932	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	34.42	62.42	0.00	0.00	97.94	100.00	62.44	80%	0.00	78.05
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.16	12.48	0.00	0.00	9.79	25.00				
					Nilai Aspek	67.21		80.18				100.00				
309	014	032	690980	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	36.90	60.88	0.00	0.00	97.15	100.00	62.43	80%	0.00	78.03
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.54	12.18	0.00	0.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	68.45		79.02				100.00				
310	185	032	691003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	32.59	73.26	0.00	0.00	0.00	100.00	54.54	70%	0.00	77.92
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.89	14.65	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	66.30		73.26				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

311	045	032	691022	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	43.79	55.62	0.00	0.00	94.83	100.00	62.18	80%	0.00	77.72
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.57	11.12	0.00	0.00	9.48	25.00				
					Nilai Aspek	71.90		75.23				100.00				
312	010	032	691053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	32.47	61.09	0.00	0.00	99.56	100.00	62.04	80%	0.00	77.56
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.87	12.22	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	66.24		80.33				100.00				
313	037	032	691067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	52.06	50.09	0.00	0.00	98.47	96.11	61.70	80%	0.00	77.13
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.81	10.02	0.00	0.00	9.85	24.03				
					Nilai Aspek	76.03		74.28				96.11				
314	051	032	690942	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	29.96	72.36	0.00	0.00	0.00	100.00	53.97	70%	0.00	77.09
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.49	14.47	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.98		72.36				100.00				
315	009	032	691076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	35.13	58.16	0.00	0.00	97.60	100.00	61.66	80%	0.00	77.08
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.27	11.63	0.00	0.00	9.76	25.00				
					Nilai Aspek	67.57		77.88				100.00				
316	016	032	691033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	26.06	66.44	0.00	0.00	93.71	100.00	61.57	80%	0.00	76.96
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.91	13.29	0.00	0.00	9.37	25.00				
					Nilai Aspek	63.03		80.08				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

317	135	032	690974	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	38.77	55.45	0.00	0.00	95.05	100.00	61.41	80%	0.00	76.76
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.82	11.09	0.00	0.00	9.51	25.00				
					Nilai Aspek	69.39		75.25				100.00				
318	045	032	691060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	20.56	66.84	0.00	0.00	99.12	100.00	61.36	80%	0.00	76.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.08	13.37	0.00	0.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	60.28		82.98				100.00				
319	046	032	691023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	31.13	58.24	0.00	0.00	100.00	100.00	61.32	80%	0.00	76.65
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.67	11.65	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.57		79.12				100.00				
320	014	032	691056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	31.08	63.77	0.00	0.00	88.79	100.00	61.30	80%	0.00	76.62
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.66	12.75	0.00	0.00	8.88	25.00				
					Nilai Aspek	65.54		76.28				100.00				
321	016	032	691071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	14.03	73.81	0.00	0.00	94.08	100.00	61.27	80%	0.00	76.59
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.10	14.76	0.00	0.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek	57.02		83.95				100.00				
322	178	032	691040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	27.90	60.46	0.00	0.00	99.83	100.00	61.26	80%	0.00	76.58
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.19	12.09	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	63.95		80.15				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

323	015	032	309171	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	22.11	64.69	0.00	0.00	100.00	100.00	61.25	80%	0.00	76.57
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.32	12.94	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	61.06		82.35				100.00				
324	135	032	690929	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	29.48	59.17	0.00	0.00	100.00	100.00	61.26	80%	0.00	76.57
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.42	11.83	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.74		79.59				100.00				
325	134	032	691048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	57.56	49.18	0.00	0.00	77.64	100.00	61.23	80%	0.00	76.54
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.63	9.84	0.00	0.00	7.76	25.00				
					Nilai Aspek	78.78		63.41				100.00				
326	135	032	059191	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	28.55	59.20	0.00	0.00	100.00	100.00	61.12	80%	0.00	76.40
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.28	11.84	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.28		79.60				100.00				
327	050	032	691075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	36.94	58.56	0.00	0.00	87.02	100.00	60.96	80%	0.00	76.19
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.54	11.71	0.00	0.00	8.70	25.00				
					Nilai Aspek	68.47		72.79				100.00				
328	065	032	691077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	28.27	69.19	0.00	0.00	78.22	100.00	60.90	80%	0.00	76.13
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.24	13.84	0.00	0.00	7.82	25.00				
					Nilai Aspek	64.14		73.71				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

329	123	032	690931	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	37.39	57.02	0.00	0.00	88.91	100.00	60.90	80%	0.00	76.13
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.61	11.40	0.00	0.00	8.89	25.00				
					Nilai Aspek	68.70		72.97				100.00				
330	095	032	029173	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Nilai	100.00	39.97	54.03	0.00	0.00	90.43	100.00	60.84	80%	0.00	76.06
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.00	10.81	0.00	0.00	9.04	25.00				
					Nilai Aspek	69.99		72.23				100.00				
331	175	032	019063	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	33.98	71.27	0.00	0.00	99.74	86.00	60.83	80%	0.00	76.03
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.10	14.25	0.00	0.00	9.97	21.50				
					Nilai Aspek	66.99		85.51				86.00				
332	046	032	690940	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	28.36	59.34	0.00	0.00	96.43	100.00	60.77	80%	0.00	75.96
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.25	11.87	0.00	0.00	9.64	25.00				
					Nilai Aspek	64.18		77.89				100.00				
333	015	032	691074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	21.03	63.06	0.00	0.00	99.44	100.00	60.71	80%	0.00	75.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.15	12.61	0.00	0.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	60.52		81.25				100.00				
334	010	032	089144	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	15.35	66.14	0.00	0.00	100.00	100.00	60.53	80%	0.00	75.66
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.30	13.23	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	57.68		83.07				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

335	060	032	209118	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	31.29	53.94	0.00	0.00	100.00	100.00	60.48	80%	0.00	75.60
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.69	10.79	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.65		76.97				100.00				
336	001	032	691051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	33.46	55.95	0.00	0.00	92.17	100.00	60.43	80%	0.00	75.53
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.02	11.19	0.00	0.00	9.22	25.00				
					Nilai Aspek	66.73		74.06				100.00				
337	043	032	690938	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	37.67	60.73	0.00	0.00	0.00	100.00	52.80	70%	0.00	75.42
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.65	12.15	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	68.84		60.73				100.00				
338	060	032	691027	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	20.66	62.44	0.00	0.00	97.46	100.00	60.33	80%	0.00	75.42
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.10	12.49	0.00	0.00	9.75	25.00				
					Nilai Aspek	60.33		79.95				100.00				
339	136	032	691064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	37.77	60.19	0.00	0.00	95.51	92.22	60.31	80%	0.00	75.39
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.67	12.04	0.00	0.00	9.55	23.06				
					Nilai Aspek	68.89		77.85				92.22				
340	010	032	691015	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	19.30	62.99	0.00	0.00	95.34	100.00	60.03	80%	0.00	75.03
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.90	12.60	0.00	0.00	9.53	25.00				
					Nilai Aspek	59.65		79.17				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

341	135	032	691012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	30.33	52.40	0.00	0.00	98.27	100.00	59.86	80%	0.00	74.82
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.55	10.48	0.00	0.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	65.17		75.34				100.00				
342	046	032	169125	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	27.88	52.92	0.00	0.00	100.00	100.00	59.77	80%	0.00	74.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.18	10.58	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.94		76.46				100.00				
343	010	032	089004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	18.18	60.74	0.00	0.00	98.15	100.00	59.69	80%	0.00	74.61
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.73	12.15	0.00	0.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	59.09		79.45				100.00				
344	045	032	690939	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	23.76	62.04	0.00	0.00	87.00	100.00	59.67	80%	0.00	74.59
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.56	12.41	0.00	0.00	8.70	25.00				
					Nilai Aspek	61.88		74.52				100.00				
345	065	032	339097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	12.50	69.93	0.00	0.00	87.50	100.00	59.61	80%	0.00	74.51
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	1.88	13.99	0.00	0.00	8.75	25.00				
					Nilai Aspek	56.25		78.72				100.00				
346	095	032	691047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	30.00	56.06	0.00	0.00	87.68	100.00	59.48	80%	0.00	74.35
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.50	11.21	0.00	0.00	8.77	25.00				
					Nilai Aspek	65.00		71.87				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

347	095	032	691009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	32.23	63.99	0.00	0.00	68.24	100.00	59.46	80%	0.00	74.32
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.83	12.80	0.00	0.00	6.82	25.00				
					Nilai Aspek	66.12		66.12				100.00				
348	016	032	690995	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	22.04	61.93	0.00	0.00	86.92	100.00	59.38	80%	0.00	74.23
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.31	12.39	0.00	0.00	8.69	25.00				
					Nilai Aspek	61.02		74.43				100.00				
349	061	032	691028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	32.59	63.88	0.00	0.00	65.10	100.00	59.17	80%	0.00	73.97
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.89	12.78	0.00	0.00	6.51	25.00				
					Nilai Aspek	66.30		64.49				100.00				
350	051	032	691025	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	25.79	64.16	0.00	0.00	0.00	100.00	51.70	70%	0.00	73.86
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.87	12.83	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	62.90		64.16				100.00				
351	049	032	179114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	12.50	60.30	0.00	0.00	100.00	100.00	58.94	80%	0.00	73.67
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	1.88	12.06	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	56.25		80.15				100.00				
352	042	032	691058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	32.37	56.91	0.00	0.00	76.07	100.00	58.84	80%	0.00	73.56
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.86	11.38	0.00	0.00	7.61	25.00				
					Nilai Aspek	66.19		66.49				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

353	068	032	691045	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	Nilai	100.00	29.35	60.32	0.00	0.00	0.00	100.00	51.47	70%	0.00	73.52
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.40	12.06	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.68		60.32				100.00				
354	043	032	149124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	26.56	59.72	0.00	0.00	0.00	100.00	50.93	70%	0.00	72.75
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.98	11.94	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.28		59.72				100.00				
355	045	032	159119	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	18.94	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	57.84	80%	0.00	72.30
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.84	10.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	59.47		75.00				100.00				
356	043	032	149125	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	32.03	53.88	0.00	0.00	0.00	100.00	50.58	70%	0.00	72.26
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.80	10.78	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	66.02		53.88				100.00				
357	175	032	690925	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	16.98	55.43	0.00	0.00	91.25	100.00	57.76	80%	0.00	72.20
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.55	11.09	0.00	0.00	9.13	25.00				
					Nilai Aspek	58.49		73.34				100.00				
358	046	032	169034	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	36.36	36.52	0.00	0.00	100.00	100.00	57.76	80%	0.00	72.20
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.45	7.30	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	68.18		68.26				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

359	043	032	691059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	27.71	55.98	0.00	0.00	0.00	100.00	50.35	70%	0.00	71.93
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.16	11.20	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.86		55.98				100.00				
360	135	032	059190	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	20.96	50.00	0.00	0.00	92.39	100.00	57.38	80%	0.00	71.73
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.14	10.00	0.00	0.00	9.24	25.00				
					Nilai Aspek	60.48		71.20				100.00				
361	137	032	427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Nilai	100.00	88.39	96.21	100.00	100.00	90.79	0.00	71.58	100%	0.00	71.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.26	19.24	10.00	10.00	9.08	0.00				
					Nilai Aspek	94.20		96.75				0.00				
362	022	032	645693	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG	Nilai	100.00	76.21	99.65	100.00	100.00	92.25	0.00	70.59	100%	0.00	70.59
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.43	19.93	10.00	10.00	9.23	0.00				
					Nilai Aspek	88.11		97.98				0.00				
363	113	032	691043	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNUNGAN	Nilai	100.00	22.32	52.44	0.00	0.00	74.24	100.00	56.26	80%	0.00	70.33
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.35	10.49	0.00	0.00	7.42	25.00				
					Nilai Aspek	61.16		63.34				100.00				
364	135	032	691050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	31.15	47.21	0.00	0.00	89.82	91.25	55.91	80%	1.00	68.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.67	9.44	0.00	0.00	8.98	22.81				
					Nilai Aspek	65.58		68.52				91.25				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

365	063	032	259107	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	41.57	65.93	0.00	0.00	92.86	65.00	54.96	80%	0.00	68.70
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.24	13.19	0.00	0.00	9.29	16.25				
					Nilai Aspek	70.79		79.40				65.00				
366	043	032	690983	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	32.65	62.66	0.00	0.00	0.00	82.50	48.05	70%	0.00	68.65
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.90	12.53	0.00	0.00	0.00	20.63				
					Nilai Aspek	66.33		62.66				82.50				
367	065	032	691039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	13.24	50.00	0.00	0.00	76.94	100.00	54.68	80%	0.00	68.35
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	1.99	10.00	0.00	0.00	7.69	25.00				
					Nilai Aspek	56.62		63.47				100.00				
368	175	032	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	63.48	82.25	0.00	0.00	0.00	57.22	33.83	50%	0.00	67.66
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	14.31				
					Nilai Aspek	81.74		82.25				57.22				
369	065	032	339096	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	18.18	50.00	0.00	0.00	61.36	100.00	53.86	80%	0.00	67.33
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.73	10.00	0.00	0.00	6.14	25.00				
					Nilai Aspek	59.09		55.68				100.00				
370	065	032	690956	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	12.50	50.00	0.00	0.00	69.75	100.00	53.85	80%	0.00	67.31
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	1.88	10.00	0.00	0.00	6.98	25.00				
					Nilai Aspek	56.25		59.88				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

371	043	032	691021	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	14.85	44.83	0.00	0.00	0.00	100.00	46.19	70%	0.00	65.99
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.23	8.97	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	57.43		44.83				100.00				
372	046	032	690985	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	13.58	48.93	0.00	0.00	100.00	82.50	52.45	80%	0.00	65.56
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.04	9.79	0.00	0.00	10.00	20.63				
					Nilai Aspek	56.79		74.47				82.50				
373	066	032	691042	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	Nilai	100.00	17.25	33.07	0.00	0.00	0.00	100.00	44.20	70%	0.00	63.15
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.59	6.61	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	58.63		33.07				100.00				
374	039	032	690948	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	55.73	69.12	0.00	0.00	95.50	30.00	49.23	80%	0.00	61.54
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.36	13.82	0.00	0.00	9.55	7.50				
					Nilai Aspek	77.87		82.31				30.00				
375	049	032	690986	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	14.37	70.46	0.00	0.00	100.00	47.50	48.12	80%	0.00	60.15
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.16	14.09	0.00	0.00	10.00	11.88				
					Nilai Aspek	57.19		85.23				47.50				
376	085	032	691044	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	Nilai	100.00	12.50	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00	41.88	70%	0.00	59.82
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	1.88	5.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	56.25		25.00				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

377	050	032	319099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	35.77	64.75	0.00	0.00	0.00	53.33	41.65	70%	0.00	59.50
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.37	12.95	0.00	0.00	0.00	13.33				
					Nilai Aspek	67.89		64.75				53.33				
378	042	032	139138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	55.50	55.81	0.00	0.00	99.93	30.00	46.98	80%	0.00	58.73
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.33	11.16	0.00	0.00	9.99	7.50				
					Nilai Aspek	77.75		77.87				30.00				
379	010	032	089143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	37.92	63.97	0.00	0.00	97.35	30.00	45.72	80%	0.00	57.15
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.69	12.79	0.00	0.00	9.74	7.50				
					Nilai Aspek	68.96		80.66				30.00				
380	136	032	690943	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	35.50	63.14	0.00	0.00	88.16	30.00	44.27	80%	0.00	55.34
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.33	12.63	0.00	0.00	8.82	7.50				
					Nilai Aspek	67.75		75.65				30.00				
381	063	032	259108	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	25.26	60.44	0.00	0.00	0.00	44.00	36.88	70%	0.00	52.68
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.79	12.09	0.00	0.00	0.00	11.00				
					Nilai Aspek	62.63		60.44				44.00				
382	046	032	691061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	12.50	58.14	0.00	0.00	99.58	30.00	40.96	80%	0.00	51.20
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	1.88	11.63	0.00	0.00	9.96	7.50				
					Nilai Aspek	56.25		78.86				30.00				

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Bima

Nama Unit Kerja : Stasiun KIPM Bima
Periode Laporan : Triwulan IV
Tahun : 2024

Uraian IK/IKU	TARGET 2024			REALISASI		
	Tahunan	Semester I	Triwulan III	Semester I	Triwulan III	Tahunan
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Bima	93,76	83	93,76	98,23	97,30	97,29

Uraian Capaian Indikator : Realisasi telah mencapai Target pada Triwulan IV

Mengetahui.
Kepala Stasiun KIPM Bima

Jonison Petrus

Bima, 1 Januari 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja,
Kepala Urusan Umum

Heri Purwanto



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	071	032	649814	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA	Nilai	100.00	88.56	99.10	0.00	0.00	97.31	100.00	77.84	80%	0.00	97.29
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.28	19.82	0.00	0.00	9.73	25.00				
					Nilai Aspek	94.28		98.21				100.00				

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

MEMORANDUM
NOMOR 1/ITJ.0/TU.140/I/2025

Yth. : 1. Inspektur I
2. Inspektur II
3. Inspektur III
4. Inspektur IV
5. Inspektur V

Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Hal : Laporan Hasil Rekonsiliasi Data dan Pembahasan TLRHP BPK-RI
Lingkup KKP pada Triwulan IV Tahun 2024

Lampiran : -

Tanggal : 2 Januari 2025

Sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Rekonsiliasi Data dan Pembahasan TLRHP BPK-RI Lingkup KKP pada Triwulan IV Tahun 2024 antara Inspektorat Jenderal dengan unit Eselon I dan Tim BPK RI di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 – 20 Desember 2024, bersama ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

1. Terdapat 435 rekomendasi dari semua unit Eselon I per Triwulan IV Tahun 2024 yang masih dipantau tindak lanjutnya, dan telah sesuai ditindaklanjuti sebanyak 168 rekomendasi, sehingga terdapat sisa (belum sesuai rekomendasi) sebanyak 267 rekomendasi dengan sisa nilai keuangan sebesar Rp112.536.051.462,44 Dengan rincian sebagai berikut :

Eselon I	Jumlah Rekomendasi Awal	Nilai Keuangan (Rp)			Progres TL	
		Data Sem II 2023	Tindak Lanjut	Sisa	Sesuai	Belum
Setjen	36	421.144.736,00	421.144.736,00	-	15	21
Itjen	6	23.878.250,00	23.878.250,00	-	4	2
Ditjen PKRL	44	277.148.762,52	52.494.698,00	224.654.064,52	10	34
Ditjen PT	153	119.379.197.182,16	22.675.278.632,17	96.703.918.549,99	51	102
Ditjen PB	91	11.977.003.417,76	2.489.046.453,70	9.487.956.964,06	44	47
Ditjen PDSPKP	23	3.646.371.155,02	1.651.723.641,00	1.994.647.514,02	10	13
Ditjen PSDKP	28	1.118.316.959,00	1.118.316.959,00	-	13	15
BPPSDMKP	46	5.311.470.396,85	1.186.596.027,00	4.124.874.369,85	18	28
BPPMHKP	8	11.350.000,00	11.350.000,00	-	3	5
Jumlah	435	142.165.880.859,31	29.629.829.396,87	112.536.051.462,44	168	267

2. Berdasarkan hasil telaahan Tim BPK RI pada Semester I 2024 masih terdapat beberapa rekomendasi pada masing-masing Eselon I antara lain :
 - a. Itjen : Terdapat 2 (dua) rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian yaitu

- LK 2020 temuan Pengamanan, Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Aset Tetap Tidak Tertib dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Inspektur Jenderal melakukan reviu atas semua perjanjian Kerja sama pemanfaatan BMN di lingkungan KKP dengan pihak ketiga sesuai hasil koordinasi dengan DJKN. **Telaahan BPK Tindak Lanjut Belum Sesuai. Belum ada rekapitulasi atas semua perjanjian Kerja sama pemanfaatan BMN di lingkungan KKP dan checklist PKS yang sudah direview Itjen sesuai hasil Koordinasi dengan DJKN.** Hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak lanjut untuk format matriks PKS perlu ditambahkan satu kolom link dokumen LHR dan dokumen tersebut diunggah juga di SIPTL. Adapun untuk satker yang belum direviu untuk didorong segera dilakukan reviu oleh Itjen.
 - LK 2023 temuan Pengenaan Sanksi Denda Administratif atas Pelanggaran Terhadap Pemanfaatan Ruang Laut Secara Menetap yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Terkait Pemanfaatan di Laut oleh Direktorat Jenderal PSDKP Belum Sesuai Ketentuan dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Irjen KKP supaya mereviu hasil penghitungan ulang nilai investasi PT BTIIG dan PT ANT Tbk sebagai dasar pengenaan sanksi denda administratif, serta menyampaikan hasilnya kepada BPK. **Hasil telaah Tim BPK, Belum sesuai karena masih terdapat rencana aksi yang belum dilakukan oleh KKP, diantaranya: 1) Belum terdapat Hasil Reviu Itjen KKP atas hasil perhitungan ulang nilai investasi PT BIIG dan PT ANT 2) Belum terdapat Tindak lanjut hasil reviu Itjen KKP atas hasil perhitungan ulang nilai investasi PT BIIG dan PT ANT.**
- b. Setjen : LK 2015 temuan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Tidak Sesuai Ketentuan dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk menegur secara tertulis kepada para kepala satker terkait yang tidak optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dan segera menyelesaikan permasalahan terkait aset tetap serta melakukan inventarisasi dan penilaian atas akun aset di KKP. Telaahan Tim BPK, Belum dilengkapi kertas kerja rekapitulasi hasil inventarisasi dan penilaian aset-aset di KKP sesuai kondisi temuan pada LHP BPK RI. Terkait temuan dari Tim Setjen menginformasikan bahwa proses

akuisisi tanah serta pelepasan tanah berlarut-larut, terdapat lahan petani plasma seluas 151 Ha berupa kolam tambak serta rumah tipe 36 yang telah diusulkan untuk diserahkan kepada petani. Usulan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-4934/A/2000 dengan nilai penggantian yang akan dihitung kemudian untuk dibayarkan oleh petani. Namun demikian para petani tersebut keberatan untuk membayar dikarenakan kondisi ekonomi mereka yang tidak mampu untuk membayar penggantian sehingga meminta agar pemerintah menghibahkan aset tersebut kepada petani. Bupati Karawang memfasilitasi keberatan tersebut dengan mengirimkan surat Nomor 523/4528-EK tanggal 15 Agustus 2006 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir proses pelepasan aset belum selesai.

- c. Ditjen PKRL : PDDT PNBPN 2021 temuan KKP Belum Menetapkan Ketentuan Lebih Lanjut tentang Pengenaan PNBPN PPKPRL atas Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut secara Menetap di Kawasan Perairan yang Menjadi Kewenangannya dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar membuat kesepakatan dengan Menteri LHK tentang mekanisme pengelolaan perizinan atas kegiatan pemanfaatan ruang laut di tujuh TN yang dikelola oleh KLHK. Telaahan Tim BPK, Belum ada kesepakatan dengan Menteri LHK tentang mekanisme pengelolaan perizinan atas kegiatan pemanfaatan ruang laut di tujuh TN yang dikelola oleh KLHK. Sebagai tindak lanjut dalam pembahasan prioritas dengan Tim BPK, untuk diunggah Surat Setkab Nomor B.0154/Ekon/03/2024 tanggal 8 Maret 2024, dan surat penjelasan dari Sekretaris/ Direktur PKRL bahwa kesepakatan dengan Menteri LHK tersebut sudah ada dalam Surat Setkab di atas, serta prakteknya sudah banyak izin KPRL yang terbit sesuai kesepakatan tersebut.
- d. Ditjen PSDKP : LHP Kinerja Semester I TA 2010 atas Pengadaan Kapal Pengawas, temuan Pelaksanaan Pengadaan Kapal Pengawas SDK Tidak Sesuai Kontrak Sehingga Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp113.488.980,00, dengan rekomendasi Meminta pertanggungjawaban PT CBI untuk memenuhi item barang sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak. Telaahan Tim BPK, Berdasarkan kontrak, penambahan/pengurangan harus didukung persetujuan tertulis. Pihak KKP perlu melakukan penelusuran kembali terkait persetujuan tertulis atas penambahan/pengurangan pekerjaan tersebut. Adapun hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak

lanjut untuk diajukan kembali Surat MKP kepada Auditor Utama Keuangan Negara IV Nomor B.1952/MEN-KP/XI/2023, 29 November 2023 Hal Usulan Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan alasan yang sah atas pengadaan Kapal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2009 dengan menambah penjelasan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menindaklanjuti temuan berupa surat dari Dirjen PSDKP kepada Auditor Utama Keuangan Negara IV.

- e. Ditjen Perikanan Tangkap : LHP PNBPA TA 2011-2013, temuan Terdapat tunggakan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) pada Ditjen Perikanan Tangkap per 30 Juni 2013 sebesar Rp28.876.531.364,03 dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp34.560.777.416,13 dengan rekomendasi BPK RI merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap meningkatkan upaya penagihan atas tunggakan PNBPA berikut dendanya. Hasil telaahan Tim BPK, dari sisa Rp33.373.034.871,13 telah ditindaklanjuti s.d. Semester I/2024 senilai Rp1.177.569.389,18, sehingga masih terdapat sisa tagihan tunggakan PNBPA berikut denda senilai Rp32.195.465.481,95 yang belum disetor ke Kas Negara. Belum sesuai rekomendasi, belum seluruhnya disetor ke kas negara. Adapun hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak lanjut untuk diusahakan penagihan maksimal kepada 25 kapal SIUP Aktif senilai Rp328.297.942, jika tidak ada respon penagihan yang baik maka diusulkan TPTD.
- f. BPPSDMKP : LK TA 2017, temuan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Lainnya Belum Memadai dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar Menginstruksikan Eselon I terkait memerintahkan Kepala Satker: 1) Segera menyelesaikan upaya penelusuran, inventarisasi fisik, dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung Aset Tetap yang berada dalam tanggung jawab pengelolaannya. 2) Mengajukan usulan penghapusan atas Aset Tetap dalam kondisi rusak berat sesuai dengan mekanisme. 3) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Operator SIMAK BMN yang kurang cermat kurang cermat dalam mencatat dan melaporkan nilai Aset Tetap Lainnya. Telaahan Tim BPK, Tindak Lanjut belum mencakup seluruh rekomendasi, tindak lanjut. Segera update kertas kerja monitoring dokumen TL. Kertas kerja monitoring tidak hanya merinci TL tahun berjalan, namun juga TL dari tahun sebelumnya. Adapun hasil pembahasan

prioritas dengan Tim BPK diperoleh TL masih menunggu jawaban dari Bupati Kepulauan Tanimbar atas Surat Kepala BPPSDMKP No. B.608/BRSDM/PL.750/IV/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Usulan Hibah Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Renovasi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rencana tindak lanjut memonitoring jawaban dari surat bupati, jika menerima akan dihibahkan dan jika menolak akan dihapuskan atau menyusuli surat kembali ke Sekda dan BPKAD serta Bupati Kepulauan Tanimbar.

- g. Ditjen Perikanan Budi Daya : LHP Manajemen Aset 2005-2007, temuan Pelaksanaan Ruislag Tanah Tambak Milik Ditjen Perikanan Budidaya di Desa Segoro Tambak Jatim Seluas 472.440m² Berlarut-larut dan Berpotensi Merugikan Negara Senilai Rp1.414.023.000,00 dengan rekomendasi BPK menyarankan agar Dirjen Perikanan Budidaya menginstruksikan kepada Seditjen Perikanan Budidaya untuk meneliti kembali proses ruislag tanah dimaksud, apabila dilanjutkan supaya mempertimbangkan harga tanah saat ini. Hasil telaahan Tim BPK, proses negosiasi penggantian ruislag masih berlanjut dan belum final. Adapun hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak lanjut penyelesaian ruislag agar dilanjutkan negosiasi dengan kuasa hukum PT. Semeru Cemerlang didampingi oleh Biro Hukum KKP dan untuk merevaluasi nilai ruislag tersebut dengan harga sekarang.
- h. Ditjen PDSPKP : LHP Manajemen Aset 2005-2007, temuan Pemanfaatan Barang Milik Negara Senilai Rp39.804.934.500,00 Tidak Sesuai Ketentuan dengan temuan BPK menyarankan Menteri Kelautan dan Perikanan agar mengajukan persetujuan kepada Menteri Keuangan atas pemanfaatan BMN yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dan atas persetujuan tersebut kemudian dibuat perjanjian kerjasama yang memuat klausul mengenai besarnya kontribusi tetap yang harus dibayar setiap tahun ke Kas Negara dan pembagian keuntungan hasil kerjasama serta sanksi yang jelas dan tegas apabila terjadi wanprestasi. Hasil telaahan Tim BPK, belum ada penjelasan tertulis dari eselon I terkait dan reviu Itjen atas usulan penghapusan BMN di Pasar Ikan Hias (PIH) Pejompongan. Adapun hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak lanjut untuk dilengkapi surat dari KKP ke Kemenkeu, surat balasan dari Kemenku ke KKP atas usulan hibah BMN kepada DKI Jakarta, Reviu Itjen terbaru, serta Surat Menteri Keuangan kepada Presiden Republik Indonesia nomor S-1032/MK.06/2024 tanggal 7 November

2024 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- i. BPPMHKP : LK TA 2019, temuan Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Pejabat Eselon I terkait untuk memerintahkan Kepala Satker terkait: 1) Berkoordinasi dengan KPKNL untuk melengkapi persetujuan sewa BMN pada PIM Muara Baru; 2) Melakukan Inventarisasi BMN yang tidak diketahui keberadaannya; 3) Melakukan perbaikan pencatatan dalam aplikasi SIMAK BMN atas saldo yang bernilai negatif; 4) Segera melengkapi dokumen kepemilikan atas tanah dan IMB atas bangunan; 5) Berkoordinasi dengan KPKNL untuk menghapus KDP yang dihentikan penggunaannya; dan 6) Menyelesaikan hibah BMN yang berasal dari DK dan TP pada satker inaktif. Hasil telaahan Tim BPK, Tindak Lanjut yang disampaikan berupa SK Penghapusan, sedangkan dokumen lain belum ditindaklanjuti yaitu: 1.b. Bukti Surat Persetujuan Pengelola Barang. 2.b. Bukti hasil Inventarisasi BMN yang tidak diketahui keberadaannya pada DKP Provinsi Sumatera Selatan; dan 2.c. Bukti Perbaikan pada SIMAK BMN DKP Provinsi Sumatera Selatan. 3. Perbaikan pencatatan aplikasi yg bernilai negatif (screenshot aplikasi dan nilai minusnya atau file excelnya) 4. Agar dibuatkan matriks kepemilikan tanah dan IMB 5. Matriks rincian SK penghapusan KDP yang dihentikan penggunaannya per satker 6. Matriks rincian BAST hibah untuk satker DK dan TP Sehingga belum sesuai rekomendasi. Adapun hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak lanjut untuk dibuat kertas kerja untuk IMB gedung dan bangunan (keseluruhan yg sudah, belum dan tidak bisa diterbitkan), sehingga tidak perlu diusulkan TPTD.
3. Terhadap rekapitulasi hasil rekonsiliasi data dan pembahasan TLRHP BPK-RI pada Triwulan IV Tahun 2024 disampaikan secara terlampir dan dapat diunduh pada link berikut <https://bit.ly/DataRekonTWEmpat2024> .
4. Dimohon bantuan Saudara untuk mendorong pemenuhan bukti tindak lanjut pada masing-masing mitra Eselon I, serta penyelesaian terhadap rekomendasi yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ivy Silfia Irani

Tembusan:
Inspektur Jenderal

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Nama Unit Kerja : Stasiun KIPM Bima
Periode Laporan : Triwulan IV
Tahun : 2024

No	Instansi Pemeriksa/Pengawasan	LHP	Tanggal LHP	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Yang Tuntas Ditindaklanjuti
1	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor (outstanding Kontrak 2022) di Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (SKIPM) Bima Provinsi NTB	9 November 2021	2	2
2	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Hasil Pemantauan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor Tahun 2021 Stasiun KIPM Bima	3 Januari 2022	3	3
3	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Reviu Dokumen untuk Mendukung Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan Perikanan Tahun 2021 di Stasiun KIPM Bima	27 Februari 2022	8	8

4	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Reviu Penyelesaian Pekerjaan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2021 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 Maret 2022	3	3
JUMLAH				16	16
CAPAIAN IKU ini				100%	
$\text{Perhitungan IKU} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi}}{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Telah Tuntas Ditindak Lanjuti}} \times 100\% = \frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$					

Uraian Capaian Indikator : Semua hasil pengawasan telah di tindak lanjuti

Mengetahui.
Kepala Stasiun KIPM Bima



Jonison Petrus

Bima, 1 Januari 2025
Penanggungjawab Indikator Kegiatan



Heri Purwanto



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2024 10 Desember 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pengawasan Lainnya dalam rangka
Penilaian Efektifitas Pengawasan dan Kepatuhan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
Tahun 2024 lingkup BPPMHKP

Yth. Sekretaris BPPMHKP
di Jakarta

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan Pengawasan Lainnya dalam rangka Penilaian Efektivitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), sebagaimana Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor B.485/ITJ.4/KP.440/XI/ 2024, tanggal 28 November 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. Penilaian Efektivitas Pengawasan PBJ Tahun 2024 lingkup BPPMHKP dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 6 Desember 2024, terhadap 3 (tiga) komponen, dan memperoleh **nilai 91,98%** dari maksimum 100%. Hasil penilaian tersebut telah melebihi target Indikator Kinerja (IK) 8 pada Perjanjian Kinerja (PK) Itjen KKP Tahun 2024 yaitu Tingkat Efektifitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP, serta IK 7 pada PK Inspektorat IV Tahun 2024 yaitu Tingkat Efektifitas Pengawasan PBJ lingkup Mitra Inspektorat IV, dengan target masing-masing sebesar 82%. Rincian penilaian efektifitas pelaksanaan pengawasan PBJ disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Kualitas Perencanaan Pengawasan	20	20,00
2	Kualitas Pelaksanaan Pengawasan	40	40,00
3	Nilai Rata-rata Tingkat kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP	40	31,98
Hasil Penilaian		100	91,98

Rincian Lembar Kerja Penilaian pada Tabel 1 terdapat pada Lampiran 1.

2. Penilaian Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024 sebesar **84,34%** dari maksimum 100%. Nilai tersebut telah melebihi target pada PK BPPMHKP Tahun 2024, yaitu pada IK 28, dengan target 80%. Rincian penilaian kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis BPPMHKP	10	10,00
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15	13,75
3	Persentase Pemilihan PBJ yang Dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE)	10	10,00
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45	31,84
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5	3,75
6	Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP pada Triwulan I s.d. III Tahun 2023	15	15,00
Hasil Penilaian		100	84,34

Rincian Lembar Kerja Penilaian pada Tabel 2 terdapat pada Lampiran 2.

Meskipun telah melebihi target IK pada PK, namun berdasarkan penilaian lebih lanjut terhadap pelaksanaan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024, diketahui hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Belum seluruh paket PBJ diumumkan dalam SIRUP

Rencana PBJ yang telah di-*input* pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) per Triwulan III Tahun 2024 hanya 2.777 Paket PBJ, senilai Rp184.082.331.000, atau 99,32% dari total 2.788 Paket PBJ yang harus di-*input* di SIRUP senilai Rp185.343.009.000,00.

2. Terdapat keterlambatan penyelesaian pengadaan dan pembayaran

a. Belanja Modal

Terdapat 2 (dua) paket PBJ senilai Rp256.777.989,00, dari total 14 paket PBJ senilai total Rp2.020.603.696,00 yang terlambat penyelesaian pekerjaannya dan belum terdapat realisasi pembayaran pada periode akhir tugas Tim, per tanggal 6 Desember 2024. Kontrak dimaksud, yaitu:

- 1) Kontrak Nomor B.01.12/PPK/BKIPM.JKTII/PL.410/XI/2024 untuk Pengadaan Alat Pengolah Data pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM)/PPMHKP Padang senilai Rp85.943.000,00 yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Pratama Solusindo, dengan periode akhir kontrak pada tanggal 29 November 2024; dan

2) Kontrak Nomor B.01.12/PPK/BKIPM.JKTII/PL.410/XI/2024 untuk Pengadaan Alat Pengolah Data senilai Rp161.180.000,00 yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Pratama Solusindo, dengan periode akhir kontrak pada tanggal 29 November 2024.

b. Belanja Barang/Jasa

Terdapat 1 (satu) paket PBJ senilai Rp120.900.000,00, dari total 95 paket PBJ senilai total Rp10.612.011.998,00, yang terlambat pembayarannya pada periode akhir tugas Tim, per tanggal 6 Desember 2024. Kontrak dimaksud bernomor B.216.C/PPK-BPPMHKP.3/PL.420/XI/2024 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa *Fullboard* oleh PT. Citra Cikopo Hotel, dengan periode akhir kontrak pada tanggal 26 November 2024.

Rincian PBJ (Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa) dapat diakses pada:

<https://docs.google.com/document/d/1xNYHbgXi8Jkjo7gP4ESb5RQJga0lQcuh/e/dit?usp=sharing&oid=101693255689536754273&rtpof=true&sd=true>.

3. Belum seluruh hasil pengadaan sesuai *volume*

Berdasar hasil pengawasan ltjen KKP terhadap PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024, diketahui terdapat kekurangan *volume* hasil PBJ, yaitu:

- a. Pada Balai KIPM/PPMHKP Semarang, sesuai Surat Tugas Nomor B.358/ITJ.4/KP.440/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024, terdapat Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 014/PPK.BKIPM.SMG/SPK/PL.420/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024 senilai Rp47.307.201,89 oleh penyedia CV. Bangun Jaya, dengan kekurangan *volume* senilai Rp4.055.472,00;
- b. Pada Stasiun KIPM/PPMHKP Palangkaraya sesuai Surat Tugas Nomor B.456/ITJ.4/KP.440/XI/2024, tanggal 21 November 2024, terdapat:
 - 1) Pemeliharaan Kantor (perbaikan *plafond* dan dinding) sesuai SPK Nomor 126/KPA/PL.420/SKIPM.PKY/II/2024, tanggal 28 Februari 2024, senilai Rp14.430.000,00 oleh CV. Tata Bangun Konstruksi, dengan kekurangan *volume* senilai Rp913.000,00; dan
 - 2) Pemeliharaan Halaman Kantor (Perbaikan Lantai Teras Depan Kantor) sesuai SPK Nomor 206/KPA/SKIPM.PKY/PL.420/IV/2024, tanggal 30 April 2024, senilai Rp10.295.250,00, oleh CV. Seribu Dinar, dengan kekurangan *volume* senilai Rp875.000,00.

Berdasarkan konfirmasi dengan Analis Perencanaan, serta Ketua Tim Kerja (Katimja) Keuangan, Barang Milik Negara (BMN) dan Pengendalian Internal (PI) pada Sekretariat BPPMHKP, belum seluruh paket PBJ diumumkan dalam SIRUP dikarenakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja (Satker) lingkup BPPMHKP belum melakukan revisi RUP secara berkala setelah dilaksanakan revisi anggaran. Sedangkan keterlambatan pekerjaan dan kekurangan volume pekerjaan terjadi karena kekurangcermatan KPA dan PPK dalam mengendalikan kontrak.

Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan kepada Saudara agar menginstruksikan tertulis, kepada:

1. Seluruh KPA Satker lingkup BPPMHKP agar tertib dalam mengumumkan rencana pengadaan pada SIRUP dan menyelesaikan PBJ sesuai kontrak/surat pesanan tepat waktu; dan
2. PPK pada Stasiun KIPM/PPMHKP Palangkaraya dan Balai KIPM/PPMHKP Semarang agar cermat dalam mengendalikan kontrak dan segera menindaklanjuti rekomendasi ltjen KKP terkait kekurangan *volume* pada hasil pengawasan PBJ.

Terhadap saran di atas, telah terdapat kesanggupan tindak lanjut pada Minggu ke-3 Desember 2024, sesuai Dokumen Hasil Penilaian dan Kesanggupan Tindak Lanjut yang ditandatangani Katimja Keuangan, BMN dan PI per 4 Desember 2024 dan dapat diakses pada: https://drive.google.com/file/d/1DxozTWpFuUh-M6E8T_IPIUfXRvkOROnj/view?usp=sharing

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Inspektur Jenderal
Inspektur IV,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal
2. Inspektur II
3. Kepala BPPMHKP

Lampiran 1

Lembar Kerja Penilaian Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024

No	Indikator	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Total %	Keterangan
INDIKATOR 1: Kualitas Perencanaan Pengawasan		20%						
1	Ketersediaan peta risiko Pengadaan Barang dan Jasa Unit Eselon I lingkup KKP Tahun 2024	10%					10.00%	
a	Inspektorat Mitra telah menyusun Peta Risiko PBJ mitra kerja	5.00%	Y T	Apabila Inspektorat Mitra telah menyusun Peta Risiko PBJ Eselon I Apabila Inspektorat Mitra belum menyusun Peta Risiko PBJ Eselon I	Ya	1	5%	Inspektorat IV telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPPMHKP yang telah dinilai risiko kegiatan pengawasannya (tinggi, sedang, rendah), termasuk salah satunya risiko kegiatan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
b	Peta risiko digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan PBJ	5.00%	A B C D	Jika $\geq 80\%$ peta risiko digunakan untuk perencanaan pengawasan PBJ Jika $\geq 50\%$ s.d $< 80\%$ peta risiko digunakan untuk perencanaan pengawasan PBJ Jika $> 0\%$ s.d $< 50\%$ peta risiko digunakan untuk perencanaan pengawasan PBJ Inspektorat Mitra belum menggunakan peta risiko untuk perencanaan pengawasan PBJ	A	1	5%	Inspektorat IV telah melakukan penilaian risiko kegiatan PBJ dalam <i>auditable unit</i> dengan jumlah kegiatan risiko tinggi sebanyak 7 kegiatan risiko sedang sebanyak 18 kegiatan. Hasil penilaian risiko tersebut digunakan untuk perencanaan pengawasan PBJ yang dituangkan dalam PKPT Inspektorat IV yang ditetapkan pada Januari 2024.
2	Ketersediaan kegiatan pendampingan (consulting) dan kegiatan penjaminan mutu (quality assurance) atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkup KKP pada PKPT Tahun 2024	10%					10.00%	
a	Ketersediaan kegiatan pendampingan (consulting) dan kegiatan penjaminan mutu (quality assurance) atas	10.00%	A	Apabila dalam PKPT tersedia kegiatan pendampingan (consulting) dan kegiatan penjaminan mutu (quality assurance) atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Eselon I/Mitra	A	1	10%	Dalam PKPT Inspektorat IV Tahun 2024 yang ditetapkan pada Januari 2024, telah tersedia kegiatan pendampingan (consulting) dan kegiatan penjaminan mutu (quality assurance) atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkup BPPMHKP yaitu: 1. Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ Triwulan I 2024 2. Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ Triwulan II 2024

No	Indikator	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Total %	Keterangan
	pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkup KKP pada PKPT Tahun 2024		B Apabila dalam PKPT hanya tersedia kegiatan penjaminan mutu (<i>quality assurance</i>) saja					3. Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ Triwulan III 2024 4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ Triwulan IV 2024 5. Pendampingan Pelaksanaan PBJ dan BMN Tahun 2024 lingkup BPPMHKP 6. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ pada Balai PPMHKP Banjarmasin 7. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ pada Balai PPMHKP Jayapura 8. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ pada Stasiun PPMHKP Pekanbaru 9. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ pada Stasiun PPMHKP Bengkulu 10. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ pada Stasiun PPMHKP Bima 11. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ pada Stasiun PPMHKP Palangkaraya 12. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ pada Stasiun PPMHKP Pangkal Pinang
			C Apabila dalam PKPT hanya tersedia kegiatan pendampingan (<i>consulting</i>) saja					
			D Apabila dalam PKPT tidak mencantumkan kegiatan pendampingan (<i>consulting</i>) atau penjaminan mutu (<i>quality assurance</i>) atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Eselon I/Mitra					
INDIKATOR 2: Kualitas Pelaksanaan Pengawasan		40%						
1	Tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT kegiatan pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup KKP	15%					15.00%	
a	Inspektorat Mitra telah melaksanakan kegiatan pengawasan pengadaan barang/jasa pada Unit Eselon I berdasarkan PKPT	15.00%	A Jika $\geq 80\%$ Kegiatan pengawasan pengadaan barang/jasa pada Unit Eselon I yang tercantum dalam PKPT seluruhnya dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra	A	1	15%		Dalam PKPT Inspektorat IV Tahun 2024 yang ditetapkan pada Januari 2024, telah tersedia kegiatan pendampingan (<i>consulting</i>) dan kegiatan penjaminan mutu (<i>quality assurance</i>) atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkup BPPMHKP yaitu: 1. Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ Triwulan I 2024 2. Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ Triwulan II 2024 3. Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ Triwulan III 2024 4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ Triwulan IV 2024 5. Pendampingan Pelaksanaan PBJ dan BMN Tahun 2024 lingkup BPPMHKP 6. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ pada Balai PPMHKP Banjarmasin 7. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ pada Balai PPMHKP Jayapura 8. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ pada Stasiun PPMHKP Pekanbaru
			B Jika sebagian besar (≥ 50 s.d. $< 80\%$) kegiatan pengawasan pengadaan barang/jasa pada Unit Eselon I yang tercantum dalam PKPT dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra					

No	Indikator	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Total %	Keterangan
			<p>C Jika sebagian kecil (> 0 s.d. < 50%) kegiatan pengawasan pengadaan barang/jasa pada Unit Eselon I yang tercantum dalam PKPT dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra</p> <p>D Kegiatan pengawasan pengadaan barang/jasa pada Unit Eselon I yang tercantum dalam PKPT seluruhnya tidak dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra (0%)</p>					<p>9. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ pada Stasiun PPMHKP Bengkulu</p> <p>10. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ pada Stasiun PPMHKP Bima</p> <p>11. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ pada Stasiun PPMHKP Palangkaraya</p> <p>12. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ pada Stasiun PPMHKP Pangkal Pinang</p> <p>Berdasarkan 12 kegiatan diatas, sebagian besar (9 dari 12 atau 75,00%) telah direalisasikan, dengan keterangan sebanyak 2 (dua) kegiatan terdapat perubahan Unit Kerja sehubungan dengan sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 1162/SJ/RC.420/XI/2024, tanggal 12 November 2024, perihal penyampaian rincian target dan langkah-langkah penghematan belanja perjalanan dinas KKP TA 2024. 2 (dua) kegiatan tersebut yaitu:</p> <p>1. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ semula pada Balai PPMHKP Banjarmasin menjadi Stasiun PPMHKP Bandung</p> <p>2. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ semula pada Balai PPMHKP Jayapura menjadi Balai PPMHKP Jakarta II</p> <p>Kegiatan PKPT yang tidak dapat direalisasikan yaitu:</p> <p>1. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ pada Stasiun PPMHKP Pekanbaru</p> <p>2. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ pada Stasiun PPMHKP Bima</p> <p>3. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ pada Stasiun PPMHKP Pangkal Pinang</p>
2	Pemenuhan Kendali Mutu Pelaksanaan Pengawasan kegiatan pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup KKP	15%					15.00%	
a	Inspektorat Mitra telah menyusun Kendali Mutu Pelaksanaan Pengawasan kegiatan pengawasan pengadaan barang/jasa Unit Eselon I	15.00%	<p>A Jika $\geq 80\%$ kegiatan pengawasan pengadaan barang/jasa Unit Eselon I telah didukung dengan Kendali Mutu</p> <p>B Jika $\geq 50\%$ s.d. < 80% kegiatan pengawasan pengadaan barang/jasa Unit Eselon I telah didukung dengan Kendali Mutu</p> <p>C Jika $> 0\%$ s.d. < 50% kegiatan pengawasan pengadaan barang/jasa Unit Eselon I telah didukung dengan Kendali Mutu</p>	A	1	15%		Pada TA 20234, kegiatan Pengawasan terhadap PBJ lingkup BPPMHKP berupa Reviu, Pemantauan, dan Pendampingan , dimana sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 37 Tahun 2024, tentang Pedoman teknis Tata Kelola Pengawasan Intern lingkup Tjen KKP, bahwa Kendali Mutu Pengawasab (KMP) hanya dilakukan terhadap jenis kegiatan Audit dan Evaluasi .

No	Indikator	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Total %	Keterangan
			D Tidak terdapat Kendali Mutu atas pelaksanaan pengawasan kegiatan pengadaan barang/Jasa Unit Eselon I (0%)					
3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan kegiatan pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup KKP Tw I s.d. Tw III Tahun 2024	10%					10.00%	
a	Hasil pengawasan Inspektorat Mitra terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti oleh Unit Eselon I yang bersangkutan	10.00%	A Jika $\geq 80\%$ rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa Tw I s/d Tw III Tahun 2024 telah ditindaklanjuti	A	1	10%		Rekomendasi hasil pengawasan PBJ periode Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024 adalah sebanyak 10 LHP dan seluruhnya telah tuntas ditindaklanjuti , dengan rincian sebanyak 22 temuan dan 35 rekomendasi. Rincian data dapat dilihat pada Lampiran 1.
			B Jika ≥ 70 s.d. $< 80\%$ rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa Tw I s/d Tw III Tahun 2024 telah ditindaklanjuti					
			C Jika ≥ 60 s.d. $< 70\%$ rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa Tw I s/d Tw III Tahun 2024 telah ditindaklanjuti					
			D Jika $< 60\%$ rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa Tw I s/d Tw III Tahun 2024 telah ditindaklanjuti					
	INDIKATOR 3: Nilai rata-rata tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa unit eselon I/mitra berdasarkan hasil penilaian Itjen KKP	40%						
1	Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Unit Eselon I	4%					4.00%	

No	Indikator	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Total %	Keterangan
a	Eselon I telah menyusun Manajemen Risiko PBJ Strategis	2.00%	Y Apabila Eselon I telah menyusun Manajemen Risiko PBJ Startegis	Ya	1	2%		<p>Tahun 2024, tidak terdapat PBJ Lingkup BPPMHKP melalui tender. Seluruh PBJ lingkup BPPMHKP dilaksanakan melalui jenis pengadaan e-katalog, pengadaan langsung, dan atau swakelola.</p> <p>Dikarenakan tidak terdapat PBJ melalui tender, maka pada penyusunan MR masuk dalam kategori risiko rendah, tidak perlu dikendalikan melalui Manajemen Risiko. Namun terdapat Kertas Kerja Penyusunan MR untuk penentuan risiko kegiatan.</p> <p>Tiga Kertas Kerja MR PBJ lingkup BPPMHKP, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana BPPMHKP melalui e-purchasing; 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana BPPMHKP di atas 200 juta; dan 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana BPPMHKP di bawah 200 juta. <p>telah disusun tanggal November 2023 dan Kertas Kerja tersebut telah ditandatangani Kepala BPPMHKP.</p> <p>PBJ melalui ekatalog lingkup BPPMHKP pada TA 2024, pasca rekomposisi AA senilai Rp6.775.619.000,00, diantaranya untuk PBJ Satker berikut ini untuk Belanja Modal di atas 200 juta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jakarta II Sarana Pengujian Mutu Rp1.143.083.000 2. Medan II Sarana Pengujian Mutu Rp653.512.000 3. Jakarta I Prasarana Pengujian Mutu Rp600.000.000 4. Jakarta I Sarana Pengujian Mutu Rp364.894.000 5. Surabaya I Sarana Pengujian Mutu Rp1.184.955.000 6. Makassar Sarana Pengujian Mutu Rp691.344.000 7. Denpasar Sarana Pengujian Mutu Rp634.689.000 <p>Rincian dokumen Kertas Kerja MR paket e-katalog terdapat pada link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pt4yVNzRy4P5OYk63JMDn0TFRyld47Dk/edit?gid=1498848373#gid=1498848373</p> <p>Dokumen MR yang telah ditandatangani: https://drive.google.com/file/d/1DynwvBctO18HgmifBYO4RgDNYWi_7RI/view?usp=sharing</p>
			T Apabila Eselon I belum menyusun Manajemen Risiko PBJ Strategis					

No	Indikator	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Total %	Keterangan
b	Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun	2.00%	A Jika $\geq 80\%$ aktivitas pengendalian dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun	A	1	2%		<p>Telah terdapat pengendalian atas PBJ melalui e-katalog, antara lain melalui penyusunan Kertas Kerja MR untuk penentuan risiko kegiatan PBJ.</p> <p>Rincian dokumen Kertas Kerja MR paket e-katalog terdapat pada link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pt4yVNzRy4P5OYk63JMDn0TFRyld47Dk/edit?gid=1498848373#gid=1498848373</p>
			B Jika $\geq 50\%$ s.d $< 80\%$ aktivitas pengendalian dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun					
			C Jika $> 0\%$ s.d $< 50\%$ aktivitas pengendalian dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun					
			D Eselon I belum melaksanakan aktivitas pengendalian sesuai Manajemen Risiko yang disusun					
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	6%					5.50%	
a	Apakah seluruh paket pengadaan melalui penyedia pada Satker Pusat dan seluruh UPT telah diumumkan dalam SIRUP	2.00%	A Jika 100% paket pengadaan telah diumumkan dalam SIRUP	B	0.75	2%		<p>Belum seluruh paket PBJ diumumkan dalam SIRUP</p> <p>Rencana PBJ yang telah diinput pada SIRUP per Triwulan III Tahun 2024 sebanyak 2.777 Paket senilai Rp184.082.331.000, dari total 2.788 Paket yang harus diinput di SIRUP senilai Rp185.343.009.000. atau 99,32 % paket pengadaan telah diumumkan dalam SIRUP.</p> <p>Kekurangan pencatatan pada SIRUP tersebut dikarenakan terdapat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja (Satker) lingkup BPPMHKP yang belum melakukan revisi RUP setelah revisi anggaran buka blokir Non Automatic Adjustment (AA).</p>
			B Jika $\geq 80\%$ s.d. $< 100\%$ paket pengadaan telah diumumkan dalam SIRUP					
			C Jika $\geq 50\%$ s.d. $< 80\%$ paket pengadaan telah diumumkan dalam SIRUP					
			D Jika $> 0\%$ s.d. $< 50\%$ paket pengadaan telah diumumkan dalam SIRUP					
			E Jika belum ada paket pengadaan yang diumumkan dalam SIRUP (0%)					
b	Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian	2.00%	A Jika KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak Surat Perjanjian untuk Seluruh Paket Pengadaan telah Tersedia Paling Lambat Bulan Juni Tahun berjalan;	A	1	2%		<p>KAK dan Spesifikasi Teknis untuk PBJ melalui e-Katalog tersedia diantara bulan Maret s.d. November 2024, dikarenakan sumber anggaran PBJ di atas dari dana PNPB, sehingga baru dapat digunakan anggarannya setelah tercapai target PNPB mulai awal Triwulan IV 2024. Namun seluruh perencanaan PBJ tersebut, dimulai bulan April 2024, antara lain pada pembahasan Kewenangan Pengelolaan PNPB antara KKP dan Barantin yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 di Aula Balai Riset Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, dengan hasil antara lain Penatausahaan PNPB sebagaimana tercantum pada PMK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Jenis dan</p> <p>PBJ melalui ekatalog lingkup BPPMHKP pada TA 2024, pasca rekomporsi AA</p>

No	Indikator	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Total %	Keterangan
			B Jika KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak Surat Perjanjian untuk Seluruh Paket Pengadaan telah Tersedia Paling Lambat Bulan Agustus tahun berjalan;					<p>senilai Rp6.775.619.000,00, diantaranya untuk PBJ Satker berikut ini untuk Belanja Modal di atas 200 juta:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jakarta II Sarana Pengujian Mutu Rp1.143.083.000. KAK Pengadaan Bahan Lab ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2024 dan KAK untuk Pengadaan Alat Pengolah Data ditandatangani pada tanggal 4 November 2024. Medan II Sarana Pengujian Mutu Rp653.512.000, belum lengkap; Jakarta I Prasarana Pengujian Mutu Rp600.000.000,00,, belum lengkap; Jakarta I Sarana Pengujian Mutu Rp364.894.000,00, belum lengkap; Surabaya I Sarana Pengujian Mutu Rp1.184.955.000, KAK untuk Pengadaan Alat Pengolah Data ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2024 dan KAK untuk Pengadaan Meubelair ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2024; Makassar Sarana Pengujian Mutu Rp691.344.000, KAK Pengadaan Bahan Lab ditandatangani pada tanggal 4 November 2024; dan Denpasar Sarana Pengujian Mutu Rp634.689.000, belum lengkap. <p>KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak terdapat pada link: https://drive.google.com/drive/folders/1nnLJeA37dfdRdDWiJlzn3UPH-tgrgZdZ</p>
			C Jika KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak Surat Perjanjian untuk Seluruh Paket Pengadaan telah Tersedia Paling Lambat bulan Oktober tahun berjalan;					
			D Jika sampai dengan Oktober Tahun Berjalan Paket Pengadaan Belum Seluruhnya Tersedia KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak Surat Perjanjian.					
c	HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan	2.00%	A Jika 100% pengadaan memiliki HPS yang dilengkapi dokumen pendukung	A	1	2%		<p>PBJ lingkup BPPMHKP pada TA 2024, pasca rekomposisi AA senilai Rp6.775.619.000,00, diantaranya untuk PBJ Satker berikut ini untuk Belanja Modal di atas 200 juta, seluruhnya melalui e-katalog sehingga tidak dilakukan penetapan HPS sesuai Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2018, diketahui bahwa Penetapan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan E-purchasing.</p>
			B Jika $\geq 80\%$ s.d. $< 100\%$ pengadaan memiliki HPS yang dilengkapi dokumen pendukung					
			C Jika $\geq 50\%$ s.d. $< 80\%$ pengadaan memiliki HPS yang dilengkapi dokumen pendukung					
			D Jika $> 0\%$ s.d. $< 50\%$ pengadaan memiliki HPS yang dilengkapi dokumen pendukung					
			E Jika belum ada pengadaan yang memiliki HPS disertai dokumen pendukung (0%)					
3	Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE	4%					4.00%	
a	Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada	4.00%	A Jika $\geq 80\%$ pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan Seluruh UPT dilaksanakan Melalui SPSE	A	1	4%		<p>PBJ lingkup BPPMHKP pada TA 2024 dilaksanakan melalui SPSE dengan pemilihan penyedia pada e-Katalog</p> <p>Namun belum seluruh rencana PBJ diinput pada SIRUP per Triwulan III TA 2024. Hanya terdapat 2.777 Paket senilai Rp184.082.331.000, dari total 2.788 Paket</p>

No	Indikator	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Total %	Keterangan
	Satker Pusat dan seluruh UPT yang dilaksanakan melalui SPSE		<p>B Jika $\geq 50\%$ s.d. $< 80\%$ pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan Seluruh UPT dilaksanakan Melalui SPSE</p> <p>C Jika $>0\%$ s.d. $< 50\%$ pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan Seluruh UPT dilaksanakan Melalui SPSE</p> <p>D Jika belum ada paket pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan Seluruh UPT yang dilaksanakan Melalui SPSE (0%)</p>					<p>yang seharusnya diinput di SIRUP senilai Rp185.343.009.000. atau 99,32 % paket.</p> <p>Pasca rekomposisi AA, total PBJ lingkup BPPMHKP senilai Rp6.775.619.000,00, diantaranya untuk PBJ Satker berikut ini untuk Belanja Modal di atas 200 juta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jakarta II Sarana Pengujian Mutu Rp1.143.083.000 2. Medan II Sarana Pengujian Mutu Rp653.512.000 3. Jakarta I Prasarana Pengujian Mutu Rp600.000.000 4. Jakarta I Sarana Pengujian Mutu Rp364.894.000 5. Surabaya I Sarana Pengujian Mutu Rp1.184.955.000 6. Makassar Sarana Pengujian Mutu Rp691.344.000 7. Denpasar Sarana Pengujian Mutu Rp634.689.000
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	24%					16.98%	
a	Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa)	6.00%	<p>A Jika seluruh paket pengadaan barang dan jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian telah dikontrakkan paling lambat bulan Juni tahun berjalan;</p> <p>B Jika seluruh paket pengadaan barang dan jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian telah dikontrakkan paling lambat bulan Agustus tahun berjalan;</p> <p>C Jika seluruh paket pengadaan barang dan jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian telah dikontrakkan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;</p>	C	0.33	1.98 %		<p>PBJ TA 2024 lingkup BPPMHKP dilaksanakan seluruhnya melalui e-katalog dan dimulai pada awal Triwulan IV 2024 karena menggunakan Dana PNBK.</p> <p>Total PBJ pasca rekomposisi AA senilai Rp6.775.619.000,00, diantaranya untuk PBJ Satker berikut ini untuk Belanja Modal di atas 200 juta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jakarta II Sarana Pengujian Mutu Rp1.143.083.000 2. Medan II Sarana Pengujian Mutu Rp653.512.000 3. Jakarta I Prasarana Pengujian Mutu Rp600.000.000 4. Jakarta I Sarana Pengujian Mutu Rp364.894.000 5. Surabaya I Sarana Pengujian Mutu Rp1.184.955.000 6. Makassar Sarana Pengujian Mutu Rp691.344.000 7. Denpasar Sarana Pengujian Mutu Rp634.689.000

No	Indikator	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Total %	Keterangan
			D	Jika sampai dengan Oktober tahun berjalan masih terdapat paket pengadaan barang dan jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang belum dikontrakkan.				<p>Sumber anggaran PBJ di atas dari dana PNBPN, yang dapat digunakan setelah tercapai target PNBPN mulai awal Triwulan IV 2024. Namun seluruh perencanaan PBJ tersebut, dimulai bulan April 2024, antara lain pada pembahasan Kewenangan Pengelolaan PNBPN antara KKP dan Barantin yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 di Aula Balai Riset Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, dengan hasil antara lain Penatausahaan PNBPN sebagaimana tercantum pada PMK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Barantin, sebagaimana tertuang pada Pasal 6, disepakati sejak 1 Januari s.d 16 Mei 2024 tetap tercatat sebagai PNBPN pada KKP.</p> <p>KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak terdapat pada link: https://drive.google.com/drive/folders/1nnLJeA37dfdRdDWiJlzn3UPH-tgrqZdZ</p>
b	Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT	6.00%	A	Jika 100% penyelesaian pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian tidak terlambat;	B	0.75	4.50 %	<p>Terdapat keterlambatan penyelesaian pengadaan</p> <p>1. Terdapat 2 (dua) paket pengadaan belanja modal terlambat dilaksanakan dari total 14 paket yang harus selesai hingga akhir penilaian. Seluruh belanja modal terdapat total 26 paket; dan</p> <p>2. Terdapat 1 (satu) paket pengadaan belanja barang terlambat dilaksanakan dari total 114 paket yang harus selesai hingga akhir penilaian. Seluruh belanja barang terdapat total 131 paket.</p> <p>Presentase: 97,65% (125/128)</p>
			B	Jika $\geq 80\%$ s.d. $< 100\%$ penyelesaian pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian tidak terlambat;				
			C	Jika $\geq 50\%$ s.d. $< 80\%$ penyelesaian pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian tidak terlambat;				
			D	Jika $> 0\%$ s.d. $< 50\%$ penyelesaian pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian tidak terlambat;				
			E	Jika seluruh penyelesaian pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian terlambat (0%)				
c	Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada	6.00%	A	Jika seluruh BAST pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki volume sesuai dengan surat perjanjian dan/atau <i>addendumnya</i> (100%);	B	0.75	4.50 %	<p>Belum seluruh hasil pengadaan melalui e-purchasing / e-catalog lingkup Satker BPPMHKP memiliki kesesuaian volume. Berdasar Hasil Pemantauan PBJ oleh Itjen KKP terdapat kekurangan volume pada:</p> <p>1. Stasiun KIPM / PPMHKP Palangkaraya sesuai dengan Surat Tugas Nomor:</p>

No	Indikator	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Total %	Keterangan
	Satker Pusat dan seluruh UPT		<p>B Jika $\geq 80\%$ s.d. $< 100\%$ BAST pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki volume sesuai dengan surat perjanjian dan/atau <i>addendumnya</i>;</p> <p>C Jika $\geq 50\%$ s.d. $< 80\%$ BAST pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki volume sesuai dengan surat perjanjian dan/atau <i>addendumnya</i>;</p> <p>D Jika $> 0\%$ s.d. $< 50\%$ BAST pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki volume sesuai dengan surat perjanjian dan/atau <i>addendumnya</i>;</p> <p>E Jika seluruh BAST pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki volume tidak sesuai dengan surat perjanjian dan/atau <i>addendumnya</i> (0%).</p>					<p>B.456/ITJ.4/KP.440/XI/2024 tanggal 21 November 2024:</p> <p>a. Pemeliharaan Kantor Stasiun KIPM Palangkaraya (perbaikan plafond dan dinding) sesuai SPK Nomor 126/KPA/PL.420/SKIPM.PKY/II/2024, tanggal 28 Februari 2024 senilai Rp14.430.000,00 oleh CV Tata Bangun Konstruksi, kurang volume senilai Rp913.000; dan</p> <p>b. Pemeliharaan Halaman Kantor (Perbaikan Lantai Teras Depan Kantor) sesuai SPK Nomor 206/KPA/SKIPM.PKY/PL.420/IV/2024, tanggal 30 April 2024 senilai Rp10.295.250,00 oleh CV Seribu Dinar, kurang volume senilai Rp875.000,00</p> <p>2. Balai KIPM / PPMHKP Semarang sesuai dengan Surat Tugas Nomor: B.358/ITJ.4/KP.440/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, pada Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sesuai SPK Nomor: 014/PPK.BKIPM.SMG/SPK/PL.420/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 senilai Rp47.307.201,89 oleh penyedia CV Bangun Jaya, kekurangan volume senilai Rp4.055.472,00.</p>
d	Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT	6.00%	<p>A Jika seluruh BAST pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki spesifikasi sesuai dengan surat perjanjian dan/atau <i>addendumnya</i> (100%);</p> <p>B Jika $\geq 80\%$ s.d. $< 100\%$ BAST pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki spesifikasi sesuai dengan surat perjanjian dan/atau <i>addendumnya</i>;</p> <p>C Jika $\geq 50\%$ s.d. $< 80\%$ BAST pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki spesifikasi sesuai dengan surat perjanjian dan/atau <i>addendumnya</i>;</p> <p>D Jika $> 0\%$ s.d. $< 50\%$ BAST pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki spesifikasi sesuai dengan surat perjanjian dan/atau <i>addendumnya</i>;</p>	A	1	6.00%		Hasil PBJ melalui e-katalog sesuai spesifikasi pesanan.

No	Indikator	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Total %	Keterangan
			E	Jika seluruh BAST pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki spesifikasi tidak sesuai dengan surat perjanjian dan/atau <i>addendumnya</i> (0%).				
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ	2%					1.50%	
a	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ	2.00%	A	Jika laporan penyelenggaraan PBJ disusun secara Bulanan	B	0.75	1.50 %	<p>Telah terdapat laporan penyelenggaraan PBJ secara Triwulanan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan PBJ lingkup BPPMHKP Triwulan I yang ditandatangani Sekretariat BPPMHKP kepada Kepala BPPMHKP sesuai Memorandum Nomor: B.802/BPPMHKP.1/PL-460/IV/2024, tanggal 5 April 2024; Laporan PBJ lingkup BPPMHKP Triwulan II yang ditandatangani Sekretariat BPPMHKP kepada Kepala BPPMHKP sesuai Memorandum Nomor: B.1561/BPPMHKP.1/PL-460/IV/2024, tanggal 8 Juli 2024; Laporan PBJ lingkup BPPMHKP Triwulan III yang ditandatangani Sekretariat BPPMHKP kepada Kepala BPPMHKP sesuai Memorandum Nomor B.2697/BPPMHKP.1/PL-460/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024 <p>Dokumen laporan proses PBJ terdapat pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1XqIRcnliNCUzmG8pdYy58Uh5cc6xGL3?usp=sharing</p>
			B	Jika laporan penyelenggaraan PBJ disusun secara Triwulanan				
			C	Jika laporan penyelenggaraan PBJ disusun secara Semesteran				
			D	Jika laporan penyelenggaraan PBJ disusun secara Tahunan				
			E	Jika belum menyusun laporan penyelenggaraan PBJ				
Nilai Efektifitas Pengawasan Pelaksanaan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024							91,98%	

Lampiran 2.

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPMHKP Tahun 2024

No	Hasil Pembahasan	Bobot Penilaian		Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Bobot Penilaian	Keterangan
INDIKATOR: Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Eselon I								100.00%	
1.	Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Unit Eselon I	10%						10.00%	
a.	Eselon I telah menyusun Manajemen Risiko PBJ Strategis	5.00%	Y	Apabila Eselon I telah menyusun Manajemen Risiko PBJ Startegis	Ya	1	5.00%		<p><u>Tahun 2024, tidak terdapat pengadaan melalui tender. Seluruh PBJ lingkup BPPMHKP dilaksanakan melalui jenis pengadaan e-katalog, pengadaan langsung, dan swakelola. Dikarenakan tidak terdapat PBJ melalui tender, maka pada penyusunan MR masuk dalam kategori risiko rendah, tidak perlu dikendalikan melalui Manajemen Risiko. Namun terdapat Kertas Kerja Penyusunan MR untuk penentuan risiko kegiatan.</u></p> <p><u>Tiga Kertas Kerja MR PBJ lingkup BPPMHKP, yaitu :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. Pengadaan Sarana dan Prasarana BPPMHKP melalui e-purchasing;</u> <u>2. Pengadaan Sarana dan Prasarana BPPMHKP di atas 200 juta; dan</u> <u>3. Pengadaan Sarana dan Prasarana BPPMHKP di bawah 200 juta.</u> <p><u>telah disusun tanggal November 2023 dan Kertas Kerja tersebut telah ditandatangani Kepala BPPMHKP.</u></p> <p><u>PBJ melalui ekatalog lingkup BPPMHKP pada TA 2024, pasca rekomposisi AA senilai Rp6.775.619.000,00, diantaranya untuk PBJ Satker berikut ini untuk Belanja Modal di atas 200 juta:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. Jakarta II Sarana Pengujian Mutu Rp1.143.083.000</u> <u>2. Medan II Sarana Pengujian Mutu Rp653.512.000</u> <u>3. Jakarta I Prasarana Pengujian Mutu Rp600.000.000</u> <u>4. Jakarta I Sarana Pengujian Mutu Rp364.894.000</u> <u>5. Surabaya I Sarana Pengujian Mutu Rp1.184.955.000</u> <u>6. Makassar Sarana Pengujian Mutu Rp691.344.000</u> <u>7. Denpasar Sarana Pengujian Mutu Rp634.689.000</u> <p><u>Rincian dokumen Kertas Kerja MR paket e-katalog terdapat pada link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pt4yVNzRy4P5OYk63JMDn0TFRyld47Dk/edit?gid=1498848373#gid=1498848373</u></p> <p><u>Dokumen MR yang telah ditandatangani:</u></p>
			T	Apabila Eselon I belum menyusun Manajemen Risiko PBJ Strategis					

No	Hasil Pembahasan	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Bobot Penilaian	Keterangan								
								https://drive.google.com/file/d/1DynwvBctO18HgmifBYO4RqDNyWi_7RI/view?usp=sharing								
b.	Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun	5.00%	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>Jika $\geq 80\%$ aktivitas pengendalian dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Jika $\geq 50\%$ s.d $< 80\%$ aktivitas pengendalian dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Jika $> 0\%$ s.d $< 50\%$ aktivitas pengendalian dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Eselon I belum melaksanakan aktivitas pengendalian sesuai Manajemen Risiko yang disusun</td> </tr> </table>	A	Jika $\geq 80\%$ aktivitas pengendalian dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun	B	Jika $\geq 50\%$ s.d $< 80\%$ aktivitas pengendalian dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun	C	Jika $> 0\%$ s.d $< 50\%$ aktivitas pengendalian dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun	D	Eselon I belum melaksanakan aktivitas pengendalian sesuai Manajemen Risiko yang disusun	A	1	5.00%		<p>Telah terdapat pengendalian atas PBJ melalui e-katalog, antara lain melalui penyusunan Kertas Kerja MR untuk penentuan risiko kegiatan PBJ.</p> <p>Rincian dokumen Kertas Kerja MR paket e-katalog terdapat pada link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pt4yVnzRy4P5OYk63JMDn0TFRyld47Dk/edit?gid=1498848373#gid=1498848373</p>
A	Jika $\geq 80\%$ aktivitas pengendalian dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun															
B	Jika $\geq 50\%$ s.d $< 80\%$ aktivitas pengendalian dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun															
C	Jika $> 0\%$ s.d $< 50\%$ aktivitas pengendalian dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun															
D	Eselon I belum melaksanakan aktivitas pengendalian sesuai Manajemen Risiko yang disusun															
2.	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15%					13.75%									
a.	Apakah seluruh paket pengadaan melalui penyedia pada Satker	5.00%	A	Jika 100% paket pengadaan telah diumumkan dalam SIRUP	B	0.75	3.75%	<p>Belum seluruh paket PBJ diumumkan dalam SIRUP</p> <p>Rencana PBJ yang telah diinput pada SIRUP per Triwulan III Tahun 2024 sebanyak 2.777</p>								

No	Hasil Pembahasan	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Bobot Penilaian	Keterangan
	Pusat dan seluruh UPT telah diumumkan dalam SIRUP		B Jika $\geq 80\%$ s.d. $< 100\%$ paket pengadaan telah diumumkan dalam SIRUP					Paket senilai Rp184.082.331.000, dari total 2.788 Paket yang harus diinput di SIRUP senilai Rp185.343.009.000. atau 99,32 % paket pengadaan telah diumumkan dalam SIRUP. Kekurangan pencatatan pada SIRUP tersebut dikarenakan terdapat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja (Satker) lingkup BPPMHKP yang belum melakukan revisi RUP setelah revisi anggaran buka blokir Non Automatic Adjustment (AA).
			C Jika $\geq 50\%$ s.d. $< 80\%$ paket pengadaan telah diumumkan dalam SIRUP					
			D Jika $> 0\%$ s.d. $< 50\%$ paket pengadaan telah diumumkan dalam SIRUP					
			E Jika belum ada paket pengadaan yang diumumkan dalam SIRUP (0%)					
b.	Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian	5.00%	A Jika KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak Surat Perjanjian untuk Seluruh Paket Pengadaan telah Tersedia Paling Lambat Bulan Juni Tahun berjalan;	A	1	5.00%		KAK dan Spesifikasi Teknis untuk PBJ melalui e-Katalog tersedia diantara bulan Maret s.d. November 2024, dikarenakan sumber anggaran PBJ di atas dari dana PNB, sehingga baru dapat digunakan anggarannya setelah tercapai target PNB mulai awal Triwulan IV 2024. Namun seluruh perencanaan PBJ tersebut, dimulai bulan April 2024 , antara lain melalui pembahasan Kewenangan Pengelolaan PNB antara KKP dan Barantin yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 di Aula Balai Riset Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, dengan hasil antara lain Penatausahaan PNB sebagaimana tercantum pada PMK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Barantin, sebagaimana tertuang pada Pasal 6, disepakati sejak 1 Januari s.d 16 Mei 2024 tetap tercatat sebagai PNB pada KKP. PBJ melalui ekatalog lingkup BPPMHKP pada TA 2024, pasca rekomposisi AA senilai Rp6.775.619.000,00, diantaranya untuk PBJ Satker berikut ini untuk Belanja Modal di atas 200 juta, yaitu : 1. Jakarta II Sarana Pengujian Mutu Rp1.143.083.000. KAK Pengadaan Bahan Lab ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2024 dan KAK untuk Pengadaan Alat Pengolah Data ditandatangani pada tanggal 4 November 2024. 2. Medan II Sarana Pengujian Mutu Rp653.512.000, belum lengkap; 3. Jakarta I Prasarana Pengujian Mutu Rp600.000.000,00,, belum lengkap; 4. Jakarta I Sarana Pengujian Mutu Rp364.894.000,00, belum lengkap; 5. Surabaya I Sarana Pengujian Mutu Rp1.184.955.000, KAK untuk Pengadaan Alat Pengolah Data ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2024 dan KAK untuk Pengadaan Meubelair ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2024; 6. Makassar Sarana Pengujian Mutu Rp691.344.000, KAK Pengadaan Bahan Lab ditandatangani pada tanggal 4 November 2024; dan 7. Denpasar Sarana Pengujian Mutu Rp634.689.000, belum lengkap. KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak terdapat pada link: https://drive.google.com/drive/folders/1nnLJeA37dfdRdDWjJzn3UPH-tqrgZdZ
			B Jika KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak Surat Perjanjian untuk Seluruh Paket Pengadaan telah Tersedia Paling Lambat Bulan Agustus tahun berjalan;					
			C Jika KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak Surat Perjanjian untuk Seluruh Paket Pengadaan telah Tersedia Paling Lambat bulan Oktober tahun berjalan;					
			D Jika sampai dengan Oktober Tahun Berjalan Paket Pengadaan Belum Seluruhnya Tersedia KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak Surat Perjanjian.					
c.	HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian	5.00%	A Jika 100% pengadaan memiliki HPS yang dilengkapi dokumen pendukung	A	1	5.00%		PBJ lingkup BPPMHKP pada TA 2024, pasca rekomposisi AA senilai Rp6.775.619.000,00, diantaranya untuk PBJ Satker berikut ini untuk Belanja Modal di atas 200 juta, seluruhnya melalui e-katalog sehingga tidak dilakukan penetapan HPS sesuai

No	Hasil Pembahasan	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Bobot Penilaian	Keterangan
	dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan		B Jika $\geq 80\%$ s.d. $< 100\%$ pengadaan memiliki HPS yang dilengkapi dokumen pendukung					Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2018, diketahui bahwa Penetapan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan <i>E-purchasing</i> .
			C Jika $\geq 50\%$ s.d. $< 80\%$ pengadaan memiliki HPS yang dilengkapi dokumen pendukung					
			D Jika $> 0\%$ s.d. $< 50\%$ pengadaan memiliki HPS yang dilengkapi dokumen pendukung					
			E Jika belum ada pengadaan yang memiliki HPS disertai dokumen pendukung (0%)					
3.	Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE	10%					10.00%	
a.	Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang dilaksanakan melalui SPSE	10.00%	A Jika $\geq 80\%$ pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan Seluruh UPT dilaksanakan Melalui SPSE	A	1	10.00%		<p>PBJ lingkup BPPMHPK pada TA 2024 dilaksanakan melalui SPSE dengan pemilihan penyedia pada e-Katalog</p> <p>Namun belum seluruh rencana PBJ diinput pada SIRUP per Triwulan III TA 2024. Hanya terdapat 2.777 Paket senilai Rp184.082.331.000, dari total 2.788 Paket yang seharusnya diinput di SIRUP senilai Rp185.343.009.000. atau 99,32 % paket.</p> <p>Pasca rekomposisi AA, total PBJ lingkup BPPMHPK senilai Rp6.775.619.000,00, diantaranya untuk PBJ Satker berikut ini untuk Belanja Modal di atas 200 juta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jakarta II Sarana Pengujian Mutu Rp1.143.083.000 2. Medan II Sarana Pengujian Mutu Rp653.512.000 3. Jakarta I Prasarana Pengujian Mutu Rp600.000.000 4. Jakarta I Sarana Pengujian Mutu Rp364.894.000 5. Surabaya I Sarana Pengujian Mutu Rp1.184.955.000 6. Makassar Sarana Pengujian Mutu Rp691.344.000 7. Denpasar Sarana Pengujian Mutu Rp634.689.000
			B Jika $\geq 50\%$ s.d. $< 80\%$ pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan Seluruh UPT dilaksanakan Melalui SPSE					
			C Jika $>0\%$ s.d. $< 50\%$ pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan Seluruh UPT dilaksanakan Melalui SPSE					
			D Jika belum ada paket pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan Seluruh UPT yang dilaksanakan Melalui SPSE (0%)					
4.	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45%					31.84%	

No	Hasil Pembahasan	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Bobot Penilaian	Keterangan
a.	Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa)	11.25%	A	Jika seluruh paket pengadaan barang dan jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian telah dikontrakkan paling lambat bulan Juni tahun berjalan;	C	0.33	3.71%	<p>PBJ TA 2024 lingkup BPPMHKP dilaksanakan seluruhnya melalui e-katalog dan dimulai pada awal Triwulan IV 2024 karena menggunakan Dana PNBPN.</p> <p>Total PBJ pasca rekomposisi AA senilai Rp6.775.619.000,00, diantaranya untuk PBJ Satker berikut ini untuk Belanja Modal di atas 200 juta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jakarta II Sarana Pengujian Mutu Rp1.143.083.000 2. Medan II Sarana Pengujian Mutu Rp653.512.000 3. Jakarta I Prasarana Pengujian Mutu Rp600.000.000 4. Jakarta I Sarana Pengujian Mutu Rp364.894.000 5. Surabaya I Sarana Pengujian Mutu Rp1.184.955.000 6. Makassar Sarana Pengujian Mutu Rp691.344.000 7. Denpasar Sarana Pengujian Mutu Rp634.689.000 <p>Sumber anggaran PBJ di atas dari dana PNBPN, yang dapat digunakan setelah tercapai target PNBPN mulai awal Triwulan IV 2024. Namun seluruh perencanaan PBJ tersebut, dimulai bulan April 2024, antara lain pada pembahasan Kewenangan Pengelolaan PNBPN antara KKP dan Barantin yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 di Aula Balai Riset Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, dengan hasil antara lain Penatausahaan PNBPN sebagaimana tercantum pada PMK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Barantin, sebagaimana tertuang pada Pasal 6, disepakati sejak 1 Januari s.d 16 Mei 2024 tetap tercatat sebagai PNBPN pada KKP.</p> <p>KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak terdapat pada link: https://drive.google.com/drive/folders/1nnLJeA37dfdRdDWiJzn3UPH-tgrqZdZ</p>
			B	Jika seluruh paket pengadaan barang dan jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian telah dikontrakkan paling lambat bulan Agustus tahun berjalan;				
			C	Jika seluruh paket pengadaan barang dan jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian telah dikontrakkan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;				
			D	Jika sampai dengan Oktober tahun berjalan masih terdapat paket pengadaan barang dan jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang belum dikontrakkan.				
b.	Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT	11.25%	A	Jika 100% penyelesaian pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian tidak terlambat;	B	0.75	8.44%	<p>Terdapat keterlambatan penyelesaian pengadaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 2 (dua) paket pengadaan belanja modal terlambat dilaksanakan dari total 14 paket yang harus selesai hingga akhir penilaian. Seluruh belanja modal terdapat total 26 paket; dan 2. Terdapat 1 (satu) paket pengadaan belanja barang terlambat dilaksanakan dari total 95 paket yang harus selesai hingga akhir penilaian. Seluruh belanja barang terdapat total 131 paket. <p>Presentase: 97,25% (106/109)</p>
			B	Jika $\geq 80\%$ s.d. $< 100\%$ penyelesaian pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian tidak terlambat;				
			C	Jika $\geq 50\%$ s.d. $< 80\%$ penyelesaian pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian tidak terlambat;				
			D	Jika $> 0\%$ s.d. $< 50\%$ penyelesaian pengadaan dengan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian tidak terlambat;				

No	Hasil Pembahasan	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Bobot Penilaian	Keterangan
			E	Jika seluruh penyelesaian pengadaan dengan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian terlambat (0%)				
c.	Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT	11.25%	A	Jika seluruh BAST pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki volume sesuai dengan surat perjanjian dan/atau addendumnya (100%);	B	0.75	8.44%	<p>Belum seluruh hasil pengadaan melalui e-purchasing / e-catalog lingkup Satker BPPMHKP memiliki kesesuaian volume. Berdasar Hasil Pemantauan PBJ oleh Itjen KKP terdapat kekurangan volume pada:</p> <p>1. Stasiun KIPM / PPMHKP Palangkaraya sesuai dengan Surat Tugas Nomor: B.456/ITJ.4/KP.440/XI/2024 tanggal 21 November 2024:</p> <p>a. Pemeliharaan Kantor Stasiun KIPM Palangkaraya (perbaikan plafond dan dinding) sesuai SPK Nomor 126/KPA/PL.420/SKIPM.PKY/III/2024, tanggal 28 Februari 2024 senilai Rp14.430.000,00 oleh CV Tata Bangun Konstruksi , kurang volume senilai Rp913.000; dan</p> <p>b. Pemeliharaan Halaman Kantor (Perbaikan Lantai Teras Depan Kantor) sesuai SPK Nomor 206/KPA/SKIPM.PKY/PL.420/IV/2024, tanggal 30 April 2024 senilai Rp10.295.250,00 oleh CV Seribu Dinar, kurang volume senilai Rp875.000,00</p> <p>2. Balai KIPM / PPMHKP Semarang sesuai dengan Surat Tugas Nomor: B.358/ITJ.4/KP.440/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, pada Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sesuai SPK Nomor: 014/PPK.BKIPM.SMG/SPK/PL.420/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 senilai Rp47.307.201,89 oleh penyedia CV Bangun Jaya, kekurangan volume senilai Rp4.055.472,00.</p>
			B	Jika $\geq 80\%$ s.d. $< 100\%$ BAST pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki volume sesuai dengan surat perjanjian dan/atau addendumnya;				
			C	Jika $\geq 50\%$ s.d. $< 80\%$ BAST pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki volume sesuai dengan surat perjanjian dan/atau addendumnya;				
			D	Jika $> 0\%$ s.d. $< 50\%$ BAST pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki volume sesuai dengan surat perjanjian dan/atau addendumnya;				
			E	Jika seluruh BAST pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki volume tidak sesuai dengan surat perjanjian dan/atau addendumnya (0%).				
d.	Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT	11.25%	A	Jika seluruh BAST pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki spesifikasi sesuai dengan surat perjanjian dan/atau addendumnya (100%);	A	1	11.25%	<p>Hasil PBJ melalui e-katalog sesuai spesifikasi pesanan.</p>
			B	Jika $\geq 80\%$ s.d. $< 100\%$ BAST pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki spesifikasi sesuai dengan surat perjanjian dan/atau addendumnya;				
			C	Jika $\geq 50\%$ s.d. $< 80\%$ BAST pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki spesifikasi sesuai dengan surat perjanjian dan/atau addendumnya;				

No	Hasil Pembahasan	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Bobot Penilaian	Keterangan
			D Jika > 0% s.d. < 50% BAST pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki spesifikasi sesuai dengan surat perjanjian dan/atau addendumnya;					
			E Jika seluruh BAST pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki spesifikasi tidak sesuai dengan surat perjanjian dan/atau addendumnya (0%).					
5.	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5%					3.75%	
a.	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ	5.00%	A Jika laporan penyelenggaraan PBJ disusun secara Bulanan	B	0.75	3.75%		<p>Telah terdapat laporan penyelenggaraan PBJ secara Triwulanan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan PBJ lingkup BPPMHKP Triwulan I yang ditandatangani Sekretariat BPPMHKP kepada Kepala BPPMHKP sesuai Memorandum Nomor: B.802/BPPMHKP.1/PL-460/IV/2024, tanggal 5 April 2024; Laporan PBJ lingkup BPPMHKP Triwulan II yang ditandatangani Sekretariat BPPMHKP kepada Kepala BPPMHKP sesuai Memorandum Nomor: B.1561/BPPMHKP.1/PL-460/IV/2024, tanggal 8 Juli 2024; Laporan PBJ lingkup BPPMHKP Triwulan III yang ditandatangani Sekretariat BPPMHKP kepada Kepala BPPMHKP sesuai Memorandum Nomor B.2697/BPPMHKP.1/PL-460/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024 <p>Dokumen laporan proses PBJ terdapat pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1XqIRcnliNCUZvmG8pdYy58Uh5cc6xGL3?usp=sharing</p>
			B Jika laporan penyelenggaraan PBJ disusun secara Triwulanan					
			C Jika laporan penyelenggaraan PBJ disusun secara Semesteran					
			D Jika laporan penyelenggaraan PBJ disusun secara Tahunan					
			E Jika belum menyusun laporan penyelenggaraan PBJ					
6.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2022	15%					15.00%	
a.	Hasil pengawasan Inspektorat Mitra terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti	15.00%	A Jika $\geq 80\%$ rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa Tw I s/d Tw III Tahun 2022 telah ditindaklanjuti	A	1	15.00%		Rekomendasi hasil pengawasan PBJ periode Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024 adalah sebanyak 10 LHP dan seluruhnya telah tuntas ditindaklanjuti , dengan rincian sebanyak 22 temuan dan 35 rekomendasi. Rincian data dapat dilihat pada Lampiran 1.

No	Hasil Pembahasan	Bobot Penilaian	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Bobot Penilaian	Keterangan
	oleh Unit Eselon I yang bersangkutan		B Jika ≥ 70 s.d. $< 80\%$ rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa Tw I s/d Tw III Tahun 2022 telah ditindaklanjuti					
			C Jika ≥ 60 s.d. $< 70\%$ rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa Tw I s/d Tw III Tahun 2022 telah ditindaklanjuti					
			D Jika $< 60\%$ rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa Tw I s/d Tw III Tahun 2022 telah ditindaklanjuti					
Nilai Total							84.34%	



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAMAN www.kkp.go.id

Nomor : B.67/BPPMHKP.1/PL.760/I/2025 03 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Hal : Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN
Lingkup BPPMHKP Tahun 2024

Yth.
Kepala UPT Lingkup BPPMHKP
di

Tempat

Sehubungan dengan Surat Inspektur Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor T.553/ITJ.4/HP.660/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Penilaian Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Tahun 2024 pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut :

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing unit satker lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (12,5%)
 - b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
 - c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (25%)
 - d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%)
 - e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%)

2. Berdasarkan hasil evaluasi, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan secara umum mencapai dari target 80,00 %. Adapun rincian capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dari setiap satker lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan

Hari Maryadi

Lampiran I
Nomor : B.67/BPPMHKP.1/PL.760/I/2025
Tanggal : 31 Desember 2024

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker lingkup BPPMHKP Tahun 2024

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
1	Pusat Manajemen Mutu	80,00 %	97,50 %	Tercapai
2	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	80,00 %	97,50 %	Tercapai
3	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen	80,00 %	97,50 %	Tercapai
4	Balai KIPM Jakarta II	80,00 %	97,50 %	Tercapai
5	Balai Uji Standar KIPM	80,00 %	97,50 %	Tercapai
6	Sekretariat BKIPM	80,00 %	97,50 %	Tercapai
7	Stasiun KIPM Bandung	80,00 %	97,50 %	Tercapai
8	Stasiun KIPM Cirebon	80,00 %	97,50 %	Tercapai
9	Balai KIPM Semarang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
10	Stasiun KIPM Yogyakarta	80,00 %	97,50 %	Tercapai
11	Balai KIPM Surabaya I	80,00 %	97,50 %	Tercapai
12	Balai KIPM Surabaya II	80,00 %	97,50 %	Tercapai
13	Stasiun KIPM Aceh	80,00 %	97,50 %	Tercapai
14	Balai KIPM Medan I	80,00 %	97,50 %	Tercapai
15	Stasiun KIPM Medan II	80,00 %	97,50 %	Tercapai
16	Stasiun KIPM Tj.Balai Asahan	80,00 %	97,50 %	Tercapai
17	Stasiun KIPM Padang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
18	Stasiun KIPM Pekanbaru	80,00 %	97,50 %	Tercapai
19	Stasiun KIPM Jambi	80,00 %	97,50 %	Tercapai
20	Stasiun KIPM Palembang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
21	Balai KIPM Lampung	80,00 %	97,50 %	Tercapai
22	Stasiun KIPM Pontianak	80,00 %	97,50 %	Tercapai
23	Balai KIPM Entikong	80,00 %	97,50 %	Tercapai
24	Stasiun KIPM Palangkaraya	80,00 %	97,50 %	Tercapai
25	Balai KIPM Banjarmasin	80,00 %	97,50 %	Tercapai
26	Balai KIPM Balikpapan	80,00 %	97,50 %	Tercapai
27	Balai KIPM Manado	80,00 %	97,50 %	Tercapai
28	Stasiun KIPM Tahuna	80,00 %	97,50 %	Tercapai
29	Stasiun KIPM Palu	80,00 %	97,50 %	Tercapai
30	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	80,00 %	97,50 %	Tercapai
31	Balai Besar KIPM Makasar	80,00 %	97,50 %	Tercapai
32	Stasiun KIPM Kendari	80,00 %	97,50 %	Tercapai
33	Stasiun KIPM Bau-bau	80,00 %	97,50 %	Tercapai
34	Balai KIPM Ambon	80,00 %	97,50 %	Tercapai
35	Balai KIPM Denpasar	80,00 %	97,50 %	Tercapai
36	Balai KIPM Mataram	80,00 %	97,50 %	Tercapai
37	Stasiun KIPM Bima	80,00 %	97,50 %	Tercapai
38	Stasiun KIPM Kupang	80,00 %	97,50 %	Tercapai

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
39	Balai KIPM Jayapura	80,00 %	97,50 %	Tercapai
40	Stasiun KIPM Merauke	80,00 %	97,50 %	Tercapai
41	Stasiun KIPM Bengkulu	80,00 %	97,50 %	Tercapai
42	Stasiun KIPM Ternate	80,00 %	97,50 %	Tercapai
43	Balai Besar KIPM Jakarta I	80,00 %	97,50 %	Tercapai
44	Stasiun KIPM Merak	80,00 %	97,50 %	Tercapai
45	Stasiun KIPM Pangkalpinang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
46	Stasiun KIPM Gorontalo	80,00 %	97,50 %	Tercapai
47	Stasiun KIPM Batam	80,00 %	97,50 %	Tercapai
48	Balai KIPM Tanjung Pinang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
49	Stasiun KIPM Sorong	80,00 %	97,50 %	Tercapai
50	Stasiun KIPM Mamuju	80,00 %	97,50 %	Tercapai
51	Balai KIPM Tarakan	80,00 %	97,50 %	Tercapai

Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan

Hari Maryadi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805, FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : T.553/ITJ.4/HP.660/XII/2024 19 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Hasil Penilaian Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Tahun 2024 pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Yth. Sekretaris BPPMHKP
di Jakarta

Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: B.486/ITJ.4/KP.440/XI/2024, tanggal 28 November 2024, Auditor Inspektorat IV telah melaksanakan Penilaian Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN TA 2024 Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) TA 2024 pada tanggal 02 s.d. 06 Desember 2024. Bersama ini disampaikan hasil penilaian dimaksud, sebagai berikut:

1. Pengukuran Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN dilakukan terhadap kualitas pengelolaan BMN Unit Eselon I. Hasil pengukuran Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP TA 2024 memperoleh nilai **99** dari maksimum **100** dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Kualitas Pengawasan	60	60
	a. Kualitas Perencanaan Pengawasan	20	20
	b. Kualitas Pelaksanaan Pengawasan	40	40
2	Kualitas Pengelolaan BMN Unit Eselon I/Mitra	40	39
Hasil Penilaian		100	99

2. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP TA 2024 memperoleh nilai **97,5** dari maksimum **100**. Adapun rincian nilai disajikan pada tabel berikut:

No	Sub Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Ketersediaan dan pemanfaatan dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024	12,50	10,00
2	Usulan penetapan status penggunaan (PSP) BMN Tahun 2024	25,00	25,00
3	Usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat	25,00	25,00
4	Ketersediaan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023	25,00	25,00
5	Ketepatan penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan)	12,50	12,50
Hasil Penilaian		100	97,50

3. Uraian hasil pengukuran terhadap masing-masing komponen Kualitas Pengelolaan BMN Unit Eselon I BPPMHKP dapat dikemukakan sebagai berikut:
- Unit Eselon I BPPMHKP telah menyusun RKBMN Tahun 2024. Adapun tingkat pemanfaatan RKBMN terhadap penyusunan RKAKL adalah sebesar 68,02%. Belum optimalnya pemanfaatan RKBMN khususnya dalam pemeliharaan BMN karena dalam pengalokasian anggaran diutamakan/diprioritaskan untuk BMN yang memerlukan pemeliharaan pada TA 2024;
 - Usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan III tahun 2024 dari sebanyak 33 NUP telah diusulkan sebanyak 31 NUP atau mencapai 93,94%;
 - Usulan penghapusan untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebanyak 2.142 NUP dari total BMN Rusak Berat sebanyak 2.180 NUP atau sebesar 98,26%;
 - Hasil Pengadaan BMN Tahun 2023 (untuk Satker Pusat) sebanyak 27 NUP, seluruhnya telah dilengkapi dengan Berita Acara Pemakaian; dan
 - Laporan BMN TA 2023 dan Laporan BMN Semester I TA 2024 telah disusun dan disampaikan ke Sekretariat Jenderal c.q. Biro Keuangan dan BMN tepat waktu.
- Uraian lengkap hasil pengukuran disajikan dalam lembar kerja pengukuran sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hasil penilaian dan dalam rangka efektivitas pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP kepada Sekretaris BPPMHKP direkomendasikan agar:

1. Menginstruksikan kepada Ketua Tim Kerja Program dan Data untuk memanfaatkan RKBMN dalam penyusunan RKAKL terutama dalam mengalokasikan belanja pemeliharaan BMN; dan
2. Menginstruksikan kepada seluruh Satker Lingkup BPPMHKP untuk mengusulkan penetapan status penggunaan (PSP) BMN hasil pengadaan Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku, dan mengusulkan penghapusan untuk BMN dengan kondisi rusak berat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur IV



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal
2. Kepala BPPMHKP

Lampiran 1. Lembar Kerja Penilaian Mandiri Pengukuran IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN pada BPPMHKP

NO	Komponen/Sub Komponen	Jawaban	Bobot	Nilai	Referensi Nilai	Keterangan	Link Data Dukung
A	Kualitas Pengawasan		60	60			
I	Kualitas Perencanaan Pengawasan		20	20			
	Ketersediaan kegiatan pendampingan (<i>consulting</i>) dan kegiatan penjaminan mutu (<i>quality assurance</i>) atas pengelolaan BMN Unit Eselon I/Mitra pada PKPT Tahun 2024	A	20	20	a. apabila tersedia kegiatan pendampingan (<i>consulting</i>) dan kegiatan penjaminan mutu (<i>quality assurance</i>) atas pengelolaan BMN Unit Eselon I/Mitra b. apabila hanya tersedia kegiatan pendampingan (<i>consulting</i>) atau penjaminan mutu (<i>quality assurance</i>) saja c. apabila tidak mencantumkan kegiatan pendampingan (<i>consulting</i>) dan penjaminan mutu (<i>quality assurance</i>) pengelolaan BMN Unit Eselon I/Mitra	Sesuai Dokumen PKPT Revisi-2 yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 125 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 telah terdapat kegiatan pendampingan (<i>consulting</i>) dan kegiatan penjaminan mutu (<i>quality assurance</i>) atas pengelolaan BMN mitra BPPMHKP pada PKPT Tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/1nowvjKVohAgeDjiSBsoxUc35c64AqdZ1/view?usp=sharing
II	Kualitas pelaksanaan pengawasan		40	40			
a	Tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT kegiatan pengawasan pengelolaan BMN pada Unit Eselon I/Mitra	A	15	15	a. apabila tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT > 80% b. apabila tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT ≤ 10%	Sesuai hasil evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Semester I Tahun 2024 pada Inspektorat Jenderal KKP, Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Sm I Tahun 2024 pada Inspektorat IV adalah sebesar 94,92%	https://drive.google.com/drive/folders/1521W6xCtvIhYzI7rIOfFDO_H11tSUSIM?usp=sharing

NO	Komponen/Sub Komponen	Jawaban	Bobot	Nilai	Referensi Nilai	Keterangan	Link Data Dukung
b	Pemenuhan kendali mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan BMN pada Unit Eselon I/Mitra	A	15	15	a. apabila tingkat Pemenuhan KM Pengawasan > 80% b. apabila tingkat Pemenuhan KM Pengawasan > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila tingkat Pemenuhan KM Pengawasan > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila tingkat Pemenuhan KM Pengawasan ≤ 10%	Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan yang Memenuhi Standar Mutu (Kendali Mutu) Pengawasan Semester I Tahun 2024, Pemenuhan Kendali Mutu Pengawasan (Audit dan Evaluasi) adalah sebesar 94,96%	https://drive.google.com/file/d/1LfyGVmSM78O3aHlGgJlyle7pnaRji25t/view?usp=sharing
c	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan BMN pada Unit Eselon I/Mitra periode TW I s/d TW III Tahun 2024 yang telah tuntas	A	10	10	a. apabila prosentase penyelesaian tindak lanjut > 80% b. apabila prosentase penyelesaian tindak lanjut > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila prosentase penyelesaian tindak lanjut > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila prosentase penyelesaian tindak lanjut ≤ 10%	Sesuai data SIDAK, diketahui terdapat 3 Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan BMN dengan hasil tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 100% yaitu: 1) Pemantauan Hasil Inventarisasi Aset BMN Rusak Berat yang akan Diusulkan Penghapusannya pada Balai KIPM Lampung (1 rekomendasi/Tuntas); 2) Reviu Awal dan Uji Petik Inventarisasi BMN dalam rangka Pengalihan BMN BPPMHKP ke Badan Karantina Indonesia pada BBKIPM Jakarta I (1 rekomendasi/Tuntas); 3) Reviu RKBMN BPPMHKP Tahun 2026 (8 Rekomendasi/Tuntas)	https://drive.google.com/drive/folders/1uKwpzaXFNtSOeTC-IsVPW-utxnpOItV?usp=sharing
B	Kualitas Pengelolaan BMN Unit Eselon I/Mitra		40	39			
I	Nilai rata-rata tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit eselon I		40	39			
a	Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024		5	4			
1	Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2024	Y	2	2	Ya, jika unit kerja telah menyusun RKBMN	Dokumen Usulan RKBMN 2024 1011/BKIPM/PL.760/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 untuk Pengadaan dan Pemeliharaan	https://drive.google.com/drive/folders/1jhUQQMYdTUx4ERMZC

NO	Komponen/Sub Komponen	Jawaban	Bobot	Nilai	Referensi Nilai	Keterangan	Link Data Dukung
							bDNGK7T9NKviCP6?usp=drive_link
2	Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2024 (Satker Pusat)	B	3	2	a. Apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 80% b. Apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 10% s.d. ≤ 50 % d. apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL ≤ 10%	Pemanfaatan RKBMN terhadap penyusunan RKAKL adalah sebesar 68,02%	https://drive.google.com/drive/folders/1jhUQQMYdTUx4ERMZCbDNGK7T9NKviCP6?usp=drive_link
b	Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 ke pengguna barang	A	10	10	a. apabila prosentase usulan PSP BMN > 80% b. apabila prosentase usulan PSP BMN > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila prosentase usulan PSP BMN > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila prosentase usulan PSP BMN ≤ 10%	Hasil Perhitungan pada Master Aset BPPMHKP pada Aplikasi SIMAN v2 terdapat 2 NUP senilai Rp20.373.000,00 dari 33 NUP perolehan s.d. Triwulan III Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1FR1dIltxSdT68X5rZg4A-NZJ8H97g2Rt?usp=drive_link
c	Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat ke pengguna barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024	A	10	10	a. apabila prosentase usulan penghapusan BMN > 80% b. apabila prosentase usulan penghapusan BMN > 50% s.d. < 80% c. apabila prosentase usulan penghapusan BMN > 10% s.d. < 50% d. apabila prosentase usulan penghapusan BMN < 10%	BMN Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan sejumlah 2.142 NUP dari Total BMN Rusak Berat 2.180 NUP Persentase Penghapusan sebesar 98,26%	https://drive.google.com/drive/folders/1-vfowD_HBGBcn2Pe9UVBdX4lyZzxWNY?usp=drive_link

NO	Komponen/Sub Komponen	Jawaban	Bobot	Nilai	Referensi Nilai	Keterangan	Link Data Dukung
d	Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (Pusat)	A	10	10	a. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 80% b. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian ≤ 10%	Persentase BMN Pengadaan BMN Tahun 2023 yang telah dilengkapi BA Pemakaian adalah sebesar 100% 27 NUP dari 27 NUP BMN Tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/13wHxybqKVBJBclgHrSOsX9zpGHFFqTbU?usp=drive_link
e	Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu	A	5	5	a. apabila Penyusunan Laporan BMN Semester I dan Tahunan Tepat Waktu b. apabila hanya Penyusunan Laporan BMN Semester I atau Tahunan Tepat Waktu c. apabila Penyusunan Laporan BMN Semester I dan Tahunan tidak Tepat Waktu	LK Telah disampaikan tepat waktu	https://drive.google.com/drive/folders/1JTnBm6l1CTvnVOkC8QryaumK7Li5qrMh?usp=drive_link
Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN			100	99			

Lampiran 2. Lembar Kerja Penilaian Mandiri Pengukuran IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Jawaban	Bobot	Nilai	Pilihan Jawaban	Kondisi/Penyebab Pencapaian Tdk Optimal
I	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN		100	97,5		
1	Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024		12,5	10		
a	Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2024	Y	5	5	Ya, jika unit kerja telah menyusun RKBMN	Dokumen Usulan RKBMN 2024 1011/BKIPM/PL.760/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 untuk Pengadaan dan Pemeliharaan
b	Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2024	B	7,5	5	a. Apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 80% b. Apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 10% s.d. ≤ 50 % d. apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL ≤ 10%	Pemanfaatan RKBMN terhadap penyusunan RKAKL adalah sebesar 68,02%
2	Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan III tahun 2024 ke pengguna barang	A	25	25	a. apabila prosentase usulan PSP BMN > 80% b. apabila prosentase usulan PSP BMN > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila prosentase usulan PSP BMN > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila prosentase usulan PSP BMN ≤ 10%	Hasil Perhitungan pada Master Aset BPPMHKP pada Aplikasi SIMAN v2 terdapat 2 NUP senilai Rp20.373.000,00 dari 33 NUP perolehan s.d. Triwulan III Tahun 2024
3	Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat ke pengguna barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024	A	25	25	a. apabila prosentase usulan penghapusan BMN > 80% b. apabila prosentase usulan penghapusan BMN > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila prosentase usulan penghapusan BMN > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila prosentase usulan penghapusan BMN ≤ 10%	BMN Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan sejumlah 2.142 NUP dari Total BMN Rusak Berat 2.180 NUP Persentase Penghapusan sebesar 98,26%

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Jawaban	Bobot	Nilai	Pilihan Jawaban	Kondisi/Penyebab Pencapaian Tdk Optimal
4	Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian	A	25	25	<ul style="list-style-type: none"> a. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 80% b. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian ≤ 10% 	Persentase BMN Pengadaan BMN Tahun 2023 yang telah dilengkapi BA Pemakaian adalah sebesar 100% 27 NUP dari 27 NUP BMN Tahun 2023
5	Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu	A	12,5	12,5	<ul style="list-style-type: none"> a. apabila Penyusunan Laporan BMN Semester I dan Tahunan Tepat Waktu b. apabila hanya Penyusunan Laporan BMN Semester I atau Tahunan Tepat Waktu c. apabila Penyusunan Laporan BMN Semester I dan Tahunan tidak Tepat Waktu 	



